



**DETERMINAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan

Oleh :

Salsabila Faraz Anly

NIM. C1A019126

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Salsabila Faraz Anly
NIM : C1A019126
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Determinan Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku dalam Ujian Komprehensif pada tanggal yang tertera dibawah ini.

	Jambi, 26 Oktober 2023
Pembimbing I	Pembimbing II
<u>Dr. Zamzami, S.E., M.S..</u>	<u>Selamet Rahmadi, S.E., M.Si.</u>
NIP. 196410271990031002	NIP. 196807091993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Dr. Etik Umiyati, S.E., M.Si.
NIP. 196807091993032002

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang penulis penatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Determinan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”***. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Andries Afni, ibu Nelly Rosita dan adik Nasywa Alfira Anly serta keluarga besar tercinta atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini serta dukungan yang amat baik secara moril dan materil kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Dan saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Zamzami, S.E., M.S, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Selamat Rahmadi S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, ilmu pengetahuan serta petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing dan membantu maupun mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M. Sc., Ph. D, selaku rektor Universitas Jambi
2. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, yang telah memberikan izin untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Drs. Zulgani, M.P. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Jambi, atas izin yang diberikan dalam melaksanakan penelitian.
4. Ibu Dr. Hj Etik Umiyati, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi.

5. Profesor, Bapak serta Ibu Dosen Prograam Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang selama perkuliahan telah membimbing dan mengajarkan saya dengan baik.
6. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah kebersamai selama dibangku perkuliahan yaitu Hairun Nisa, Yolanda, Shintya Sascila, RTS Marissa Oktaviani. Yang telah turut memotivasi dan ikut andil dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat ku Devi Septiyanti S.Pd, Indry Lusi Octavianti, Azty Kirana, Anggraini Sabila, Azty Kirana Puteri Seroja, Istiqomah, Putri Aninda Rohman, Ardila Yasa Efendi, Eka Safitri, Alya Dwi Cahyani, Debby Triputri Amd. Kep, yang telah membantu memotivasi penulis dari jauh dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari sebagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri

Kemudian, kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas bantuan tenaga, fikiran dan dukungan, serta Do'a-Nya. Semoga Allah SWT memberikan balasan semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari tata cara ataupun penulisannya. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin agar skripsi ini dapat menjadi yang terbaik. Oleh karna itu, penulis sangat membutuhkan masukan dan ide untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, 26 Oktober 2023

Penulis

Salsabila Faraz Anly

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) menganalisis perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), Belanja Modal, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dan (2) menganalisis pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi maka digunakan model regresi data panel serta data yang bersumber dari BPS Provinsi Jambi dan DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang terpilih adalah model *Fixed Effect* (FEM). Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sementara secara parsial, hanya variabel tenaga Kerja yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB, variabel Belanja Modal dan Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Kata Kunci : Belanja Modal, PDRB ADHB, Provinsi Jambi, Tenaga Kerja, TPT

ABSTRACT

This study aims to, (1) analyze the development of the Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the basis of current prices (ADHB), capital expenditures, labor, and the open unemployment rate in districts/cities in Jambi province, and (2) analyze the effect of expenditure Capital, Labor, and Open Unemployment Rate to the Regency/City Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Jambi Province. To find out the factors that influence the GRDP of districts/cities in Jambi Province, a panel data regression model is used as well as data sourced from BPS Jambi Province and DJPK Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The results showed that the best model chosen was the Fixed Effects (FEM) model. The panel data regression results show that the variables Capital Expenditure, Labor, and Open Unemployment Rate together have a significant effect on GRDP. While partially, only the labor variable has a significant effect on GRDP, the Capital Expenditures and Open Unemployment Rate variables have no significant effect on GRDP.

Keywords: *Capital Expenditure, Jambi Province, Labor, Riil GRDP, Unemployment*

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Landasan Teori	13
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto	13
2.1.2. Belanja Daerah.....	22
2.1.3. Belanja Modal.....	27
2.1.4. Tenaga Kerja.....	31
2.1.5. Tingkat Pengangguran	37
2.2. Keterkaitan Antar Variabel	43
2.2.1. Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	43
2.2.2. Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	45
2.2.3. Tingkat Pengangguran Terhadap Produk Domestik Regional Brut	47
2.3. Penelitian Terdahulu	49
2.4. Kerangka Pemikiran	55
2.5. Hipotesis.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1. Jenis dan Sumber Data	59
3.1.1. Jenis Data.....	59
3.1.2. Sumber Data	59
3.2. Metode Analisis Data	60
3.3.1. Pendekatan Perhitungan Model Regresi Data Panel.....	62
3.3.2. Pengujian Model Regresi Data Panel	66
3.3.3. Pengujian Asumsi Klasik.....	67

3.3.4. Pengujian Hipotesis	69
3.3.5. Koefisien Determinasi	70
3.3. Operasional Variabel	71
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	72
4.1. Gambaran Umum Provinsi Jambi	72
4.1.1. Kondisi Demografi Provinsi Jambi	73
4.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jambi	75
4.2. Gambaran Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	76
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	99
5.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, Tenaga kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	99
5.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	99
5.1.2. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	101
5.1.3. Perkembangan Tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi..	103
5.1.4. Laju Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	104
5.2. Pengaruh Belanja Modal, Tenaga kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	106
5.2.1. Analisis Regresi Data Panel	106
5.2.2. Pembahasan	113
5.2.3. Implikasi Penelitian	116
BAB VI PENUTUP	119
5.1. Kesimpulan	119
5.2. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)	4
Tabel 1.2.	Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)	6
Tabel 1.3.	Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Ribu Jiwa).....	9
Tabel 1.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Persen)	10
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu	49
Tabel 4.1.	Kondisi Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	72
Tabel 4.2.	Kondisi Demografi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022	74
Tabel 4.3.	Kondisi Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022	75
Tabel 4.4.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kerinci.....	77
Tabel 4.5.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Merangin	79
Tabel 4.6.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sarolangun	82
Tabel 4.7.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Batang Hari	84
Tabel 4.8.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi	86
Tabel 4.9.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	88
Tabel 4.10.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	90
Tabel 4.11.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tebo	91
Tabel 4.12.	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bungo	93
Tabel 4.13.	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Jambi.....	96
Tabel 4.14.	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Sungai Penuh	98

Tabel 5.1.	Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2022 (Persen).....	99
Tabel 5.2.	Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2022 (Persen).....	101
Tabel 5.3.	Perkembangan Tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2022 (Persen).....	103
Tabel 5.4.	Selisih Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2022 (Persen)	105
Tabel 5.5.	Common Effect Model (CEM)	107
Tabel 5.6.	Fixed Effect Model (FEM)	107
Tabel 5.7.	Random Effect Model (REM)	108
Tabel 5.8.	Uji Chow.....	108
Tabel 5.9.	Uji Hausman	109
Tabel 5.10.	Uji Multikolinearitas.....	110
Tabel 5.11.	Uji Heteroskedastisitas	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	58
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian.....	125
Lampiran 2. Hasil <i>Common Effect Model</i> (CEM)	129
Lampiran 3. Hasil <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	130
Lampiran 4. Hasil <i>Random Effect Model</i> (REM).....	131
Lampiran 5. Hasil Uji Chow	132
Lampiran 6. Hasil Uji Hausman.....	133
Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas	134
Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas	135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara prinsip, proses pembangunan ekonomi mencakup sejumlah tindakan strategis dan langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga, menciptakan peluang pekerjaan yang lebih banyak, mengurangi kesenjangan dalam pendapatan, memperkuat interkoneksi ekonomi antar wilayah, dan mengalihkan fokus ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Dengan kata lain, inti dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan penduduk sambil menjaga prinsip-prinsip keadilan yang adil (sebagaimana dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2008). Proses ini melibatkan serangkaian upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat yang lebih merata dari perkembangan ekonomi yang terus berlanjut. Dengan cara ini, pembangunan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka, tetapi juga tentang kesejahteraan sosial dan distribusi yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Agar proses desentralisasi dapat terlaksana dengan baik, penerapan otonomi daerah harus menjamin manajemen keuangan yang lebih adil, merata, melibatkan partisipasi aktif, transparan, serta mempertanggungjawabkan. Penyediaan dana yang dialokasikan untuk pemerintahan lokal dan upaya desentralisasi didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan hal ini harus menjadi prioritas utama. Selain itu, peningkatan sumber daya seperti tenaga kerja yang berkualitas, modal yang

memadai, serta kemajuan teknologi dapat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pusat menghadapi keuntungan dan kerugian sebagai akibat dari otonomi daerah. Manfaat dari opsi ini meliputi ekspansi pusat pengambilan keputusan, percepatan proses pengambilan keputusan, peningkatan respons keputusan terhadap isu-isu lokal yang lebih realistis dan obyektif, pengurangan biaya, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk membuat keputusan sulit tentang strategi pembangunan daerah. Strategi pengembangan adalah kegiatan yang memungkinkan dengan persyaratan anggaran yang realistis.

Perencanaan belanja yang efisien adalah suatu tahapan yang dijalankan pada periode yang akan datang dan diuraikan secara rinci dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mencatatkan semua sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran pemerintah daerah, menjadikannya sebagai landasan utama dalam penyusunan anggaran operasional daerah. Anggaran ini digunakan untuk menyiapkan anggaran pemerintah daerah. Pentingnya perencanaan belanja yang tepat terlihat dalam peran utama APBD sebagai alat yang memberikan visibilitas terhadap sumber-sumber pendapatan yang tersedia bagi pemerintah daerah dan sekaligus sebagai panduan dalam menentukan alokasi anggaran. Dokumen APBD ini menjadi kerangka kerja yang mengatur bagaimana pemerintah daerah akan mengalokasikan sumber daya finansialnya guna mendukung program-program dan proyek-proyek yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan daerah tersebut. Pemerintah pusat seharusnya tidak bertanggung jawab untuk menyeimbangkan anggaran daerah otonom; sebaliknya, daerah-daerah tersebut harus fokus untuk menciptakan sistem keuangan mandiri mereka sendiri dan memprioritaskan anggaran yang didanai oleh pendapatan daerah.

Meningkatkan penyampaian layanan publik dan mendorong penerimaan daerah (PAD) dan pertumbuhan daerah dengan sumber daya yang terbatas

merupakan tantangan umum bagi daerah otonom. Ini berarti daerah perlu menemukan pendekatan yang berbeda untuk masalah ini. Dua pendekatan termasuk meningkatkan belanja modal (sebagai investasi pemerintah daerah) dan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia. Khususnya di lokasi dengan sumber daya keuangan yang kecil, hal ini sangat dibutuhkan (Halim, 2001).

Semua daerah otonom Indonesia, termasuk Provinsi Jambi, menghadapi tantangan ini dan berupaya mengatasinya. Salah satu provinsi di Sumatera, Jambi, memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat (5,41 persen per tahun). Selain itu, pertumbuhan tahunan PDRB telah menjadi tren yang konsisten. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang signifikan baru-baru ini di Jambi, kesenjangan regional dalam pembangunan tetap berada pada tingkat krisis. Variasi IPM, pendapatan per kapita, dan angka kemiskinan antar kabupaten dan kota menjadi indikatornya.

Perekonomian Provinsi Jambi masih memiliki sejumlah tantangan yang harus diatasi sebelum mencapai potensi pengembangannya. Tidak Ada Perubahan Signifikan Masih diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur yang sebanding dengan tren belanja daerah. Sumber daya manusia secara keseluruhan menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih belum dapat memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya aparatur dan modalnya, yang berdampak pada kebijakan terkait pembangunan.

Mendeklarasikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat lokal atas prakarsa sendiri melalui usaha masyarakat adalah yang kita maksud ketika kita berbicara tentang otonomi daerah. Daerah Tingkat II atau Kabupaten/Kota menekankan otonomi dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini menunjukkan legitimasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai kekayaan daerah. Oleh karena itu, informasi tentang kabupaten dan kota di Provinsi Jambi menjadi dasar penelitian ini.

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	9.408,0	9.912,5	10.466,7	11.291,3	12.225,7
Merangin	14.452,8	15.288,1	15.698,9	17.886,8	20.284,1
Sarolangun	14.502,5	15.126,9	14.443,8	16.635,8	20.772,1
Batang hari	15.663,9	16.463,3	16.401,5	18.810,8	24.305,0
Muaro jambi	22.961,0	24.295,0	24.419,8	27.750,0	32.968,5
Tanjabtlim	24.111,7	24.680,3	19.475,3	21.881,3	25.606,2
Tanjabbar	41.458,3	42.945,5	37.097,8	42.039,5	50.081,5
Tebo	13.839,1	14.593,4	14.746,7	16.960,4	19.702,2
Bungo	17.303,3	17.895,9	17.315,2	20.153,1	24.926,3
Kota Jambi	28.797,4	30.636,9	29.511,7	31.918,1	36.142,0
Kota Sungai Penuh	6.951,1	7.479,4	7.562,3	7.980,9	8.680,2
Provinsi Jambi	207.878,7	216.927,7	206.242,6	233.725,5	275.693,7

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa PDRB ADHB Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, PDRB ADHB Provinsi Jambi mencapai angka Rp 207.878,7 milyar, dan meningkat menjadi Rp 275.693,7 milyar pada tahun 2022. Pada tahun 2018, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Kabupaten/Kota dengan PDRB ADHB tertinggi, yaitu sebesar Rp 41.458,3 milyar. Sementara itu, Kota Sungai Penuh merupakan Kabupaten/Kota dengan PDRB terkecil pada tahun tersebut, dengan angka Rp 6.951,1 milyar. Pada tahun 2022, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali mencatatkan PDRB tertinggi, mencapai Rp 50.081,5 milyar, sementara Kota Sungai Penuh masih memperoleh PDRB terkecil, yaitu Rp 8.680,2 milyar.

Setiap daerah di Provinsi Jambi memperhatikan PDRB provinsi secara keseluruhan. Karena kemakmuran suatu bangsa dapat diukur antara lain dengan tingkat ekspansi ekonominya. Pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi diklasifikasikan sebagai belanja modal, termasuk alokasi dana

untuk proyek infrastruktur. Untuk menghadapi dampak yang lebih luas dari krisis ekonomi tahun 2008, disarankan untuk memberikan stimulus dalam bentuk paket belanja modal yang bertujuan meningkatkan infrastruktur. Menurut laporan Bank Dunia (2010), belanja modal sering kali memiliki efek pengganda yang lebih besar daripada belanja konvensional, sementara pengeluaran untuk barang dan jasa memiliki efek pengganda yang lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak.

Hubungan empiris antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi subjek dari beberapa penelitian. Namun, hasil studi yang menginvestigasi dampak dari peningkatan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak konsisten. Berdasarkan penelitian BAPPENAS (2007), mereka menemukan bahwa peningkatan belanja modal pemerintah sebagai bagian dari strategi fiskal pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi makro, baik di tingkat nasional maupun daerah dalam konteks perekonomian Indonesia. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Parmawati (2010), yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja investasi dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDRB), namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan belanja modal. Namun, hasil penelitian Anasmen (2009) menghadirkan temuan yang bertentangan, di mana belanja modal pemerintah di tingkat kota atau provinsi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan PDRB. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Hamzah & Setiyawati (2007), yang menyimpulkan bahwa belanja pembangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut hipotesis Harrod-Domar, kondisi ekonomi yang stabil terkait dengan tingkat produksi modal di suatu negara, dan belanja modal sektor publik dianggap sebagai indikator yang paling berpengaruh terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Manfaat belanja langsung daerah, yang meliputi penanaman modal, dirasakan langsung oleh masyarakat dan bertahan

lama setelah satu siklus anggaran karena digunakan untuk memperoleh aset tetap atau menambah kekayaan daerah. dampak terhadap kualitas pelayanan publik Dasar pemikiran di balik restrukturisasi APBD pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan proporsi belanja modal terhadap belanja operasional.

Tabel 1.2. Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	191,87	293,81	216,76	165,03	123,24
Merangin	207,24	226,73	274,68	342,89	73,72
Sarolangun	215,17	414,97	247,73	158,70	184,69
Batang hari	148,21	251,12	150,46	177,30	276,41
Muaro jambi	292,73	322,19	262,78	268,24	234,98
Tanjabtlim	312,96	328,87	229,23	229,95	290,56
Tanjabbar	419,66	697,23	353,97	404,37	381,43
Tebo	258,99	269,09	139,86	222,21	374,49
Bungo	203,21	234,63	153,99	103,30	95,52
Kota Jambi	445,81	432,10	444,35	495,81	378,62
Kota Sungai Penuh	194,68	176,54	134,64	168,82	140,13
Provinsi Jambi	784,72	866,50	1.056,47	642,70	906,8

Sumber : DJBP kemenkeu Kab/kota Provinsi Jambi

Dari data tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa belanja modal pada tahun 2018 sampai 2022. Belanja modal paling tinggi diduduki oleh Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 381,43 milyar rupiah. Sementara belanja modal terkecil pada Tahun 2022 pada Kabupaten Merangin sebesar 73,72 milyar rupiah. Hal ini meningkat jauh dibandingkan pada Tahun 2018, dimana Kota Jambi dengan belanja modal tertinggi di Provinsi Jambi (445,81 milyar rupiah), sementara Kabupaten dengan belanja modal paling rendah pada Tahun 2018 adalah Kabupaten Batang hari (148,21 milyar rupiah). Provinsi Jambi dapat diketahui mengalami fluktuasi belanja modal setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 belanja modal Provinsi Jambi sebesar 784,72 milyar rupiah dan terus meningkat hingga Tahun 2022 menjadi 906,8 milyar rupiah.

Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) diduga berperan dalam menentukan besaran realisasi belanja modal. Pengeluaran modal (*investment expenditure*) yang dilakukan pemerintah, terutama untuk hal-hal seperti infrastruktur, dianggap kondusif untuk ekspansi ekonomi. Berinvestasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan output sektor swasta. Pemerintah di semua tingkatan harus menaikkan belanja modal mereka dibandingkan dengan belanja operasional mereka karena dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh belanja modal terhadap pelayanan publik.

Output suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh Belanja Modal tetapi juga oleh Tenaga Kerja. Dengan begitu banyak orang untuk dipekerjakan, kita dapat mengharapkan ekonomi yang kuat. Namun, dikhawatirkan pertumbuhan populasi dapat memperlambat pembangunan ekonomi. Todaro (2000) berpendapat bahwa ekspansi populasi yang cepat memicu munculnya masalah keterbelakangan dan selanjutnya mengurangi peluang pembangunan. Bukan hanya ekonomi yang perlu dikembangkan, tetapi bidang lain seperti angkatan kerja juga. Pekerja dalam perekonomian diukur dengan angkatan kerja. Orang usia kerja yang sekarang bekerja atau yang memiliki pekerjaan tetapi sedang menganggur dan sedang mencari pekerjaan dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja. Pekerja dan mereka yang tidak memiliki pekerjaan merupakan setengah dari angkatan kerja.

Setiap anggota populasi suatu negara (berusia 15-64 tahun) yang mampu dan mau menghasilkan barang dan jasa sebagai respons terhadap permintaan pasar dianggap tenaga kerja. Ini berarti bahwa setiap orang di negara yang berusia di atas 15 tahun dianggap berada dalam angkatan kerja. Hal ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan no. 25 Tahun 1997. Pada tanggal 1 Oktober 1998, undang-undang ini resmi berlaku.

Usia 15 tahun dipilih sebagai titik awal karena banyak orang di Indonesia, terutama di pedesaan, yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan saat itu. Mirip

dengan tidak adanya usia pensiun wajib di Amerika Serikat, Indonesia tidak memberlakukannya pada tenaga kerjanya. Tunjangan hari tua hanya tersedia untuk sebagian kecil penduduk, terutama pekerja pemerintah dan sebagian dari tenaga kerja sektor swasta. Penghasilan dari sumber ini masih belum mencukupi bagi penduduk ini, sehingga mereka yang telah mencapai usia pensiun seringkali tetap bekerja untuk memenuhi kewajiban keuangannya (Simanjuntak, 1998). Istilah "tenaga kerja" mengacu pada angkatan kerja dan orang-orang yang tidak secara aktif terlibat dalam tenaga kerja produktif (bukan angkatan kerja).

Seperti yang sudah diketahui, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan salah satu kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, dihadapkan pada tantangan serius dalam hal ketenagakerjaan. Masalah pengangguran sering muncul ketika terdapat ketidakcocokan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Masalah pengangguran bukanlah hal yang sepele dan dapat berdampak luas pada perekonomian sebuah negara. Salah satu indikator kemajuan pemerintah adalah sejauh mana mereka mampu menciptakan lapangan kerja. Penciptaan dan ekspansi kesempatan kerja akan memberikan dampak positif pada pemanfaatan tenaga kerja yang ada, yang pada gilirannya akan meningkatkan upah dan daya beli, yang keduanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi penting untuk diingat bahwa tidak setiap lowongan pekerjaan mengarah ke pekerjaan, dan bahkan orang yang bekerja penuh dapat memilih untuk bekerja lebih dari satu pekerjaan.

Tabel 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Ribu Jiwa)

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	127,5	120,0	127,2	131,0	136,3
Merangin	186,7	186,9	190,7	192,1	193,7
Sarolangun	136,0	135,0	141,8	137,2	144,0
Batang hari	122,9	114,4	128,3	132,6	124,8
Muaro jambi	194,0	183,4	194,7	202,9	222,4
Tanjabtjm	114,2	112,1	119,9	115,5	119,1
Tanjabbar	174,9	165,9	179,8	179,6	172,1
Tebo	175,0	175,4	180,5	181,5	183,2
Bungo	172,6	166,1	168,5	168,4	183,6
Kota Jambi	276,0	283,6	265,2	263,0	276,4
Kota Sungai Penuh	45,3	41,0	42,4	43,1	42,2
Provinsi Jambi	1.724,9	1.683,6	1.739,0	1.746,8	1.797,8

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023

Dilihat dari data tabel 1.3 bahwa jumlah yang bekerja di provinsi jambi terbagi dalam 11 kabupaten/kota. Karakteristik setiap daerah berbeda-beda mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah orang yang bekerja pada setiap kabupaten/kota dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Tenaga kerja pada Provinsi jambi mengalami peningkatan pada tahun 2018 – 2022, dimana pada tahun 2018 sebesar 1.724,9 ribu jiwa dan meningkat menjadi 1.797,8 ribu jiwa pada tahun 2022.

Selain itu, masalah pengangguran memang sulit diperdebatkan dan menjadi isu penting karena bisa dikaitkan dengan berbagai faktor. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pertumbuhan PDB negara, inflasi, kemiskinan, dan tingkat gaji. Penurunan tingkat pengangguran diharapkan akan mengikuti peningkatan tingkat upah jika pertumbuhan ekonomi di suatu negara membaik. Tingkat pengangguran dapat diturunkan jika upah dinaikkan. Naiknya tingkat pengangguran akan dipengaruhi oleh meningkatnya inflasi (Sukirno, 2008).

Tabel 1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	2,74	2,62	2,43	2,32	2,63
Merangin	3,47	3,68	4,86	4,83	4,69
Sarolangun	4,06	4,09	5,71	5,52	5,22
Batang hari	3,87	4,56	4,42	4,26	3,53
Muaro jambi	4,52	5,20	5,43	5,59	5,35
Tanjabtlim	1,80	1,63	1,41	1,56	1,32
Tanjabbar	2,38	2,57	2,16	2,53	2,88
Tebo	2,00	2,90	2,95	2,83	1,38
Bungo	3,03	3,82	5,94	5,86	5,50
Kota Jambi	6,41	6,53	10,49	10,66	8,95
Kota Sungai Penuh	5,13	4,00	5,56	3,00	2,49
Provinsi Jambi	3,86	4,19	5,13	5,09	4,59

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023

Dari data yang tercantum dalam Tabel 1.4, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jambi mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jambi mencapai 3,86 persen dan meningkat menjadi 4,59 persen pada tahun 2022. Selain itu, berdasarkan data dalam tabel tersebut, terlihat bahwa Kota Jambi merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi pada tahun 2022, yakni sebesar 8,95 persen. Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang paling rendah, yaitu 1,32 persen.

Dari berbagai penjelasan di atas, terlihat bahwa hubungan antara belanja modal, tenaga kerja, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dapat memiliki hasil yang positif maupun negatif. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang pengaruh belanja modal, tenaga kerja, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan studi kasus di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, skripsi ini akan secara komprehensif menggali topik tersebut dengan judul **“Determinan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB), belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan sebelumnya, yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB), belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah terutama terhadap kajian mengenai pengaruh belanja modal, tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka terhadap PDRB di Provinsi Jambi. Belanja modal, angkatan kerja, dan pengangguran merupakan indikator makro yang kerap menjadi perhatian, sehingga diharapkan kajian ini dapat menjadi referensi baru bagi penelitian - penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi para pemaku kepentingan (*stakeholder*) terkait, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas perekonomian Provinsi Jambi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Sukirno (2010) menegaskan bahwa dalam mengevaluasi pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting yang harus diperhitungkan. Output komoditas dan jasa serta kemakmuran penduduk meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana keterlibatan ekonomi dalam suatu wilayah atau negara. Produk domestik bruto (PDB) riil serta pendapatan per kapita riil akan terus meningkat sebagai akibat langsung dari peningkatan produktivitas per kapita yang merupakan inti dari konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur secara kuantitatif dengan membandingkan kondisi perekonomian dari satu tahun ke tahun sebelumnya. Perbedaan persentase antara pendapatan nasional satu tahun dan tahun sebelumnya adalah bagaimana perubahan ini selalu dinyatakan.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan proses yang saling terkait dan saling bergantung. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi membentuk ekonomi secara bersamaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan yang mampu menimbulkan perubahan, terutama perubahan yang mempengaruhi struktur dan komposisi penduduk dan perekonomian. Penyesuaian ini dapat diatasi dengan meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memberlakukan program pemerintah lainnya yang meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sukirno, 2010). Kenaikan tenaga kerja, modal, perdagangan, dan konsumsi digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2004). Pembangunan ekonomi lebih dari sekadar percepatan pertumbuhan ekonomi dan hanya terjadi sebagai respons terhadap perubahan output produk dan jasa domestik (Kuncoro, 2010). Todaro (2003)

mengidentifikasi tiga pendorong utama ekspansi ekonomi: konsumsi modal yang terdiri dari semua investasi baru dalam tanah, barang fisik, modal, dan modal manusia; pertumbuhan populasi yang akan meningkatkan jumlah tenaga kerja di masa depan merupakan salah satu faktor yang akan berperan penting; bersama dengan inovasi dan kreativitas di tempat kerja, serta perkembangan teknologi.

Dalam situasi ini, istilah "pertumbuhan ekonomi" merujuk pada peningkatan PDB atau GNP yang melebihi atau setidaknya sebanding dengan pertumbuhan populasi atau perubahan struktur ekonomi. Meningkatnya pendapatan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan daerah tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya (Putri et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi merupakan alat yang berguna untuk menilai pembangunan ekonomi suatu negara. Kemajuan teknologi, modal, dan input tenaga kerja semuanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Dornbush, 2004). Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan pendapatan bangsa dari satu era ke era berikutnya. Jumlah kekayaan nasional yang dihasilkan melalui kemampuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi akan menentukan dapat tidaknya memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Investasi dan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang diserap, biasanya merupakan mesin utama ekspansi ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pengukuran nilai total semua produk dan layanan yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pembangunan ekonomi dan taraf hidup suatu wilayah dapat dievaluasi dengan menggunakan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil akumulasi nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah, termasuk pertanian, industri, layanan, dan sektor lainnya. Untuk mendapatkan PDRB suatu daerah, berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut dihitung dan dijumlahkan. Setiap sektor ekonomi memberikan kontribusi nilai tambah yang bersumber dari aktivitas yang mereka lakukan. Perbedaan antara nilai produk jadi dan biaya bahan baku yang digunakan dalam pembuatannya inilah yang oleh para ekonom disebut sebagai "nilai tambah".

PDRB adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan PDRB yang positif biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang sehat, sementara penurunan PDRB dapat mengindikasikan masalah ekonomi yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana PDRB dihitung dan bagaimana kontribusi dari berbagai sektor ekonomi memengaruhi angka ini sangat penting bagi perencanaan ekonomi dan pembangunan suatu wilayah atau negara. PDRB dapat dihitung untuk tingkat nasional, regional, atau provinsi, tergantung pada tingkat detail yang diinginkan. Ada dua metode yang digunakan dengan menyajikan PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku adalah sebuah indikator yang mencerminkan nilai tambah yang diberikan oleh sumber daya ekonomi dan struktur ekonomi suatu wilayah. PDRB ini dihitung dengan memperhatikan harga-harga yang berlaku pada saat perhitungan, dan digunakan untuk menilai sumber daya ekonomi dan keragaman sektor ekonomi di dalam wilayah tersebut. PDRB berdasarkan harga berlaku menjadi penting karena memungkinkan untuk memahami sejauh mana ekonomi suatu daerah berperan dalam menciptakan nilai ekonomi, serta memungkinkan analisis terhadap dinamika perubahan dalam keragaman sektor ekonomi seiring waktu. Hal ini dapat membantu pengambil keputusan untuk merencanakan strategi pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan adalah ukuran nilai tambah pada barang dan jasa yang disesuaikan dengan harga-harga pada tahun tertentu yang disebut sebagai tahun dasar perhitungan. Nilai ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya dari satu periode ke periode berikutnya, tanpa memperhitungkan fluktuasi harga. PDRB dengan harga konstan memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi karena tidak terpengaruh oleh perubahan harga. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi apakah kenaikan nilai tambah yang

teramati adalah hasil dari peningkatan produksi dan efisiensi ekonomi yang sebenarnya atau hanya akibat dari inflasi harga. Sebagai alat analisis yang penting, PDRB dengan harga konstan membantu dalam perencanaan ekonomi jangka panjang dan perbandingan kinerja ekonomi antar tahun.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melibatkan beragam metodologi termasuk metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. PDRB dihitung melalui metode produksi yang memperhitungkan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi di seluruh wilayah dalam suatu periode waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Hal ini berarti mencatat berapa nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan jasa selama periode tersebut. Selain metode produksi, PDRB juga dapat dihitung dengan pendekatan pengeluaran yang didasarkan pada pengeluaran akhir yang terjadi dalam wilayah tersebut. Pengeluaran ini mencakup berbagai komponen seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, stok perubahan, dan ekspor bersih (nilai ekspor dikurangi impor). Metode pengeluaran memberikan gambaran tentang bagaimana penduduk dan entitas ekonomi lainnya menghabiskan dan berinvestasi dalam ekonomi regional. Pendekatan ketiga, yaitu metode pendapatan menghitung PDRB dengan merujuk pada total pendapatan yang diperoleh oleh berbagai komponen produksi yang terlibat dalam proses produksi wilayah tersebut selama periode tertentu. Metode ini termasuk pendapatan seperti upah, keuntungan, bunga, dan sumber pendapatan lainnya. Metode pendapatan memberikan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya ekonomi dibagikan di antara berbagai kelompok dalam wilayah tersebut. Secara keseluruhan, PDRB adalah indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu wilayah dan penggunaan berbagai metode ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika ekonomi regional.

PDRB merupakan indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah. Data PDRB digunakan oleh pemerintah, lembaga penelitian, dan pelaku ekonomi untuk memahami struktur ekonomi wilayah, mengidentifikasi sektor yang berkembang, dan merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah tersebut. Perubahan dalam PDRB dari tahun ke tahun dapat memberikan indikasi tentang kinerja ekonomi dan tingkat perkembangan suatu wilayah. Beberapa aliran pemikiran, termasuk ekonomi Neo-Klasik, teori ekonomi Klasik, dan hipotesis Harrod-Domar, semuanya memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang topik pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pengukurannya. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik telah diajukan oleh para ahli, dan berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang teori-teori ini:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut Lincoln Arsyad (1999), Adam Smith adalah tokoh penting pertama yang meneliti perkembangan ekonomi secara mendalam. Smith menekankan dua variabel utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan output keseluruhan serta jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat diatributkan kepada tiga faktor utama yang menjadi pendorongnya. Faktor-faktor ini meliputi kekayaan sumber daya alam, tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, serta modal yang digunakan dalam proses produksi. Dalam Suparmoko (2002), Smith menyatakan bahwa spesialisasi dan pembagian kerja sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kapasitas setiap pekerja untuk berspesialisasi dalam aspek tertentu dari proses produksi menawarkan potensi untuk memperluas keahlian mereka dalam bidang keahlian tertentu, sementara pembagian kerja mengurangi waktu henti saat beralih tugas dan mendorong inovasi alat dan mesin baru yang dalam jangka panjang, akan meningkatkan kecepatan dan volume produksi. Aksesibilitas modal merupakan prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kapasitas pekerja

dapat ditingkatkan dengan spesialisasi pekerjaan, yang dapat didorong dengan memperluas modal. Kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan produksi dalam hal pendapatan per kapita. Smith percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipicu oleh peningkatan populasi atau pengembangan modal manusia.

David Ricardo pertama kali menyampaikan konsepnya dalam buku berjudul "*The Principles of Political Economy and Taxation*" yang diterbitkan pada tahun 1817 (Lincoln Arsyad, 1999). Dalam karyanya yang terkenal ini, Ricardo mengembangkan teori-teori ekonomi yang memiliki dampak yang signifikan pada pemikiran ekonomi saat itu dan bahkan hingga saat ini. Adam Smith dan Ricardo sama-sama menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi dan membuat penemuan serupa, setidaknya dalam kaitannya dengan tingkat perluasan populasi dan pertumbuhan output. Fakta bahwa keseluruhan komponen output tanah (sumber daya alam) tidak dapat diperluas pada akhirnya membatasi potensi masyarakat untuk berkembang. Menurut perkiraan Ricardo, perekonomian memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Sumber daya lahan terbatas; 2) Jumlah pekerja (penduduk) dapat bertambah atau berkurang tergantung pada apakah tingkat upah lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah upah minimum; 3) Akumulasi modal terjadi ketika pemilik modal berhasil mencapai tingkat laba yang melebihi batas laba minimum yang diperlukan untuk mengundang investor. Dalam konteks ini, laba minimum mengacu pada tingkat pengembalian yang diharapkan atau diperlukan oleh investor untuk membenarkan penanaman modal dalam suatu proyek atau usaha; 4) Kemajuan teknologi yang terus menerus; dan 5) Sektor pertanian mendominasi.

Hukum pengembalian yang semakin berkurang menyatakan bahwa ekspansi populasi (tenaga kerja) dapat menyebabkan output marjinal di area lahan yang terbatas menurun. Jumlah penduduk yang aktif mencari pekerjaan akan terus bertambah selama upah yang dibayarkan kepada buruh tani tetap

lebih besar dari upah alamiah. Sebagai akibat langsung dari hal ini, baik tingkat upah maupun produk marjinal tenaga kerja akan mengalami penurunan. Prinsip pengembalian yang menurun berlaku untuk input produksi seperti tanah dan tenaga kerja, dan itu adalah kekuatan pendorong di belakang pergerakan ekonomi yang stabil semakin dekat ke ambang upah minimum. Peran akumulasi modal dan kemajuan teknologi dapat memperlambat hukum hasil yang semakin berkurang, hal ini juga bisa menghambat proses penurunan tingkat kesejahteraan menuju tingkat kesejahteraan yang dianggap sebagai standar minimum (Lincoln Arsyad, 1999).

2. Pertumbuhan ekonomi Neo Klasik

Pada 1990-an, teori pertumbuhan baru yang dikenal sebagai teori pertumbuhan neoklasik didirikan. Pemeriksaan pertumbuhan ekonomi dari perspektif ekonomi tradisional memberikan bukti untuk anggapan ini. Ekonom seperti Robert Solow dan Trevor Swan, yang merupakan pemimpin dalam pengembangan teori, berperan penting. Menurut teori ini, laju perkembangan ekonomi suatu negara berbanding lurus dengan laju kemajuan teknologi yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan faktor-faktor produksi (populasi, akumulasi tenaga kerja, dan akumulasi modal). Robert Solow dikreditkan untuk mengembangkan Model Pertumbuhan Solow, kadang-kadang dikenal sebagai hipotesis ekspansi ekonomi. Menurut Mankiw (2000), model tersebut menggambarkan hubungan antara output total dan pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu, serta hubungan antara tingkat tabungan, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknis. Interpretasi khusus dari teori Neo-Klasik ini didasarkan pada gagasan bahwa ekonomi akan terus mempertahankan kesempatan kerja penuh dan bahwa perlengkapan modal akan selalu bekerja dengan kapasitas terbesarnya. Selama proses pembuatan, ini menjamin bahwa semua tenaga kerja manusia dan sumber daya keuangan yang tersedia digunakan semaksimal

mungkin. Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung pada faktor-faktor seperti peningkatan populasi, akumulasi modal, dan perkembangan inovasi teknologi.

Dengan menggabungkan faktor pertama yaitu lahan, dengan faktor kedua yaitu tenaga kerja, dan faktor ketiga yaitu teknologi, model Pertumbuhan Neoklasik Solow membantu mendorong ekspansi ekonomi. Namun, ketika mempertimbangkan kedua komponen input tersebut, Solow mengadopsi asumsi bahwa hasil skala adalah konstan dengan koefisien standar, sambil mempertimbangkan pengembalian yang menurun pada input tenaga kerja dan modal ketika kedua faktor ini dinilai secara independen. Untuk negara berkembang atau belum berkembang, model pertumbuhan neoklasik Solow hanya membutuhkan peningkatan akumulasi modal fisik (C), tenaga kerja (L), dan sumber daya manusia (H), selain peningkatan efisiensi alokatif dalam penggunaannya. Dalam kerangka ini, pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk mendorong perkembangan ekonomi menjadi tidak mungkin. Model fungsi produksi Cobb-Douglas adalah salah satu strategi produksi yang pertama kali dirumuskan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas, dan kemudian digunakan dalam hipotesis pertumbuhan Solow-Swan. Model pertumbuhan Solow yang juga dikenal sebagai "pertumbuhan eksogen" memanfaatkan fungsi produksi ini sebagai elemen sentral dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, fungsi produksi Cobb-Douglas menjelaskan hubungan antara input faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dengan output ekonomi. Sebagai hasil dari formulasi teori pertumbuhan Neo-Klasik Solow, baik tenaga kerja maupun modal mengalami pengembalian yang menurun (Todaro dan Smith, 2006).

Hasil perhitungan pertumbuhan ekonomi dari dua ekonom, terutama Harrod-Domar, menggunakan pendekatan yang berbeda namun menghasilkan kesimpulan yang serupa. Domar awalnya menerbitkan idenya pada tahun 1947 di *American Economic Review*, sementara Harrod melakukannya pada tahun 1939 di

Economic Journal. Kedua penulis dikreditkan dengan penemuan teori masing-masing. Teori ini melengkapi pendekatan Keynesian yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan hanya mengkaji kondisi yang ada pada ekonomi statis. Sejauh ini, Harrod-Domar telah melakukan penelitian dan analisis yang berfokus pada perluasan ekonomi dalam jangka panjang yang dikenal sebagai kondisi dinamis. Harrod-Domar menyatakan bahwa produksi modal memiliki dampak yang sangat penting terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga manajemen sumber daya finansial harus dilakukan secara cermat dan berhati-hati. Harrod-Domar memberikan gambaran tentang parameter yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jangka panjang untuk mencapai kondisi mapan atau pertumbuhan konstan. Pertumbuhan yang stabil didefinisikan sebagai pertumbuhan yang secara konsisten memanfaatkan sepenuhnya aset modal dan memungkinkan pasar untuk menyerap semua peningkatan produksi. Ekspansi output dan pendapatan nasional tidak didorong oleh peningkatan kapasitas produksi, melainkan oleh peningkatan belanja publik. Dengan menggunakan contoh seperti: 1) pembagian ekonomi menjadi dua sektor; 2) tingkat tabungan sebagai persentase dari total pendapatan negara; 3) rasio produksi terhadap kapital tetap; dan 4) mencapai kapasitas maksimal barang modal, teori Harrod dan Domar yang mempelajari masalah pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menjelaskan persyaratan yang diperlukan agar perekonomian dapat menikmati ekspansi yang konsisten sepanjang waktu (Sukirno, 2002).

Menurut Harrod-Domar pandangan ini didasarkan pada proses pasar yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah. Namun faktanya, pemerintah harus merencanakan tingkat investasinya untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan barang. Selain itu, melalui belanja modal daerah, pemerintah dapat berperan dalam pembentukan modal (investasi). Harrod-Domar berpendapat bahwa pembentukan modal diperlukan sebagai sumber tambahan stok modal bagi perekonomian untuk berkembang (Todaro, 2000). Investasi dalam pembentukan modal dianggap meningkatkan permintaan efektif atas produk di seluruh

masyarakat dan kapasitas ekonomi untuk memasok barang-barang tersebut (Sukirno, 2002). Setiap ekonomi memiliki kemampuan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan nasionalnya, sekalipun hanya untuk mengganti aset modal yang hilang atau musnah, menurut prinsip utama hipotesis Harrod-Domar (bangunan, peralatan, material). Tetapi agar ekonomi tumbuh, lebih banyak modal harus diinvestasikan.

Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut sampurno (2009) yang menegaskan bahwa seringkali terdapat dua unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia yakni pengaruh eksternal, seperti fluktuasi inflasi, jumlah cadangan devisa, kondisi sektor perbankan, melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengimplementasikannya, bersama dengan kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah, serta mengelola pertumbuhan ekspor domestik merupakan elemen-elemen utama yang memengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Faktor kedua yakni berasal dari unsur eksternal seperti prospek perekonomian dan perdagangan internasional, situasi politik dunia, UMP, jumlah penduduk dan angkatan kerja, infrastruktur, pendidikan, pertumbuhan ekonomi global dan dampak pembatasan perdagangan regional dan global.

2.1.2. Belanja Daerah

Seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama suatu periode anggaran tertentu yang menyebabkan tekanan keuangan pada daerah dan tercermin dalam penurunan total nilai kekayaan, secara keseluruhan disebut sebagai "belanja". Rencana kerja pemerintah daerah yang dinyatakan secara kuantitatif dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), umumnya dalam bentuk nilai uang. APBD merinci aliran pendapatan dan pengeluaran yang akan digunakan untuk menyediakan dana untuk upaya dan inisiatif yang berlokasi di wilayah selama periode waktu yang ditentukan untuk

anggaran. Anggaran menetapkan strategi dan kebijakan yang akan digunakan dalam mengatur untuk jangka waktu tertentu. Anggaran yang terencana dengan baik adalah alat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran seseorang. Bagi pemerintah daerah, APBD yang dituangkan dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama untuk memperkuat kemampuan dan efektivitasnya. Kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan tugas pembangunan dicirikan oleh pengelolaan keuangan APBD (Vanesha et al., 2019). Keterlibatan masyarakat dapat didorong oleh belanja daerah yang membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Dalam jangka panjang, peningkatan aktivitas ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sumbernya dan menurunkan jumlah tanggapan (Naza et al., 2020).

Anggaran daerah melayani berbagai tujuan, termasuk alat untuk menilai pendapatan dan pengeluaran, sarana yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan rencana pembangunan dapat dirumuskan, dan sistem untuk mengalokasikan sumber daya untuk menyetujui pengeluaran di masa depan, sebagai ukuran umum untuk mengevaluasi kinerja, dan sebagai metode untuk mengkoordinasikan semua operasi di berbagai sektor. Terdapat tiga kategori penerimaan dalam APBD, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Di sisi belanja, terdapat empat kategori utama, yaitu belanja tidak berkelanjutan, aparatur daerah, pelayanan publik, serta bagi hasil dan dukungan keuangan. Penyatuan semua pendapatan daerah ini bertujuan untuk mencapai tujuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengeluaran diubah sesuai dengan kategori belanja berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam konteks jenis belanja, anggaran dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung. Pengeluaran langsung mencakup biaya-biaya yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan proyek atau kegiatan tertentu. Sebaliknya, pengeluaran tidak langsung merujuk

pada biaya-biaya yang tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan proyek atau kegiatan tersebut. Dalam kategori pengeluaran tidak langsung ini termasuk berbagai jenis pengeluaran, seperti gaji dan tunjangan, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, dukungan keuangan dan dana cadangan. Sementara biaya yang diantisipasi terkait dengan implementasi aktual program dan kegiatan dikenal sebagai belanja langsung. Kategori pengeluaran langsung meliputi biaya untuk modal, produk dan jasa, dan tenaga kerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah yang disebut juga belanja daerah adalah segala komitmen keuangan daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih selama periode anggaran. Hal ini sesuai dengan definisi belanja daerah. Menurut Halim (2002), belanja daerah mencakup keseluruhan jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selama satu periode anggaran. Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, kabupaten, atau kota menjadi prioritas utama pengeluaran yang dilakukan di tingkat daerah. Hal ini berlaku baik untuk aspek wajib maupun pilihan dalam pemerintahan daerah. Berikut ini adalah dua kategori yang membentuk pengeluaran daerah:

1. Belanja Rutin

Pemerintah daerah membayar biaya untuk mendukung administrasi umum, operasi, dan pemeliharaan, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi masyarakat. Biaya ini dianggap sebagai pengeluaran rutin dan termasuk dalam kategori "pengeluaran rutin". Akibatnya, biaya yang terkait dengan operasi ini sering disebut sebagai biaya tidak langsung. Pengeluaran yang termasuk dalam kategori rutin digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari pemerintahan. Meskipun bersifat konsumtif, tindakan rutin ini memiliki peran penting dalam mempermudah administrasi pemerintahan. Pengeluaran rutin meskipun bersifat konsumtif memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian menghasilkan pembangunan melalui fasilitasi kegiatan pembangunan, penyediaan dan perbaikan *workstation*, *capacity building*, dan motivasi pegawai pemerintahan. Kemampuan untuk membangun ditingkatkan dengan pengeluaran

rutin karena mereka yang melaksanakan pembangunan juga melaksanakan tugas-tugas rutin. Keluaran kegiatan rutin ini sangat membantu untuk mendukung upaya pembangunan, dan pengeluaran untuk hal-hal rutin meningkat seiring dengan peningkatan efisiensi inisiatif pembangunan (Suparmoko, 2002). Berikut adalah contoh biaya rutin: a). Biaya administrasi umum, yang meliputi: biaya orang, biaya produk, biaya pengembangan dan biaya pemeliharaan dan b). Belanja untuk pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. Belanja Modal

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007, semua pengeluaran yang dilakukan oleh negara untuk membangun modal termasuk dalam kategori belanja modal. Pengeluaran yang berkaitan dengan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jaringan, dan infrastruktur fisik lainnya termasuk di sini. Pengadaan atau perkembangan dari aset tetap fisik yang memberikan manfaat selama lebih dari satu tahun untuk mendukung operasional pemerintahan merupakan bagian dari kategori belanja modal, sesuai dengan definisi yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Jenis belanja ini termasuk dalam belanja daerah karena mengacu pada pembelian atau pengembangan aset tersebut. Contoh dari aset tetap tersebut adalah tanah, mesin, dan bangunan, serta infrastruktur seperti jalan raya, sistem irigasi, dan jaringan infrastruktur lainnya. Pengeluaran untuk modal meliputi hal-hal berikut:

a. Belanja Publik

Pengeluaran yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pengeluaran publik merupakan jenis investasi modal yang berwujud fisik dan menghasilkan penciptaan aset daerah.

b. Belanja Aparatur

Pengeluaran yang berdampak langsung pada peralatan tetapi manfaatnya tidak langsung terlihat oleh masyarakat. Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya meningkat akibat belanja aparatur. Pengeluaran untuk peralatan diantisipasi akan

menguntungkan baik sekarang maupun di masa depan. Belanja modal antara lain dapat digunakan untuk mendanai usaha-usaha non fisik seperti: penataran, penataran pemimpin, dan proyek pembangunan mental masyarakat serta proyek fisik seperti pembangunan struktur overhead dan utilitas publik. Evaluasi pengeluaran pemerintah dapat didekati dari berbagai sudut, dan hasilnya dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) pengeluaran sebagai investasi yang memperkuat ekonomi dan mempersiapkan masa depan, (2) investasi modal yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, (3) pengeluaran sebagai penghematan untuk mengurangi pengeluaran di tahun-tahun mendatang, dan (4) pengeluaran yang menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan memperluas pasar. Teori pengeluaran di daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Hukum Adolf Wagner

Menurut Adolf Wagner, jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan jumlah kegiatan yang dilakukannya tumbuh seiring waktu. Wagner menyebut ini sebagai hukum tumbuhnya fungsi pemerintahan. Prinsip Wagner yang diakui dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa ketika pendapatan per individu dalam suatu perekonomian mengalami pertumbuhan yang signifikan, pengeluaran pemerintah juga cenderung meningkat seiringnya. Konsep ini berakar pada pengamatan nyata dari berbagai negara industri yang mencakup Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Konsep ini didasarkan pada seberapa banyak masalah sosial dan ekonomi dipengaruhi oleh pemerintah. Tetapi Wagner menyadari bahwa ketika ekonomi meningkat, begitu pula kompleksitas atau kesulitan hubungan antara industri, hubungan tenaga kerja, masyarakat, dan faktor lainnya. Hukum Wagner memiliki kekurangan karena tidak berdasarkan pada teori pemilihan barang publik yang memadai, sebaliknya argumennya didasarkan pada teori negara organik yang menganggap pemerintah sebagai entitas yang mandiri dengan kekuasaan yang tidak terbatas.

2. Teori Rostow dan Musgrave

Model Rostow dan Musgrave terkait dengan pertumbuhan dan variasi pengeluaran pemerintah. Teori ini melibatkan sudut pandang yang dikembangkan berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan ekonomi di banyak negara, meskipun tidak didasarkan pada teori khusus tertentu. Terdapat tiga tahap perkembangan ekonomi yang terpisah dalam teori ini, secara khusus tahap dasar, tahap menengah, dan tahap lanjut dari teori ini. Karena pemerintah diwajibkan untuk menyediakan infrastruktur dan layanan penting pada tahap awal pembangunan ekonomi, seperti transportasi, perawatan kesehatan, dan pendidikan, proporsi investasi pemerintah terhadap total investasi biasanya tetap cukup tinggi selama masa-masa tersebut. Masih dibutuhkan investasi dari pemerintah agar perekonomian bisa berjalan pada tahap pembangunan menengah, meskipun pada saat ini peran investasi swasta juga semakin meningkat. Musgrave menegaskan bahwa sementara investasi pemerintah sebagai persentase dari GNP diantisipasi menurun, investasi swasta sebagai persentase dari GNP meningkat. Menurut Rostow, penyediaan infrastruktur digantikan pada tingkat ekonomi berikutnya dengan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek sosial seperti bantuan lansia dan program pelayanan kesehatan masyarakat.

2.1.3. Belanja Modal

Belanja modal atau dalam arti lain pengeluaran modal adalah bagian dari anggaran yang didedikasikan untuk pembelian aset jangka panjang seperti gedung, mesin, dan komputer. Belanja modal dalam aset tetap merupakan salah satu contoh belanja daerah langsung, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi lokal dan menyebarkan kemakmuran di seluruh wilayah (Rahmadi et al., 2022). Biaya administrasi umum, termasuk biaya pemeliharaan dan sejenisnya, akan mengalami peningkatan sebagai akibat dari pengeluaran rutin seperti belanja modal, terutama dalam konteks belanja pemerintah daerah yang memiliki manfaat yang melampaui batas satu tahun anggaran (Halim, 2004). Dalam konsep yang

lebih lanjut, "belanja modal" menggambarkan proses akuisisi aset tetap atau aset lain yang memiliki jangka waktu manfaat yang melampaui satu periode akuntansi, dan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam Laporan Realisasi APBD yang merinci setiap dan semua pengeluaran yang dilakukan oleh kota dan kabupaten untuk proyek modal. Jumlah uang yang dihabiskan untuk proyek-proyek modal merupakan indikator tingkat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja modal dari anggaran, seperti yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa No. 71 Tahun 2010, untuk mendanai pembelian aset jangka panjang seperti bangunan dan mesin (Vanesha et al., 2019).

Untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat diklasifikasikan sebagai belanja modal, diperlukan pemahaman yang kuat tentang gagasan aset tetap selain jenis aset lain yang mungkin dimiliki, serta kriteria untuk mengkapitalisasi aset tetap. Berdasarkan penjelasan pada ayat 1 huruf b, pengertian belanja modal meliputi anggaran yang digunakan dalam proses pembelian aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat melebihi satu periode akuntansi. Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 memberikan landasan untuk hal tersebut dalam kerangka regulasi. Aset tetap merujuk pada barang-barang investasi modal yang dimiliki oleh daerah dan memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Sesuai dengan APBD, pendanaan untuk perluasan aset tetap berasal dari belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan prioritas anggaran dan dampak jangka panjang terhadap pelayanan publik, pemerintah daerah melakukan investasi dalam aset tetap setiap tahunnya. Dalam konteks aset tetap pemerintah daerah, belanja modal terkait dengan pembelian mesin, fasilitas, gedung, dan aset tetap lainnya. Aset tetap ini dapat diperoleh melalui tiga cara berbeda: pembangunan sendiri, pertukaran dengan aset tetap lain, atau pembelian langsung. Namun, pemerintah melakukan pembelian sebagai tindakan yang diambil.

Pengeluaran modal digunakan untuk mendukung proyek berwujud seperti pembangunan infrastruktur dan utilitas publik, serta upaya tidak berwujud seperti peningkatan pemimpin masyarakat dan proyek yang diarahkan pada pertumbuhan mental masyarakat secara keseluruhan. Ada sejumlah lensa yang dapat digunakan untuk mengkaji pengeluaran pemerintah, dan ini dapat dikelompokkan bersama sebagai berikut: (1) pengeluaran sebagai investasi yang memperkuat dan menumbuhkan ekonomi di masa depan; (2) belanja langsung yang memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada masyarakat; (3) membelanjakan sebagai biaya tabungan di masa depan; dan (4) pembelanjaan menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja dan menciptakan pasar yang lebih besar. Itulah empat alasan mengapa belanja itu penting. Konsep kerangka belanja modal adalah upaya untuk membangun modal, yang bertujuan untuk mengembangkan aset tetap atau inventaris yang akan digunakan oleh pemerintah daerah selama lebih dari satu tahun anggaran. Tujuan belanja daerah adalah untuk membeli aset tetap, yang dapat mencakup peralatan, struktur, infrastruktur, dan jenis aset tetap lainnya (Halim, 2001). Ada lima kategori untuk belanja modal, termasuk:

1. Belanja modal untuk tanah yang akan digunakan untuk tugas-tugas administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dan di dalamnya bentuk yang dapat dimanfaatkan. Pada awalnya, penilaian tanah didasarkan pada biaya yang dikeluarkan. Harga pembelian tanah, biaya yang terkait dengan pembelian hak, biaya yang terkait dengan persiapan, pengukuran, dan penimbunan, dan biaya lain yang harus dikeluarkan sebelum tanah dapat digunakan termasuk dalam biaya perolehan.
2. Belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli, mengganti, menambah, atau meningkatkan kapasitas peralatan, termasuk mesin, peralatan elektronik, dan investasi kantor yang memberikan manfaat selama lebih dari satu tahun sampai dengan peralatan dan mesin tersebut dalam keadaan baik dan siap pakai. Biaya ini dapat dipecah menjadi empat kategori: pembelian, penggantian, penambahan, dan peningkatan kapasitas.

3. Biaya yang berkaitan dengan konstruksi dan gedung meliputi semua aset yang dibeli dalam keadaan yang memungkinkan penggunaannya oleh pemerintah. Semua biaya yang dikeluarkan sebelum bangunan dan struktur digunakan termasuk dalam biaya struktur.
4. Biaya modal untuk pembangunan dan pemeliharaan pembangunan dan jaringan yang meningkatkan kapasitas hingga jalan dan sistem irigasi siap digunakan, termasuk biaya untuk pembangunan, penggantian, peningkatan, atau pemeliharaan pembangunan dan jaringan. Biaya yang digunakan untuk ini termasuk semua biaya yang dibayarkan untuk memperoleh jaringan, irigasi, dan jalan. Pengeluaran ini mencakup biaya akuisisi, biaya konstruksi, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sebelum pembangunan infrastruktur seperti jaringan, sistem irigasi, dan jalan.
5. Aset tetap lainnya merujuk pada barang-barang yang tidak termasuk dalam kategori aset tetap, tetapi dibeli, digunakan, dan disimpan dalam kondisi siap pakai untuk keperluan operasional pemerintah. Contohnya termasuk tanah, peralatan, dan struktur selain jalan raya, jaringan, dan sistem irigasi. Pengeluaran tambahan terjadi untuk memperoleh aset-aset ini. Investasi ini diharapkan dapat memiliki efek pengganda bagi ekonomi nasional Indonesia, terutama bagi daerah, baik secara keseluruhan maupun lokal.

Penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta merupakan salah satu cara belanja publik berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan publik. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan hasil dari program-program yang mendukung pembangunan ekonomi, mengurangi kesenjangan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, dan program-program yang secara khusus membantu daerah-daerah miskin. Pengeluaran oleh pemerintah mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pembelian barang dan jasa. Jumlah uang yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan program-program ini tercermin dari jumlah uang yang dikeluarkan

pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman, yang berfokus pada belanja modal, adalah salah satu yang membahas tentang belanja pemerintah. Prinsip dasarnya adalah bahwa, meskipun upaya pemerintah untuk menaikkan pengeluaran, individu tidak mau membayar lebih banyak pajak untuk mempertahankan tren ini. Penerimaan pajak naik meskipun tarif pajaknya tetap, menurut teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman perkembangan ekonomi yang pesat dapat mengakibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal ini terjadi karena pendapatan pemerintah dari pajak juga meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara cenderung diikuti oleh peningkatan pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

2.1.4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja sebagai salah satu komponen terpenting dalam seluruh perkembangan barang dan jasa, selain komponen produksi modal, teknologi, dan sumber daya alam. Istilah "tenaga kerja" mengacu pada sekelompok orang yang mengelola semua tugas yang membutuhkan mesin dan teknologi dalam proses pembuatan barang dan penyediaan jasa yang memenuhi keperluan manusia. Semua warga negara yang berusia minimal 15 tahun dan memiliki kemampuan menghasilkan produk dan jasa merupakan angkatan kerja (Hizam, 2008). Secara praktis dan tipikal, batasan usia adalah satu-satunya aspek yang membedakan antara konsep tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Namun, setiap negara memiliki kategorinya sendiri untuk menetapkan batasan usia serta jenis keadaan kerja tertentu.

Istilah "angkatan kerja" mengacu pada sekelompok orang yang dapat bekerja di lingkungan produksi dan berusia minimal 10 tahun. Orang dianggap bekerja jika telah melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan barang atau jasa, atau telah melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan uang sekurang-kurangnya satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan selama tidak mampu

menderita. menyakiti. Penduduk yang mampu dan mau bekerja termasuk dalam angkatan kerja, seperti yang didefinisikan oleh Sumarsono (2009). Secara fisik, mental, dan secara hukum mampu bertindak sesuka hati, berpartisipasi dalam pekerjaan baik secara aktif maupun pasif, dan mencari pekerjaan tanpa hambatan. Namun, definisi "angkatan kerja" tidak termasuk kelompok demografis yang berpartisipasi dalam kegiatan minggu sebelumnya, terutama bagi individu yang fokus pada kegiatan pendidikan. Perhatian terhadap tugas rumah tangga, terutama bagi mereka yang memberikan atau menawarkan bantuan secara sukarela menjadi prioritas selanjutnya.. Ketiga, mereka yang mendapatkan uang tetapi tidak bekerja, seperti pensiunan dan mereka yang menerima bunga dari deposito, dll. Orang-orang yang secara fisik tidak mampu melakukan tugas yang sama dengan kelompok sebelumnya, seperti orang lanjut usia atau orang cacat fisik.

Penduduk yang kegiatan utamanya adalah bekerja dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja. Penduduk yang kegiatan utamanya mencari pekerjaan juga dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja. Kelompok ini bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa. Seseorang yang secara aktif mencari pekerjaan adalah orang yang belum bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu sebelumnya dan menjadikan ini sebagai aktivitas utama mereka. Total statistik angkatan kerja disebut sebagai penawaran tenaga kerja dalam istilah ekonomi. Sedangkan penduduk yang berstatus bekerja atau menjadi pekerja dipandang berada di sisi permintaan. Menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja pada dasarnya dipecah menjadi banyak jenis tenaga kerja (BPS, 2009). Semua individu yang bekerja, tidak bekerja, atau sedang aktif mencari pekerjaan dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja. Kelompok orang yang diklasifikasikan sebagai tenaga kerja meliputi kategori berikut:

1) Angkatan kerja diklasifikasikan bekerja

- Orang-orang yang bekerja selama satu jam selama seminggu sebelumnya untuk pencacahan dalam upaya meningkatkan atau memperoleh penghasilan atau keuntungan.

- a. Orang-orang dalam kategori ini tidak bekerja sama sekali dalam seminggu menjelang pencacahan atau bekerja kurang dari satu jam, termasuk pegawai tetap baik di sektor publik maupun swasta, yang absen karena alasan seperti sakit, mogok, absen, atau penghentian sementara kegiatan usaha.
- b. Buruh tani menunggu hujan di ladang mereka
- c. Individu dalam pekerjaan khusus, seperti perawat, dll.

2) Kategori-kategori berikut membentuk angkatan kerja:

- a. Orang-orang yang saat ini tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan.
- b. Individu yang sedang menganggur tetapi sedang aktif mencari pekerjaan.
- c. Mereka yang telah diberhentikan dari posisinya dan sedang mencari pekerjaan.

Todaro (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan populasi semakin banyak orang yang akan dipekerjakan dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas karyawan, dan populasi yang lebih besar juga akan semakin besar pasar domestik yang akan tercipta. Yang dimaksud dengan "tenaga kerja yang diserap" adalah jumlah total orang yang jasanya dimanfaatkan oleh suatu sektor ekonomi selama jangka waktu tertentu, dapat dilihat melalui struktur penduduk berdasarkan lapangan kerja. Menurut Anggoro (2015), rendahnya pembentukan lapangan kerja di suatu daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang berkembang pesat tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja di bawah rata-rata menyebabkan pengangguran. Sejak kemerdekaannya, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Indonesia adalah masalah pengangguran, yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk diatasi dengan berbagai cara. Dalam upaya memerangi pengangguran, pemerintah sesekali menempuh berbagai rencana pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Sebuah teori tentang tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Adam Smith diakui secara luas sebagai pemain penting dalam pengembangan ekonomi klasik dan atas kontribusi yang dia buat. Mengingat teori ekonomi Adam Smith yang mapan, alokasi sumber daya manusia yang efisien dianggap sebagai faktor utama dalam kemajuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diiringi oleh akumulasi modal. Untuk menjaga kelangsungan perekonomian, perubahan fisik diperlukan. Dengan kata lain, efisiensi penggunaan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat kemajuan ekonomi (Kawet et al., 2019). Sebagai seorang ekonom klasik, Adam Smith berpendapat bahwa kekayaan suatu negara tumbuh sebanding dengan bakat tenaga kerjanya. Penciptaan tenaga kerja dan sumber daya ekonomi adalah sumber utama pendapatan. Menurut pandangan ekonomi klasik, rasio upah riil terhadap penawaran tenaga kerja dilambangkan dengan W/P . Oleh karena itu, kenaikan upah nominal tidak akan mengubah penawaran tenaga kerja jika disertai dengan tingkat harga yang sebanding. Ini karena pendapatan nominal tidak terkait langsung dengan upah riil. Ilusi uang terjadi ketika orang percaya bahwa mereka lebih kaya sebagai akibat dari kenaikan gaji nominal dan kenaikan tingkat harga. Karena mereka hanya akan mengubah pasokan tenaga kerja sebagai respons terhadap pergeseran pendapatan aktual, individu dengan pikiran rasional tidak akan tertipu oleh ilusi bahwa uang dapat membeli kebahagiaan.

Menurut teori klasik Adam Smith tentang pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tinggi. Dalam konsepnya yang berjudul *Labor Theory of Value*, nilai barang yang diproduksi meningkat ketika jumlah pekerja yang digunakan meningkat. Hal ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sebanding dengan jumlah tindakan yang diambil. Hal ini disebabkan semakin lama suatu tempat mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka produksi juga akan meningkat dan itu akan membutuhkan banyak individu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Penyerapan tenaga kerja dapat membantu menurunkan resistensi di area tertentu (Anggoro & Soesatyo, 2013). Kemakmuran suatu bangsa dinilai

dalam jumlah barang yang diproduksi, di mana proses pembuatannya membutuhkan banyak tenaga kerja. Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi seharusnya mempekerjakan lebih banyak pekerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.

2. Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Harga atau kuantitas dan permintaan saling berhubungan. Hubungan antara tingkat upah, yang dari perspektif pemberi kerja adalah biaya yang terkait dengan tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang ingin diisi oleh pemberi kerja yang disebut sebagai jumlah pekerjaan yang "dibeli" atau dikenal sebagai permintaan dalam konteks tenaga kerja. Perusahaan akan memiliki keinginan untuk mempekerjakan sebanyak mungkin pekerja yang diperlukan untuk aktivitas ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja. Permintaan akan tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat upah, besarnya angkatan kerja yang memasuki pasar, dan keterampilan pekerja. Semakin rendah upah, semakin tinggi permintaan akan tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan tenaga kerja. Sementara itu, yang dimaksud dengan "penawaran tenaga kerja" adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk diberikan pada tingkat upah yang bersaing dalam waktu yang telah ditentukan. Teori konsumen, yang memberikan dasar untuk gagasan ini menyatakan bahwa individu mencari kepuasan maksimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang mereka hadapi, baik dalam hal pendapatan maupun waktu. Orang akan ditawari untuk bekerja dalam jumlah jam tertentu untuk upah yang diinginkan dan pada tingkat harga yang diinginkan.

Jumlah total tenaga kerja yang berkontribusi terhadap perekonomian ditentukan oleh jumlah penduduk, proporsi penduduk yang bekerja, dan jumlah jam tenaga kerja bersedia bekerja. Besarnya upah pasar mempengaruhi masing-masing dari tiga bagian dari total angkatan kerja. Bagian dari populasi yang bekerja sementara juga berada dalam usia kerja memiliki pengaruh besar pada

jumlah total orang yang tersedia untuk bekerja. Ketersediaan tenaga kerja akan meningkat bila ada angkatan kerja yang lebih besar (Santoso, 2012). Dalam hal tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari upah minimum yang diperlukan, yang merupakan tingkat upah minimum untuk mencukupi kehidupan, maka populasi akan mengalami peningkatan. Orang akan menikah pada usia yang lebih tua jika tingkat upah lebih tinggi dari tingkat upah subsisten, yang akan mengakibatkan peningkatan tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian. Sebaliknya, jumlah penduduk akan menurun jika tingkat upah yang diterima lebih rendah dari tingkat upah subsisten. Tingkat daya tarik antara kekuatan penawaran dan permintaan tenaga kerja yang berlawanan, seperti yang digariskan oleh Adam Smith, adalah yang menentukan kekuatan tingkat upah. Analisis pasar tenaga kerja didasarkan pada asumsi bahwa ukuran tenaga kerja maupun tingkat keterampilan tidak akan berubah. Dua konsep yang dapat diterapkan untuk menganalisis situasi ini adalah efek substitusi dan efek pendapatan untuk menguji bagaimana perubahan tingkat upah mempengaruhi angkatan kerja. Karena efek substitusi, ketika upah berfluktuasi, biaya kesempatan waktu senggang juga berubah, membuat waktu senggang menjadi lebih mahal. Akibatnya, waktu luang berkurang dan jam kerja bertambah.

3. Teori Lewis

Ketika ada surplus tenaga kerja, ekspansi ekonomi tidak bermasalah. Dasar dari premis tersebut adalah bahwa perpindahan tenaga kerja dari sektor subsistem ke sektor kapitalis kontemporer berjalan dengan lancar dan tidak mengakibatkan kelebihan tenaga kerja, yang dalam hal ini berfungsi sebagai kapital untuk akumulasi pendapatan. Peningkatan produktivitas akan dihasilkan dari banyak pekerjaan, dan masyarakat secara keseluruhan akan segera mendapatkan keuntungan.

4. Teori Keynes

Pada kenyataannya, pasar tenaga kerja tidak berjalan sesuai dengan teori konvensional. Di mana pun ada semacam organisasi buruh, ia akan berusaha membela hak-hak karyawan terhadap pengurangan upah. Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atas kerja yang mereka lakukan, dan karena penurunan daya beli akan mengakibatkan harga dan konsumsi yang lebih rendah, kerugian gaji dianggap relatif kecil.

2.1.5. Tingkat Pengangguran

Ketika seorang anggota angkatan kerja ingin bekerja tetapi tidak dapat melakukannya, mereka dikatakan menganggur. Dalam indikator ketenagakerjaan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), orang yang dikategorikan sebagai mereka yang saat ini tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, bersiap untuk membuka usaha baru, atau telah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dianggap menganggur. Mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja juga dianggap menganggur. Setiap negara bebas mendefinisikan pengangguran dengan caranya sendiri. Masalah ekonomi makro paling serius yang berdampak langsung pada masyarakat adalah pengangguran. Setiap perekonomian hampir selalu memiliki masalah dengan pengangguran, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Perlawanan biasanya didefinisikan sebagai kemampuan tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka butuhkan dan inginkan. Orang seringkali menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan permintaan dari pasar kerja adalah faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Dengan kata lain, penolakan menggambarkan keadaan atau situasi di mana seseorang menghadapi kelangkaan alternatif pekerjaan.

Akibatnya, beberapa pencari kerja yang menawarkan jasa mereka direkrut, sementara beberapa gagal atau tidak dapat memperoleh pekerjaan dan dapat diklasifikasikan sebagai pengangguran. Ukuran angkatan kerja untuk ekonomi

tertentu ditentukan oleh tingkat partisipasi angkatan kerja untuk populasi umum sebagai proporsi dari beban untuk kelompok umur tersebut. Pertambahan jumlah penduduk akan berdampak signifikan pada perluasan angkatan kerja. Semakin banyak orang memasuki usia kerja, niscaya angkatan kerja akan bertambah. Ada beberapa penyebab terjadinya pengangguran yang dapat dikaitkan dengan unsur-unsur penyebab, antara lain sebagai berikut:

- a. Seperti namanya, pengangguran friksional adalah pengangguran yang dibawa oleh tenaga kerja lini kedua. Putusnya komunikasi antara pelaksana pekerjaan dan atasan, serta kurangnya informasi dan waktu menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran sementara ini. Pengangguran friksional adalah hasil dari ketidaksesuaian antara peran yang tersedia dan tenaga kerja, serta ketidakbahagiaan karyawan dengan kondisi kerja dan keinginan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi.
- b. Pengangguran struktural yang merupakan bentuk pengangguran yang paling fundamental, terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan antara jumlah orang yang mencari pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia di pasar tenaga kerja. Masalah jangka panjang seperti pengangguran struktural disebabkan oleh modifikasi struktur dan pola ekonomi, termasuk reformasi pemerintahan dan kemajuan teknologi.
- c. Pengangguran konjungtur, di sisi lain, menganggur karena penurunan permintaan. Pengangguran ini terjadi ketika perusahaan mengalami penurunan permintaan akan produk atau layanannya, yang menyebabkannya membatasi output dan memberhentikan karyawan. Akibatnya, sektor industri mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja.
- d. Pengangguran teknologi didefinisikan sebagai pengangguran yang dihasilkan dari penggunaan berbagai alat teknologi yang lebih maju. Contohnya, sebelum penggilingan padi ditemukan orang memiliki kesempatan untuk bekerja sebagai penumbuk padi. Namun, setelah mesin penggilingan padi ditemukan,

situasi berubah, tentunya tenaga manusia digantikan oleh mesin yang bekerja lebih cepat sehingga menyebabkan pengangguran.

- e. Ada jenis pengangguran yang dikenal sebagai pengangguran musiman yang hanya terwujud pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, umumnya saat awal musim yang baru. Pengangguran semacam ini hanya efektif pada waktu-waktu tertentu dalam setahun.

Kemudian, berdasarkan kriteria tersebut pengangguran dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain:

1. Pengangguran Terbuka

Orang yang menganggur secara terbuka adalah mereka yang sebenarnya tidak bekerja. Seseorang yang dalam usia kerja, mampu dan bersemangat untuk bekerja, dan aktif mencari pekerjaan. Ada banyak orang yang termasuk dalam kategori pengangguran ini bahkan setelah melakukan segala upaya untuk mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, ada lebih sedikit posisi terbuka daripada jumlah pekerja.

2. Setengah Menganggur

Setengah menganggur merujuk pada individu yang bekerja baik sebagai karyawan maupun wiraswasta, namun dihadapkan pada keharusan bekerja dalam skala yang lebih sedikit dari biasanya untuk jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, mereka tetap aktif mencari pekerjaan tambahan atau berupaya mencari pekerjaan baru. Kelompok tenaga kerja ini sering terdiri dari individu yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

3. Pengangguran Tersembunyi

Istilah "pengangguran tersembunyi" mengacu pada orang-orang yang bekerja secara teknis tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan karena berbagai alasan. Karena ada lebih banyak pekerja, kemungkinan proses industri menjadi kurang efisien, yang dapat menyebabkan pengangguran. Pengangguran tersembunyi didefinisikan sebagai penggunaan tenaga kerja yang berlebihan.

Beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan fenomena pengangguran, teori tersebut yaitu :

1. Teori Klasik

Menurut kebijaksanaan konvensional, pengangguran dapat dicegah dengan menggunakan mekanisme sisi penawaran dan harga di pasar terbuka untuk memastikan bahwa semua penawaran dipenuhi oleh semua permintaan yang tersedia. Oleh karena itu, jika terdapat kelebihan tenaga kerja, maka upah akan mengalami penurunan sehingga akan menurunkan produktivitas perusahaan menurut Teori Klasik. Potensi perusahaan untuk meningkatkan produksi karena harga yang murah akan mendorong kenaikan permintaan energi. Oleh karena itu, angkatan kerja yang meningkat dapat menyerap tenaga kerja tambahan di pasar jika harga cukup stabil.

2. Hukum Okun's Law

Arthur Okun (1929-1979), sebagai salah satu perancang inisiatif pasca perang yang inovatif telah berkontribusi pemahaman tentang pengaturan bisnis dan pelacakan pembangunan di Amerika Serikat. Okun dikreditkan dengan pengembangan gagasan output potensial dan penemuan hubungan antara output dan pengangguran. Hubungan ini yang dikenal sebagai Hukum Okun, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran cenderung mengikuti siklus bisnis dan pergerakan output (Astuti, 2016). Okun memaparkan dua korelasi empiris antara tingkat pengangguran dan output riil dalam artikelnya pada tahun 1962. Sejak itu, pertimbangan praktis didasarkan pada dua persamaan langsung yang diturunkan oleh Okun. Asal usul kedua korelasi Okun ini terlihat di kenyataan bahwa peningkatan produksi dan layanan dalam perekonomian membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Okun menyederhanakan penelitiannya dengan mengandaikan bahwa tingkat pengangguran dapat berfungsi sebagai *stand-in* yang cocok untuk jumlah total orang yang bekerja dalam perekonomian (Iswanto, 2013).

Menurut hukum Okun, ada korelasi terbalik antara tingkat pengangguran dan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Menurut hukum ini, jika PDB aktual turun 2% dibandingkan dengan PDB potensial, tingkat pengangguran akan naik sekitar 1% (Kawet et al., 2019). Sebagai contoh, tingkat pengangguran akan meningkat dari 6% menjadi 7% jika PDB awal adalah 100% dari potensi dan kemudian turun menjadi 98% dari potensi (Darman, 2013). PDB riil diukur dengan memperhitungkan inflasi, fluktuasi harga, dan perubahan tingkat pengangguran rata-rata menggunakan kurva Phillips. Hukum Okun menggambarkan hubungan penting antara output ekonomi dan pasar tenaga kerja, serta mengaitkan pergerakan jangka pendek dalam PDB dengan variasi tingkat pengangguran.

Hukum Okun menggunakan model sederhana yang menghubungkan perbedaan tingkat pengangguran awal (U) dengan persentase perubahan output ($\Delta Y/Y$). Hubungan pertama dari Hukum Okun menjelaskan bagaimana tingkat pengangguran bergeser dari satu triwulan ke triwulan yang lain bervariasi dalam kaitannya dengan PDB riil. Okun menemukan adanya korelasi yang sejalan antara peningkatan PDB dan pergeseran pengangguran, begitulah cara kerjanya peningkatan PDB berkorelasi dengan perubahan tingkat pengangguran. Ini dikenal sebagai versi perbedaan dari Hukum Okun, yang menghilangkan beberapa variabel signifikan dari persamaan dalam versi yang berbeda dari Hukum Okun. Hal ini sebagian didasarkan pada rekomendasi yang dibuat oleh sejumlah besar ekonom untuk memanfaatkan adaptasi dinamis dari Hukum Okun. Pertumbuhan PDB riil, pertumbuhan PDB riil sebelumnya, dan perubahan tingkat pengangguran semuanya akan dimasukkan sebagai variabel di sisi kanan persamaan dalam bentuk umum Hukum Okun jika ditulis dalam bentuk dinamis. Di sisi kiri persamaan, variabel ini akan menjelaskan mengapa terdapat kisaran yang begitu besar pada tingkat pengangguran saat ini (Astari et al., 2019) :

3. Teori Keynes

Menurut teori Keynesian, bertentangan dengan asumsi teori klasik,

masalah pengangguran sebenarnya didorong oleh kurangnya permintaan agregat, dan konsumsi yang rendah, bukan produksi yang buruk, yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa sistem pasar bebas tidak cukup untuk mengatasi hal ini. Upah akan menurun seiring bertambahnya angkatan kerja. Karena konsumen akan memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan akibat penurunan gaji, itu tidak akan menguntungkan dan tidak akan menguntungkan. Keynes mendesak keterlibatan pemerintah dalam mempertahankan permintaan agregat pada tingkat tertentu sehingga sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja.

4. Teori Malthus

Hipotesis Malthus menjelaskan mengapa peningkatan ketersediaan pangan seringkali melebihi pertumbuhan populasi. Seperti tumbuhan dan hewan, manusia juga memiliki naluri yang kuat untuk berkembang biak, menurut Malthus. Oleh karena itu populasi akan terus tumbuh tanpa batas waktu jika pertumbuhan populasi tidak terkendali. Menurut tesis Malthus, populasi suatu bangsa adalah masalah yang berat karena setiap warga negara cenderung terus bertambah jumlahnya sesuai dengan perkembangan geometris, sedangkan sumber daya dan faktor produksi lainnya tetap sama atau bahkan menurun. Dalam budaya saat ini, lebih banyak pekerja diharapkan dihasilkan seiring pertumbuhan populasi, namun jumlah pekerjaan yang tersedia tidak dapat mengimbangnya. Karena pilihan pekerjaan yang terbatas, orang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan posisi, dan mereka yang dikecualikan termasuk dalam kategori pengangguran.

Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator kunci kemajuan masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih besar. Agar suatu komunitas dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan primernya, pendapatan masyarakatnya harus meningkat (Amanda et al., 2021). Ketika masyarakat meningkatkan kemampuannya untuk menyediakan kebutuhan paling dasar, secara bertahap akan melihat lebih sedikit masyarakatnya yang jatuh ke dalam kemiskinan. Untuk

mengentaskan kemiskinan, pertama-tama perlu dibentuk daerah yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan, kemudian dikembangkan daerah yang dapat menghasilkan keadilan dalam segala aspek, termasuk pengangguran.

2.2. Keterkaitan Antar Variabel

2.2.1. Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses pengembangan ekonomi suatu negara atau wilayah administratif. Persaingan ekonomi sangat penting untuk proses pertumbuhan ekonomi karena mengarah pada keputusan alokasi sumber daya yang menciptakan jumlah barang dan jasa terbesar dari sumber daya ekonomi sementara juga memungkinkan pertukaran barang dan uang secara sukarela. Namun, sebenarnya ekonomi modern tidak dapat menggunakan prosedur pasar secara bebas dan efisien. Meskipun demikian, pasar tidak selalu ada dalam bentuk idealnya karena aktivitas kolusi dan monopoli sering terjadi dalam ekonomi pasar dan menghasilkan eksternalitas. Pemerintah harus berperan dalam posisi ini sebagai mediator, regulator, serta mekanisme pengawasan pasar.

Pandangan Keynesian berpendapat bahwa belanja pemerintah (untuk hal-hal seperti infrastruktur) dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pendekatan Keynesian yang memuji pengeluaran pemerintah dengan meningkatkan PDB, model Neo-Klasik berpendapat bahwa efek ini tidak ada. Namun, sejumlah besar penelitian baru-baru ini menunjukkan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam kegagalan pasar yang disebabkan oleh inefisiensi dapat dikurangi dengan bantuan kebijakan fiskal, memberikan kepercayaan pada sudut pandang Keynesian. Pengeluaran pemerintah memberikan ukuran kuantitatif dari ruang lingkup kegiatan yang didukung oleh penerimaan pajak. Besarnya pengeluaran pemerintah meningkat seiring dengan besarnya dan banyaknya kegiatan pemerintah. Menurut teori ekonomi

makro, pengeluaran pemerintah dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

- a. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berbagai barang dan jasa.
- b. Kompensasi untuk pegawai pemerintah. Penyesuaian kompensasi karyawan berdampak pada proses ekonomi makro, di mana secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat permin
- c. Pengeluaran pembayaran transfer oleh pemerintah. Tidak seperti pembayaran tercatat atau bantuan langsung kepada warga negara, pembayaran transfer termasuk di dalamnya adalah subsidi pemerintah, pembayaran pensiun, bantuan keuangan langsung yang diberikan ke berbagai bagian masyarakat, dan pembayaran bunga yang wajib dilakukan pemerintah atas pinjaman yang diberikan kepada masyarakat umum adalah contoh pengeluaran pemerintah. Efek ekonomi dari pembayaran transfer sama dengan efek pembayaran upah kepada seorang karyawan.

Terdapat korelasi yang substansial antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk belanja modal. Pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, bisnis, atau orang pribadi untuk tujuan memperoleh atau meningkatkan aset modal, seperti mesin, peralatan, bangunan, atau infrastruktur. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sisi lain, adalah metrik yang digunakan untuk menilai seluruh nilai produk dan layanan yang dihasilkan di suatu wilayah selama jangka waktu tertentu. Belanja modal yang tinggi cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan investasi dalam aset modal, wilayah tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, dan produktivitas. Hal ini berpotensi meningkatkan PDRB karena peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap produksi dan pendapatan. Selain itu, Belanja modal yang dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur atau memperluas kapasitas produksi dapat secara langsung meningkatkan produksi barang dan

jasa di suatu wilayah. Misalnya, investasi dalam pembangunan pabrik atau pembangunan jalan raya baru dapat meningkatkan kemampuan wilayah tersebut dalam menghasilkan barang dan mengakses pasar yang lebih luas.

Belanja modal juga dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong inovasi. Sebagai contoh, kualifikasi tenaga kerja dapat ditingkatkan dengan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan, yang pada gilirannya mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Inovasi juga dapat muncul sebagai hasil dari investasi dalam riset dan pengembangan, yang berpotensi meningkatkan daya saing wilayah tersebut dalam pasar. Belanja modal memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi wilayah. Ketika belanja modal meningkat, itu menghasilkan pengeluaran tambahan dalam ekonomi lokal. Pengeluaran tambahan ini dapat memicu permintaan yang lebih besar terhadap menuju barang dan jasa lokal, yang berpotensi meningkatkan pendapatan akibat pergeseran tersebut dan produksi di berbagai sektor ekonomi. Dalam jangka panjang, ini dapat berkontribusi pada peningkatan PDRB wilayah tersebut.

2.2.2. Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Sepanjang perjalanan sejarah, peningkatan jumlah penduduk yang secara aktif berpartisipasi dalam angkatan kerja dipandang sebagai faktor yang baik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di sektor manufaktur, sebagaimana dinyatakan oleh Todaro dan Smith (2006). Peningkatan output dan ukuran ekonomi domestik adalah hasil dari peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Juga ditegaskan bahwa apakah peningkatan populasi memiliki efek positif atau negatif tergantung pada kapasitas sistem ekonomi regional untuk mengakomodasi peningkatan tenaga kerja dan memanfaatkannya secara efektif. Terkadang, peningkatan populasi dapat membantu atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan populasi akan menghasilkan lebih banyak pekerja yang

akan memungkinkan peningkatan output negara. Selain itu, ketersediaan pendidikan menyebabkan peningkatan keahlian penduduk dan tingkat keterampilan. Hal ini akan berakibat pada peningkatan produktivitas, yang akan sebagai konsekuensinya menghasilkan pertumbuhan output yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan jumlah pekerja. Menurut Keynes, pengangguran selalu dianggap ada dalam perekonomian karena pengeluaran agregat lebih tinggi daripada jumlah yang benar-benar dapat dihasilkan oleh komponen produksi perekonomian dalam hal produk dan jasa. Pemerintah harus berkonsentrasi untuk menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan komponen produksi yang tersedia untuk mencapai pengurangan biaya. Isu pengangguran menjadi perhatian negara-negara berkembang, terutama di Indonesia, ini terkait erat dengan tingkat pertumbuhan populasi.

Jumlah tenaga kerja memiliki hubungan yang erat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Tenaga kerja merujuk pada jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan produksi di wilayah tersebut. Sementara itu, PDRB merupakan indikator yang mengukur nilai total produk dan layanan yang dikembangkan di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Adanya jumlah tenaga kerja yang lebih besar umumnya berkontribusi pada peningkatan produksi. Daerah memiliki kapasitas untuk menciptakan jumlah barang dan jasa yang lebih besar sebagai akibat dari peningkatan ketersediaan tenaga kerja. Selain itu, keberadaan tenaga kerja yang terlatih dan terampil berpotensi mendorong produktivitas dan efisiensi produksi yang pada gilirannya berdampak positif terhadap PDRB. Selain itu, memiliki tenaga kerja yang besar serta pendapatan yang stabil cenderung menyebabkan peningkatan jumlah uang yang dibelanjakan oleh rumah tangga. Konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi dapat mendorong permintaan domestik untuk barang dan jasa di wilayah tersebut. Hal ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terkait, seperti perdagangan, jasa, dan industri pengolahan.

Penambahan jumlah tenaga kerja yang sejalan dengan pertumbuhan populasi dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain jumlahnya, kualitas tenaga kerja juga berperan penting dalam hubungan dengan PDRB. Apabila tenaga kerja memiliki keterampilan dan keahlian yang relevan dengan permintaan pasar, hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah tersebut. Jika tenaga kerja tersedia dan terampil, wilayah tersebut dapat menyerap lebih banyak investasi dan memperluas sektor-sektor ekonomi yang ada. Karena peningkatan nilai output total, peningkatan pertumbuhan ekonomi biasanya berdampak positif pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini karena PDRB mengukur nilai produksi secara keseluruhan. Suatu wilayah dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan teknologi jika tersedia jumlah tenaga kerja yang cukup dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Inovasi dan efisiensi yang ditingkatkan dapat meningkatkan produktivitas total faktor produksi dan kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB.

2.2.3. Tingkat Pengangguran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial yang tidak memadai. Menurut Keynes, kenaikan permintaan agregat dapat digunakan untuk memerangi pengangguran. Kinerja sektor ekonomi akan terdorong untuk meningkatkan output seiring dengan meningkatnya permintaan. Teori Keynes menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran saling terkait. Setiap negara memiliki aspirasi besar terkait peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara tahunan menjadi indikator yang positif dalam mengevaluasi kinerja perekonomian suatu negara. Sebagai tolok ukur kinerja perekonomian suatu negara, peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengatasi sejumlah masalah pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, penutupan kesenjangan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja.

Efisiensi peluang kerja mengacu pada penyediaan kesempatan kerja yang cocok dengan kebutuhan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat penganggurannya, dan hubungan ini memiliki korelasi yang signifikan. Individu yang saat ini tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan dianggap menganggur. Kapasitas penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam perluasan ekonomi suatu negara. Lebih banyak orang dapat menemukan pekerjaan sebagai hasil dari ekonomi yang lebih kuat. Ekspansi penduduk dipandang berkontribusi berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam lingkup yang lebih luas. Sebagai hasil dari tenaga kerja yang lebih besar dan populasi yang lebih besar, baik tingkat output maupun ukuran pasar domestik secara alami akan berkembang. Apakah populasi besar memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada seberapa baik ekonomi mampu menyerap dan memanfaatkan tenaga kerja tambahan.

Tingkat pengangguran yang tinggi cenderung menghambat produksi ekonomi wilayah. Ketika banyak individu tidak bekerja, potensi produksi dan kapasitas ekonomi wilayah tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan PDRB karena menunjukkan bahwa sumber daya tidak digunakan secara efisien. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengurangi daya beli konsumen dan permintaan domestik. Individu yang mengalami pengangguran cenderung menghadapi keterbatasan keuangan dan mengurangi konsumsi mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada sektor-sektor ekonomi terkait, seperti ritel, makanan, dan jasa. Penurunan konsumsi dan permintaan dapat mempengaruhi PDRB wilayah tersebut secara keseluruhan. Pengangguran yang tinggi berarti lebih sedikit pendapatan yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Hal ini dapat mengurangi kemampuan individu dan rumah tangga untuk menginvestasikan dan mengeluarkan uang mereka dalam ekonomi lokal. Pengurangan investasi dan pengeluaran dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan PDRB wilayah tersebut. Kemudian, tingkat

pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan ketersediaan keterampilan yang relevan. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mungkin tidak dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia. Penyelarasan antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat berdampak negatif pada tingkat kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan stabilitas sosial. Kurangnya lapangan kerja dan penghasilan yang rendah dapat memperburuk kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi PDRB wilayah tersebut.

2.3. Penelitian Terdahulu

Para peneliti berusaha untuk membandingkan penelitian sebelumnya guna mendapatkan ide-ide baru untuk studi mereka. Selanjutnya, posisi dan orisinalitas studi baru sering dibantu oleh penelitian sebelumnya. Dalam tulisannya, penulis kajian ini mengacu pada sejumlah kajian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah pilihan dari penelitian sebelumnya yang menjadi sumber bagi penulis artikel ini:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Lubis (2014)	Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerjaan Dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Data panel dengan model Regresi Fixed effect	Hubungan antara jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah pada pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia telah terbukti secara positif dan signifikan antara tahun 2006 dan 2012 pada tingkat signifikansi 5%.

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
2.	Wahyudi & Yuliarmi (2021)	Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan	Analisis Path	Ada tiga kesimpulan utama yang dapat diambil dari hasil penelitian ini. Pertama, jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, variabel PMDN tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga, jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan antara jumlah tenaga kerja dan tingkat kemiskinan. Variabel PMDN memiliki pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel PMDN tidak memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Dan terakhir, variabel PMDN juga tidak memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.
3.	Yunus & Amirullah (2019)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi positif oleh belanja modal, tetapi dampaknya relatif lemah. Hasil penelitian lebih

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		(Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh)		lanjut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis koefisien determinasi (R ²) menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan daerah dapat menjelaskan sekitar 37,6% dari variasi pertumbuhan ekonomi, sementara 62,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.
4.	Aryanto & Handaka (2017)	Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Indonesia	Regresi linier, data panel	Hasil menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima pada tingkat signifikansi 0,05. Telah ditetapkan bahwa semua faktor eksogen secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi.
5.	Yanti et al. (2020)	Investasi Modal Manusia Bidang Pendidikan: Dampak Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/ Kota di	Regresi data panel	Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa investasi pada modal manusia berdampak negatif terhadap pengangguran sementara secara positif memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pembiayaan pendidikan dari APBD

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Sumatera Baratt		telah terbukti memberikan beberapa dampak baik, antara lain menurunkan angka pengangguran dengan membuat angkatan kerja lebih kompetitif dan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terdidik, serta mendorong tren positif pertumbuhan ekonomi daerah, bupati dan kota-kota di Sumbar harus merencanakan dengan matang investasi belanja modal manusia di sektor pendidikan.
6.	Fitri (2020)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kampar	Analisis regresi berganda	Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa pengeluaran publik memiliki dampak yang signifikan dan menguntungkan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks Kabupaten Kampar, laju pertumbuhan ekonomi selama ini tidak terlalu terpengaruh oleh tenaga kerja.
7.	Suandi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan	Uji statisti regresi linier berganda dan asumsi klasik.	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh nilai koefisien -0,011 dan tingkat signifikansi 0,961 yang lebih besar atau

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				sama dengan 0,05. Selain itu, tidak ada korelasi yang signifikan antara Dana Alokasi Umum dan pertumbuhan PDB, dengan koefisien 0,913 yang memiliki tingkat signifikansi 0,05. Namun, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Dana Alokasi Khusus dan pertumbuhan PDB, dengan koefisien sebesar 0,702 dan tingkat signifikansi 0,024 yang lebih kecil dari 0,05.
8.	Ifani (2021)	Analisis Pengaruh Belanja Modal, Investasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019	Analisis Regresi Data Panel	Di Pulau Sumatera, semua faktor secara simultan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi antara tahun 2015 dan 2019. Di Pulau Sumatera, antara tahun 2015 dan 2019, investasi dan jumlah penduduk berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU dan belanja modal memiliki pengaruh yang besar. dampak minimal.
9.	Kurniawati & Muzdalifah (2022)	Pengaruh PAD dan DAU Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada	Model Persamaan Simultan dengan bantuan Eviews 10 metode Two-Stage	Dalam tahap awal dengan desain yang ideal, temuan dari model fixed effect menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018)	Least Square (TSLS).	pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Namun, secara parsial, hanya DAU yang memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD tidak memiliki dampak yang signifikan. Selanjutnya, dalam tahap kedua menggunakan model random effect terbaik, penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan belanja modal prediktif secara bersamaan dan parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
10.	Rahmatullah et al. (2022)	Pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar	Regresi Linear Berganda	Dampak hubungan antara tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar positif namun kecil, sedangkan belanja modal berdampak positif dan besar. Inflasi sedikit tetapi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Makassar.
11.	Oluwatobi & Olurinola (2011)	Government Expenditure on Human Capital Development: Implications for Economic Growth in Nigeria	Model Pertumbuhan solow	Temuan menunjukkan bahwa belanja rutin pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia dan tingkat output riil berkorelasi positif, tetapi belanja modal berkorelasi terbalik dengan tingkat output riil. Dalam rangka

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				mendorong pertumbuhan ekonomi, kajian ini menyarankan agar belanja modal negara untuk kesehatan dan pendidikan didistribusikan dengan baik.
12.	Kolawole & Odubunmi (2015)	Government Capital Expenditure, Foreign Direct Investment, and Economic Growth Relationship in Nigeria	Ordinary Least Square (OLS), Kointegrasi dan Kausalitas Granger	Karena diketahui adanya kausalitas satu arah antara pertumbuhan dan FDI, temuan analisis menunjukkan bahwa investasi modal pemerintah dan pertumbuhan Granger saling menguatkan. Hubungan antara belanja modal pemerintah dan FDI memang memiliki komponen kausalitas Granger. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa belanja modal oleh pemerintah secara signifikan mendorong ekspansi ekonomi.

2.4. Kerangka Pemikiran

Tujuan belanja modal yang dilakukan pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana, baik untuk kegiatan pemerintahan yang efektif maupun untuk fasilitas umum seperti tanah, bangunan, mesin, serta aset tetap seperti jalan dan sistem irigasi. Peningkatan belanja modal yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berdampak pada terciptanya peluang investasi baru di daerah, yang akan meningkatkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya di sektor manufaktur. Akibatnya, ini akan mendorong perluasan ekonomi daerah yang lebih besar. Kebijakan pemerintah

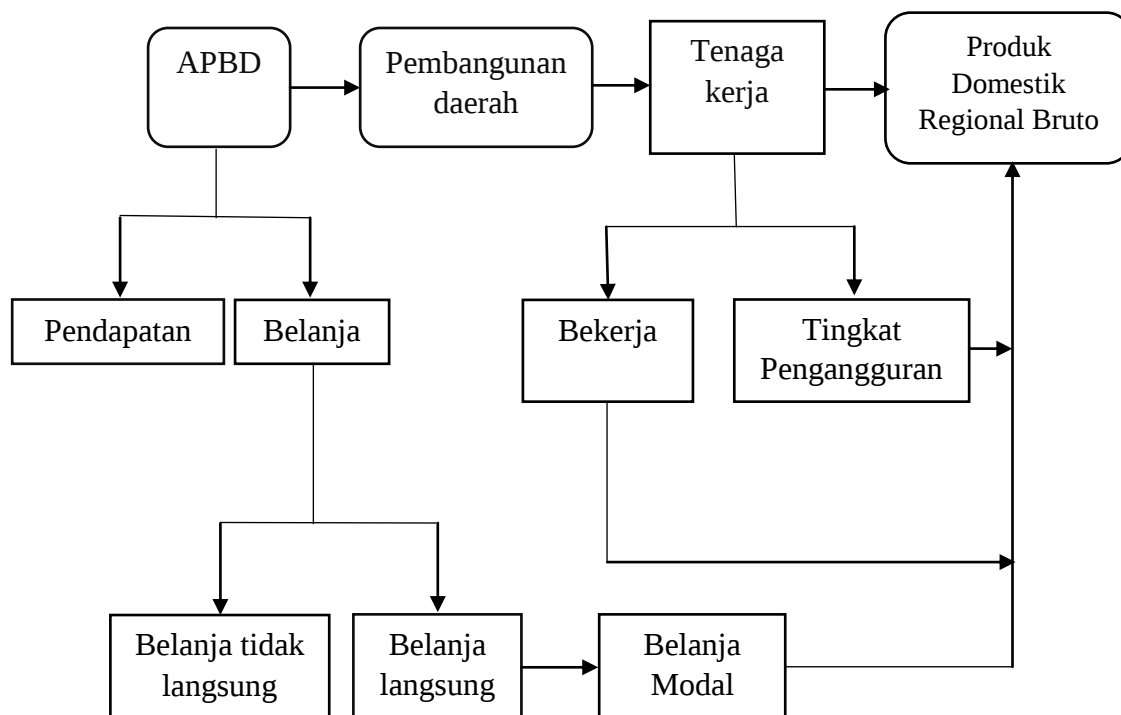
yang mendukung investasi, seperti insentif fiskal, deregulasi, dan stabilitas kebijakan, dapat mendorong belanja modal. Peraturan yang ramah investasi dan lingkungan bisnis yang kondusif memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan investasi dalam pengembangan dan ekspansi usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PDRB. Kondisi ekonomi makro yang stabil, termasuk tingkat suku bunga yang rendah, inflasi terkendali, dan kestabilan politik, juga dapat mempengaruhi belanja modal. Suku bunga yang rendah dapat memotivasi orang untuk mengambil pinjaman guna melakukan investasi, sementara inflasi yang terkendali memberikan kepastian harga dan stabilitas harga bagi perusahaan. Ketersediaan modal dan akses terhadap sumber daya finansial juga berperan penting dalam mempengaruhi belanja modal. Keberlanjutan pasar keuangan, ketersediaan kredit, dan kemudahan akses terhadap modal usaha dapat mendorong perusahaan untuk berinvestasi dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Adanya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar sangat penting dalam meningkatkan PDRB selain investasi modal. Perekonomian dapat meningkat jika sumber daya manusia dan tenaga kerjanya berkualitas tinggi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan produktivitas dan pendapatan. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang relevan dan tingkat keahlian yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi, yang berdampak positif pada peningkatan output dan PDRB. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Kebijakan ketenagakerjaan yang tepat juga berperan dalam menentukan ketersediaan tenaga kerja. Kebijakan yang mendorong fleksibilitas di pasar tenaga kerja, perlindungan sosial, dan mobilitas tenaga kerja yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perluasan kesempatan kerja dan peningkatan partisipasi tenaga kerja, yang pada gilirannya berdampak pada PDRB.

Dikarenakan kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan negara sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau upah. Diperlukan kepastian akan tersedianya kesempatan kerja agar individu dapat memperoleh penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, hal ini bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Salah satu unsur produksi adalah tenaga kerja. Tingkat produktivitas juga dapat meningkat jika kualitas tenaga kerja meningkat. Nantinya, barang-barang tersebut dapat ditawarkan untuk dijual kepada masyarakat umum atau diekspor sehingga meningkatkan pendapatan pemerintah. Setiap negara memiliki masalah pengangguran secara historis yang terbukti menantang untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, yang akan menghasilkan adanya peningkatan jumlah pencari kerja dan populasi tenaga kerja yang lebih besar. Tingkat pengangguran terbuka cenderung berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi stagnan atau negatif, tingkat pengangguran cenderung meningkat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan, seperti fleksibilitas pasar tenaga kerja, perlindungan sosial, dan kebijakan migrasi tenaga kerja, juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan akses terhadap pekerjaan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Peningkatan belanja modal dan kualifikasi tenaga kerja yang baik cenderung berdampak positif pada PDRB. Belanja modal yang lebih tinggi dapat meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, dan produktivitas, sedangkan tenaga kerja yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja sektor-sektor ekonomi. Dalam penelitian ini akan dibahas hubungan antara investasi modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran. Tiga variabel independen yakni, Belanja Modal, Jumlah Tenaga Kerja dan Tingkat Pengangguran digunakan dalam penelitian ini untuk memfasilitasi kegiatan penelitian, memperoleh garis penyelidikan untuk penelitian yang akan dilakukan, dan memperjelas garis

penyelidikan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jambi. Berikut ini merupakan kerangka konseptual penelitian:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini menyajikan solusi yang cepat untuk masalah penelitian yang memerlukan investigasi empiris. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa variabel belanja modal, jumlah tenaga kerja, dan tingkat pengangguran memiliki dampak yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Hipotesis ini didasarkan pada landasan teoritis dan kerangka berpikir yang kuat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan jenis dan sumber informasi. Data sekunder berasal dari sumber yang sudah pernah digunakan untuk penelitian. Informasi ini digunakan untuk mendukung informasi yang terdapat pada buku, artikel, buku perpustakaan, penelitian terdahulu, dan tempat lainnya. Penelitian ini menggunakan informasi dari buku, majalah, dan situs web yang terkait dengan publikasi penelitian. Untuk penelitian ini, data sekunder dikumpulkan, dan tinjauan literatur juga dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Langkah pertama dalam mengumpulkan data adalah melakukan kajian literatur. Tujuan studi literatur adalah untuk mencari data dan informasi yang dapat membantu dalam penulisan dokumen tertulis, media visual, dan rekaman elektronik. Ini merujuk pada sumber-sumber informasi yang relevan dengan penelitian, termasuk tetapi tidak terbatas pada buku, jurnal ilmiah, majalah, dan referensi lainnya.

3.1.2. Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam investigasi ini berasal dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK Kementerian Keuangan), serta jurnal ilmiah terkait. Informasi yang dikumpulkan meliputi statistik ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran, serta informasi produk domestik regional bruto, belanja modal, dan ketenagakerjaan. Semua data tersebut telah disesuaikan untuk studi ini dan mencakup rentang waktu dari tahun 2015 hingga 2021. Studi ini fokus pada wilayah Provinsi Jambi.

3.2. Metode Analisis Data

Teknik penelitian adalah strategi metodologis untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan secara sistematis. Untuk tujuan penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik analitik deskriptif kuantitatif. Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, serta penyajian dan hasil, semuanya adalah bagian dari pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan penjelasan objektif tentang suatu situasi melalui penggunaan angka. Untuk menjelaskan atau memberikan gambaran tentang pokok bahasan yang diteliti, pendekatan analisis deskriptif digunakan dengan memanfaatkan data atau sampel yang telah terkumpul dalam keadaan alamiahnya. Metode ini tidak melibatkan analisis tambahan atau kesimpulan luas. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, peneliti berusaha memberikan penjelasan yang jelas dan berdasarkan temuan penyelidikan. Tujuan dilakukannya analisis dengan pendekatan deskriptif adalah untuk menghasilkan rangkuman dari situasi atau peristiwa yang sedang diamati.

Sedangkan penelitian kuantitatif digunakan dalam pengaturan teknik deduktif-induktif. Pendekatan ini dimulai dengan landasan teori, sudut pandang seorang ahli, dan pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya sebelumnya. Kemudian, masalah penelitian diidentifikasi dan solusi-solusi diajukan untuk memperoleh justifikasi atau evaluasi yang didukung oleh data empiris yang dikumpulkan di lapangan. Penelitian ini disebut sebagai analisis kuantitatif karena data yang dianalisis adalah data yang telah diukur dan diwakili dalam bentuk angka-angka menggunakan model matematis. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi. Adapun rumus menghitung perkembangan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Perkembangan} = \frac{\text{nilai akhir} - \text{nilai awal}}{\text{nilai awal}} \times 100$$

Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini berupa belanja modal, tenaga kerja dan tingkat pengangguran serta variabel dependen produk domestik regional bruto. Adapun rumus dalam menghitung belanja modal yakni:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Kenaikan bersih dalam aset tetap} + \text{Beban Penyusutan}$$

atau

$$\text{Kenaikan bersih aset tetap} = \text{Aset tetap pada akhir tahun} - \text{Aset tetap pada awal tahun}$$

Bisnis sering menghabiskan banyak uang untuk aset tetap karena aset tersebut penting untuk menjalankan perusahaan dan tidak dapat dijual. Investasi ini biasanya menguntungkan lebih dari satu orang tertentu. Aset tetap, sering dikenal sebagai aset bergerak, adalah sejenis aset yang dapat digunakan paling lama di perusahaan juga cenderung memiliki nilai tertinggi. Real estate, bangunan, mesin, dan mobil adalah contoh aset tetap. Aset tetap mencakup benda-benda fisik yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan dapat meliputi mesin dan peralatan, bangunan dan struktur lainnya, dan bahkan kekayaan intelektual. Sumber daya ini kemungkinan akan melayani pemiliknya selama beberapa dekade. Di sisi lain, rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

a = Jumlah Angkatan Kerja

b = Jumlah penduduk 15thn keatas

Rumus ini digunakan untuk mengestimasi persentase populasi individu usia kerja yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi suatu negara atau wilayah tertentu. Tersedianya tenaga kerja yang mampu memberikan kontribusi dalam pembuatan barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat ketika tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat. Sementara rumus dalam perhitungan tingkat pengangguran yakni:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Penelitian ini melakukan analisis menggunakan metode regresi data panel untuk mengkaji Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi dengan

mempertimbangkan variabel belanja modal, tenaga kerja, dan pengangguran. Model data panel, seperti yang didefinisikan oleh Firdaus (2012), menggabungkan data deret waktu dengan data cross section untuk memaksimalkan jumlah observasi yang dapat dianalisis dalam periode waktu tertentu. Dengan kata lain, model memungkinkan lebih banyak pengamatan untuk dievaluasi dalam jumlah waktu yang sama. Saat melakukan penelitian, ada beberapa alasan mengapa penggunaan data panel lebih menguntungkan daripada hanya menggunakan data time series atau data cross section.

Investigasi ini menggunakan total tiga variabel independen, yang masing-masing dilambangkan dengan huruf X1, X2, dan X3 yang terdiri dari variabel Belanja Modal (X1), variabel Tenaga Kerja (X2), dan variabel Tingkat Pengangguran (X3). Sementara itu, variabel Produk Domestik Regional Bruto (Y) digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Rumusan model persamaan yang akan diestimasi dalam penelitian ini dapat ditemukan sebagai berikut:

$$\text{Ln.PDRB}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Ln.BM}_{it} + \beta_2 \text{Ln.TK}_{it} + \beta_3 \text{TPT}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien

i = *cross-section* (Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)

t = *time series*

Ln.PDRB_{it} = Variabel PDRB sebagai variabel dependen

Ln.BM_{it} = Variabel Belanja Modal sebagai X1

Ln.AKB_{it} = Variabel Tenaga Kerja sebagai X2

TPT_{it} = Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai X3

β_0 = Konstanta / Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien

ε_{it} = *Standard Error* di negara i pada periode tahun ke-t

3.3.1. Pendekatan Perhitungan Model Regresi Data Panel

Memperkirakan hasil regresi menggunakan data panel dapat dilakukan

dengan bantuan sejumlah pendekatan yang berbeda, yang paling umum adalah Pendekatan Kuadrat Terkecil Pooled (PLS) atau Model Efek Umum (CEM), Model Efek Tetap (FEM), dan Pendekatan *Random Effect Model* (REM). Menurut Widarjono (2009), metodologi tersebut digunakan untuk menganalisis model regresi data panel dengan tujuan memperoleh hasil estimasi yang benar dan signifikan. Gambaran model estimasi yang didasarkan pada data panel dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendekatan *Pooled Least Square* (PLS) / *Common Effect Model*

Model statistik PLS yang juga dikenal dengan model CEM merupakan model regresi yang menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS) untuk mengestimasi parameter bidang data model (Widarjono, 2009). Nachrowi dan Usman (2006) menyatakan panel data memiliki jumlah pengamatan yang lebih komprehensif daripada data deret waktu atau data lintas bagian. Akibatnya, hasil pooling (penggabungan) data seringkali lebih menguntungkan daripada sekedar mengumpulkan data dalam bentuk time series atau cross-section. Jika dibandingkan dengan dua model lainnya, ini adalah model dan metode yang paling populer dan tahan lama. Berdasarkan temuan investigasi ini, temuan Kuncoro (2012) bahwa setiap satuan memiliki himpunan intercept dan slope memiliki akurasi yang tinggi (tidak ada perbedaan dalam dimensi waktu dan lokasi). Dengan definisi lain, setiap orang akan terpengaruh oleh regresi data panel yang dihasilkan. Termasuk dalam model persamaan CEM dan PLS adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

β_0	= Konstanta/Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_n$	= Koefisien
Y_{it}	= Variabel Dependen objek i pada periode t
$X_{1it}, X_{2it}, X_{nit}$	= Variabel Independen objek i pada periode t
ε_{it}	= <i>standar error</i> objek i pada periode t

2. Pendekatan *Fixed Effect Model*

Menurut Gujarati (2004), Fixed Effect Model beroperasi dengan anggapan bahwa koefisien kemiringan tidak berubah, tetapi tidak beroperasi dengan anggapan bahwa intersep tidak berubah. Variabel dummy digunakan dalam proses perbedaan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya (Kuncoro, 2012). Model *Least Square Dummy Variables* (LSDV) adalah nama yang diberikan kebanyakan orang untuk model khusus ini. Menurut Greene (2002), metode *Least Square Dummy Variables* (LSDV) adalah metode estimasi parameter regresi linier yang menggunakan Metode Least Squares (MKT) dan menambahkan variabel dummy ke dalam model untuk menggambarkan cross-section atau efek waktu. Metode ini dikembangkan untuk digunakan dalam regresi linier. Berikut ini adalah beberapa model persamaan yang digunakan oleh FEM:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

β_0	= Konstanta/Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_n$	= Koefisien
Y_{it}	= Variabel Dependen objek i pada periode t
$X_{1it}, X_{2it}, X_{nit}$	= Variabel Independen objek i pada periode t
ε_{it}	= <i>standar error</i> objek i pada periode t

3. Pendekatan *Random Effect Model*

Metode *Generalized Least Square* (GIS) digunakan untuk estimasi kesalahan model regresi dalam Model Efek Acak (REM), semacam teknik regresi yang mengestimasi data panel. Menurut Kuncoro (2012), model REM tercipta dari residual, yaitu fluktuasi nilai dan orientasi interaksi antar subjek yang dianggap acak (Kuncoro, 2012). Variabel residual dalam model ini diasumsikan memiliki hubungan baik dengan waktu maupun antar subjek. Ini memberikan perkiraan untuk data panel. Widarjono (2009) menegaskan bahwa model *Fixed Effect* yang menggunakan variabel dummy memiliki beberapa kelemahan yang dapat diperbaiki melalui penggunaan model *Random Effect*.

Untuk mengestimasi data panel dengan *Random Effects Model* (REM), digunakan teknik *Generalized Least Square* (GLS), yang merupakan jenis dari regresi. Kuncoro (2012) mengklaim bahwa model REM adalah hasil dari variasi acak dalam kuantitas dan orientasi hubungan antar subjek, yang disajikan sebagai residual (Kuncoro, 2012). Estimasi data panel disediakan menggunakan model ini, di mana diasumsikan bahwa ada hubungan yang bergantung pada waktu dan subjek antara variabel residual. Widarjono (2009) berpendapat bahwa sangat penting untuk menggunakan model Efek Acak untuk menghindari keterbatasan model Efek Tetap, yang mencakup penggunaan variabel dummy.

Berbeda dengan Model Efek Acak, yang memperhitungkan variasi dalam data melalui kesalahan, Model Efek Tetap biasanya dilihat dari objek atau waktu yang digambarkan melalui penyadapan. Ini adalah perbedaan utama antara kedua kerangka kerja tersebut. Untuk menggunakan teknik analisis data panel dengan model efek acak, beberapa syarat harus dipenuhi. Salah satu prasyarat tersebut adalah memiliki jumlah variabel penelitian yang lebih banyak daripada cross section. Manfaat utama menggunakan model dengan efek acak adalah membantu menurunkan jumlah heteroskedastisitas yang ada dalam data. Model ini dikenal sebagai *Error Correction Model* karena residu terdiri dari dua komponen yang terpisah. Fakta bahwa kesalahan terhubung antara time series dan cross section yang berbeda diungkapkan oleh model ini (Suliyanto, 2011). Berikut adalah contoh model yang menggunakan persamaan REM:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \dots + \beta_n X_{it} + \varepsilon_{it} \quad ; \quad \varepsilon_{it} = u_i + v_t + w_{it}$$

Dimana :

β_0	= Konstanta/Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_n$	= Koefisien
Y_{it}	= Variabel Dependen objek i pada periode t
$X_{1it}, X_{2it}, X_{nit}$	= Variabel Independen objek i pada periode t
ε_{it}	= <i>standar error</i> objek i pada periode t

3.3.2. Pengujian Model Regresi Data Panel

Model efek umum (CEM), model efek tetap (FEM), dan model efek acak (REM) adalah tiga jenis model paling populer yang digunakan dalam regresi data panel. Dengan menggunakan berbagai uji statistik yang paling sesuai, Anda dapat memilih di antara ketiga jenis model ini dan melakukan regresi data panel. Di bawah ini adalah deskripsi beberapa tes berbeda yang dapat digunakan dalam regresi data panel untuk membantu memilih model yang paling tepat.

1. Uji Chow

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan dengan Common Effect Model, kita akan membandingkan keduanya, peneliti menggunakan Uji Chow (Chow Test). Tes ini juga dikenal dengan sebutan Rasio Uji Kemungkinan. Berikut adalah penjelasan tentang metodologi yang digunakan dalam tes Chow:

- Model Efek Tetap unggul dari CEM jika nilai Chi-Square kurang dari 0,05, yang sesuai dengan tingkat signifikansi 5%.
- Model *Common Effect* lebih unggul dalam kasus di mana nilai Chi-Square lebih besar dari 0,05 (5%).

2. Uji Hausman

Tes Hausman digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sejauh mana Model Efek Tetap (FEM) dan Model Efek Acak (REM) kompatibel satu sama lain dan menentukan model mana yang lebih tepat. Hilangnya derajat kebebasan yang disebabkan oleh penyertaan variabel dummy adalah *trade-off* yang datang dengan menggunakan model FEM. Saat menggunakan REM, kita juga harus mempertimbangkan apakah ada pelanggaran asumsi yang mendasari berbagai sumber kesalahan yang sedang diselidiki (Arien Rosetika et al., 2020). Hipotesis berikut digunakan dalam uji Hausman:

- Jika nilai Chi-Square kurang dari 0,05 (5%), maka *Fixed Effect Model* yang harus dipilih sebagai yang paling cocok untuk data.

- Jika nilai Chi-Square lebih dari 0,05 (5%), maka Model Random Effect yang harus dipilih sebagai model untuk menganalisis data.

3. Uji Lagrange Multiplier atau Bruesch-Pagan

Ketika Uji Chow dan Uji Hausman menemukan hasil yang signifikan, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memutuskan mana dari kedua model tersebut, Model Efek Umum (CEM) dan Model Efek Acak (REM) yang lebih akurat dalam representasi data. Sejak Bruesch-Pagan dikreditkan dengan membuat tes Lagrange Multiplier (LM), kadang-kadang disebut sebagai tes Bruesch-Pagan. Untuk melakukan uji LM, estimasi nilai LM dibandingkan dengan nilai *Chi-Square* pada tingkat derajat kebebasan (df) dan alpha yang telah ditentukan sebelumnya. Uji Lagrange Multiplier menggunakan hipotesis berikut sebagai titik awalnya:

- Jika LM_{hitung} lebih kecil dari *Chi-Square*, model yang dipilih untuk mewakili data adalah *Random Effect Model*.
- Jika LM_{hitung} lebih besar dari *Chi-Square*, maka model yang dipilih untuk mewakili data adalah *Common Effect Model*.

3.3.3. Pengujian Asumsi Klasik

Saat menggunakan prosedur yang dikenal sebagai kuadrat terkecil biasa (OLS), yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik. Regresi logistik dan regresi ordinal adalah dua contoh analisis regresi berbasis non-OLS yang tidak memerlukan asumsi biasa. Dalam studi regresi linier, tidak perlu melakukan semua tes penerimaan umum. Uji autokorelasi tidak diperlukan untuk data cross-sectional, dan uji multikolinearitas tidak dilakukan dalam analisis regresi linier langsung. Pemahaman tentang konsep dan penerapan uji asumsi klasik ini sangat penting untuk penggunaannya yang tepat dalam aplikasi statistik dalam studi ilmiah. Beberapa uji asumsi klasik dijelaskan di sini (Purba et al., 2021).

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah kumpulan variabel tertentu mengikuti distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual mengikuti distribusi normal atau tidak. Model regresi yang realistis harus menghasilkan residu yang terdistribusi secara teratur.

- Jika nilai probability $< \alpha$ (5%), artinya Residual tidak mengikuti distribusi normal.
- Jika nilai probability $> \alpha$ (5%), artinya residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel yang dianggap independen. Pada model regresi yang valid, variabel independen seharusnya tidak saling berkorelasi secara signifikan, atau setidaknya tidak boleh terkait secara substansial satu sama lain. Untuk memeriksa multikolinearitas dapat menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF) dan nilai toleransi.

- Jika nilai VIF kurang dari 10, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel yang diteliti secara independen.
- Jika nilai VIF lebih besar dari 10, hal ini menunjukkan adanya multikolinieritas antar variabel yang diteliti.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah varians residual dari model observasi menunjukkan ketidaksamaan untuk memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Selama uji heteroskedastisitas, harus mencari penyimpangan yang tidak sama antara setiap residu dan setiap pengamatan. Homoskedastisitas, atau sejauh mana varian residu dari satu pengamatan mirip dengan varian residu dari data sebelumnya, merupakan kondisi yang diperlukan

untuk model regresi yang memadai. Untuk mengilustrasikan heteroskedastisitas dapat menampilkan nilai ZPRED (Nilai Prediktif) vs nilai SRESID (Nilai Sisa) dalam sebar.

- Jika nilai Chi-Square kurang dari 0,05 atau 5%, hal ini menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas.
- Jika nilai Chi-Square lebih dari 0,05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas pada data.

3.3.4. Pengujian Hipotesis

Keputusan dapat dibuat dengan menggunakan data dari eksperimen terkontrol atau dari pengamatan (tidak terkontrol) melalui proses pengujian hipotesis. Beberapa contoh pengujian hipotesis adalah:

1. Uji F

Uji F digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari setiap variabel bebas pada waktu yang sama. Hipotesis untuk analisis ini dirumuskan sebagai berikut (Dhyatmika & Atmanti, 2013):

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (N - k)}$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

N = jumlah sampel

Hipotesis :

- H_0 : $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = 0$ (variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat)
- H_1 : $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \neq 0$ (variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat)

2. Uji t

Selama analisis, uji t digunakan untuk menghitung dampak proporsional yang dimiliki masing-masing variabel independen terhadap masing-masing variabel dependen. Adapun Uji t dilakukan dengan rumus dan hipotesis berikut (Syarifah, 2020) :

$$t = \frac{\beta_1 - \beta_{0_1}}{\text{sec}(\beta_1)}$$

Hipotesis :

- Jika nilai Sig kurang dari 0,05 (5%), hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh tertentu terhadap variabel yang diteliti (variabel terikat).

Jika nilai Sig lebih dari 0,05 (5%), berarti variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel yang diteliti (variabel terikat).

3.3.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel bebas dapat ditentukan dengan melakukan analisis terhadap koefisien determinasi (R^2). Angka antara 0 dan 1 diberikan pada koefisien determinasi, dan nilai ini menunjukkan sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan varians dalam variabel dependen. Jika nilai R^2 rendah, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak cukup menjelaskan varians pada variabel yang dijelaskan (variabel dependen). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak bertanggung jawab atas sebagian besar varians yang terlihat pada variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 relatif mendekati 1, berarti hampir semua faktor independen dapat digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Ini adalah kasus ketika R^2 mendekati 1. Di sisi lain, jika nilai R^2 jauh lebih rendah dari 1, ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen disebabkan oleh sejumlah kecil faktor yang berada di luar kendali manusia. Dalam penelitian ini, analisis determinasi dilakukan dengan tujuan untuk menentukan faktor-faktor independen yang relatif signifikan yang bertanggung jawab untuk menjelaskan

variasi nilai yang diamati dalam variabel dependen. Persamaan yang digunakan untuk menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

3.3. Operasional Variabel

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau daerah dalam periode tertentu di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Data PDRB dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan diungkapkan dalam bentuk persentase.
2. Belanja Modal mencakup anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pemerintahan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Data belanja modal dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan diukur dalam miliar rupiah.
3. Tenaga Kerja merujuk pada penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan terlibat dalam proses produksi dengan memiliki pekerjaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Data tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Angkatan Kerja yang Bekerja dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, diukur dalam jumlah individu.
4. Pengangguran mengacu pada penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Data tingkat pengangguran yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, diungkapkan dalam bentuk persentase.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Jambi

Provinsi Jambi terletak dalam rentang lintang selatan antara 0°45' hingga 2°45', dan rentang bujur timur antara 101°10' hingga 104°55'. Di sebelah utara, wilayahnya dibatasi oleh Provinsi Riau dan Kepulauan Riau; di selatan dikelilingi oleh Sumatera Selatan; di sebelah barat dikelilingi oleh provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu; dan di sebelah timur, dikelilingi oleh Laut Cina Selatan. Jumlah desa/kelurahan di Provinsi Jambi berdasarkan hasil PODES 2021 adalah sebanyak 1.562. Berdasarkan letak geografisnya 28 desa/kelurahan berada di tepi laut dan 1.534 bukan di tepi laut. Luas Wilayah Provinsi Jambi 49.026,579 km². Wilayah yang membentuk Provinsi Jambi dapat dipecah menjadi dua kota dan sembilan kabupaten. Provinsi Jambi memiliki 11 Kabupaten/Kota dan saat ini terdapat 144 kecamatan, tidak terdapat penambahan dari tahun sebelumnya. Provinsi Jambi memiliki total 1.562 desa atau kelurahan, dimana 1.399 desa dan 163 kecamatan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Berikut informasi mengenai wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Tabel 4.1. Kondisi Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km ²)
1.	Kerinci	3.455,149	7,03	74
2.	Merangin	7.540,118	15,38	47
3.	Sarolangun	5.935,894	12,11	50
4.	Batang Hari	5.935,516	10,99	58
5.	Muaro Jambi	5.387,516	10,66	79
6.	Tanjung Jabung Timur	4.546,621	9,27	52
7.	Tanjung Jabung Barat	5.546,063	11,31	59
8.	Tebo	6.103,737	12,45	56
9.	Bungo	4.760,827	9,71	78
10.	Kota Jambi	169,887	0,35	3.647
11.	Kota Sungai Penuh	364,924	0,74	272

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, 2023

Kabupaten Merangin merupakan yang terluas dengan luas 15,38 persen

dari Provinsi Jambi atau 7.540,118 Km², diikuti oleh Kabupaten Tebo (6.103,737 km²) dan Kabupaten Sarolangun (5.936,894 km²). Kota Jambi seluas 169.887 km² (atau 0,35 persen dari total) adalah yang terkecil. Populasi Provinsi Jambi diproyeksikan meningkat dari perkiraan tahun 2020 sebesar 3.548,2 menjadi 3.631,1 pada tahun 2022, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata mencapai 1,33 persen. Data kepadatan penduduk menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sekitar 3.647 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kabupaten Merangin memiliki kepadatan penduduk terendah, hanya sekitar 47 jiwa per kilometer persegi.

Pada Agustus 2022, sebesar 1.797.819 juta jiwa bekerja di Provinsi Jambi, sementara 86.459 ribu jiwa menganggur, dengan total angkatan kerja sebesar 1.884.278 juta jiwa. Pada tahun 2022, terdapat 6.106 ribu individu yang mendaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencari pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 3.982 ribu merupakan laki-laki dan 2.124 ribu merupakan perempuan. Perbandingan dengan tahun 2021 menunjukkan penurunan jumlah pencari kerja, yang mencapai 7.873 ribu jiwa, angka tersebut turun sebesar 22,44%. Disisi lain, dengan menggunakan Stasiun Pengamatan BMKG Muaro Jambi, dikumpulkan data meteorologi dan klimatologi serta pengukuran geofisika. Pada tahun 2022, suhu tertinggi rata-rata dalam setahun mencapai 27,2 derajat Celcius. Sementara itu, suhu terendah mencapai 21,4 derajat Celcius. Perbandingan dengan tahun 2021 menunjukkan penurunan suhu rata-rata, yang mencapai 21,6 derajat Celcius. Terdapat variasi tekanan udara antara 1.001,0 mb sampai dengan 1.013,1 mb, dengan nilai rata-rata 1.007,1 mb.

Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Berikut adalah gambaran umum terkait kondisi demografi dan ekonomi Provinsi Jambi:

4.1.1. Kondisi Demografi Provinsi Jambi

Kondisi demografi merujuk pada karakteristik dan statistik populasi suatu wilayah atau negara. Kondisi demografi dalam penelitian ini dilihat dari jumlah

penduduk. Dalam penelitian atau analisis demografi yang berfokus pada jumlah penduduk, informasi utama yang diperhatikan adalah total jumlah orang yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu pada suatu titik waktu tertentu. Data jumlah penduduk sangat penting dalam konteks demografi karena merupakan dasar untuk berbagai perhitungan dan analisis yang lebih mendalam. Berikut merupakan kondisi demografi berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi:

Tabel 4.2. Kondisi Demografi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kerinci	237.7	238.7	250.3	251.9	253.9
2.	Merangin	383.4	388.9	354.1	355.7	357.6
3.	Sarolangun	295.9	301.9	290.1	293.6	298.1
4.	Batang Hari	269.9	272.9	301.7	306.7	313.2
5.	Muaro Jambi	432.3	443.4	402.0	406.8	412.8
6.	Tanjung Jabung Timur	218.4	220.0	229.8	231.8	234.2
7.	Tanjung Jabung Barat	328.3	333.9	317.5	320.6	324.5
8.	Tebo	348.7	354.5	337.7	340.9	344.8
9.	Bungo	367.2	374.8	362.4	367.2	373.3
10.	Kota Jambi	598.1	604.7	606.2	612.2	619.6
11.	Kota Sungai Penuh	89.9	90.9	96.6	97.8	99.2
Provinsi Jambi		3.570.3	3.624.6	3.548.2	3.585.1	3.631.1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Menurut data dalam tabel 4.2, terlihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Jambi mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018 hingga 2022, dengan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk mencapai 3.570.3 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2022, jumlah penduduk meningkat menjadi 3.631.1 ribu jiwa. Selama periode 2018 hingga 2022, Kota Sungai Penuh mencatat jumlah penduduk terendah di Provinsi Jambi, sementara Kota Jambi memiliki jumlah penduduk tertinggi.

4.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jambi

Kondisi ekonomi adalah gambaran tentang kinerja ekonomi suatu wilayah, negara, atau daerah tertentu. Kondisi ekonomi dalam penelitian ini dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Pemantauan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adalah pendekatan yang umum digunakan untuk menganalisis kondisi ekonomi di tingkat daerah. PDRB ADHK adalah metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dengan menghilangkan efek inflasi, sehingga mencerminkan perubahan dalam jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di daerah tersebut. Analisis PDRB ADHK di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi akan memberikan gambaran tentang kontribusi masing-masing daerah terhadap ekonomi provinsi secara keseluruhan dan bagaimana pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut. Berikut adalah kondisi ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berdasarkan PDRB ADHK:

Tabel 4.3. Kondisi Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

No.	Kabupaten/Kota	PDRB ADHK (milyar rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kerinci	6.069,60	6.326,54	6.570,81	6.844,24	7.125,04
2.	Merangin	9.388,24	9.787,46	9.869,18	10.371,68	10.640,54
3.	Sarolangun	10.279,95	10.717,75	10.690,79	11.397,73	12.163,61
4.	Batang Hari	11.147,66	11.713,38	11.667,61	12.221,19	13.728,62
5.	Muaro Jambi	15.389,57	16.126,72	16.186,86	16.847,01	18.182,03
6.	Tanjung Jabung Timur	17.241,20	17.967,59	17.262,51	17.284,93	17.471,91
7.	Tanjung Jabung Barat	29.279,46	30.744,99	30.559,42	30.976,20	31.866,59
8.	Tebo	9.699,61	10.160,98	10.158,89	10.597,49	11.262,58
9.	Bungo	12.045,80	12.549,93	12.494,42	13.133,52	13.733,86
10.	Kota Jambi	18.667,87	19.550,81	18.775,82	19.515,49	20.529,73
11.	Kota Sungai Penuh	4.388,18	4.607,81	4.600,23	4.768,84	4.980,84
Provinsi Jambi		143.597,14	150.253,96	148.836,54	153.958,32	161.685,35

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tabel 4.3. memberikan gambaran bahwa PDRB ADHK Provinsi Jambi mengalami peningkatan selama periode tahun 2018 hingga 2022, meningkat dari 143.597,14 milyar rupiah pada tahun 2018 menjadi 161.685,35 milyar rupiah pada tahun 2022. Ini adalah indikasi positif bahwa ekonomi Provinsi Jambi sedang tumbuh selama periode tersebut. Selain itu, tabel 4.3. juga menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kontribusi PDRB ADHK tertinggi dalam periode yang sama, yakni dari sebesar 29.279,46 milyar rupiah pada tahun 2018 menjadi 31.866,59 milyar rupiah pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mungkin memiliki sektor-sektor ekonomi yang berkembang dengan baik atau mungkin telah mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Di sisi lain, Kota Sungai Penuh memiliki kontribusi PDRB ADHK terendah selama periode tersebut. Ini mungkin menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh mengalami tantangan dalam pertumbuhan ekonomi atau sektor-sektor tertentu mungkin tidak berkembang dengan baik.

4.2. Gambaran Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Ada 11 kabupaten atau kota berbeda yang membentuk Provinsi Jambi, dan semuanya terletak di wilayah Provinsi Jambi. Berikut penjelasan singkat mengenai Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jambi:

1. Kabupaten Kerinci

Kabupaten Kabupaten Kerinci adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Sejak berdirinya Provinsi Jambi, Sungai Penuh menjadi ibu kotanya, dan Kerinci menjadi salah satu kabupatennya. Siulak menjadi pusat pemerintahan pada tahun 2011. Koordinat Kabupaten Kerinci adalah 01°40'–02°26' Lintang Selatan, 101°08'–101°50' Lintang Timur. Seluruh provinsi Jambi yang terletak di bawah garis khatulistiwa dari utara ke selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci pada tahun 2022 diperkirakan sebanyak 253.863 ribu jiwa, dengan rincian 127.245 ribu laki-laki dan 126.618 ribu perempuan. Luas wilayah daratan 344.890 ha (3.448,90 km²). Kawasan TNKS menempati lebih dari separuh

lahan Kabupaten Kerinci, selebihnya digunakan untuk pertanian dan perumahan. Perubahan luas wilayah Kabupaten Kerinci karena adanya penyesuaian dengan Permendagri No. 25 Tahun 2019.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 itu dipatuhi untuk mewujudkan Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang berperan penting dalam pembangunan provinsi secara keseluruhan. Pada tahun 2008, Kota Sungai Penuh yang sebelumnya merupakan ibu kota Kabupaten Kerinci, berkembang menjadi kotamadya yang mandiri. Selama beberapa tahun terakhir, telah terjadi banyak pergeseran penting dalam pemerintahan Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2008, hanya ada delapan kecamatan di Kabupaten Kerinci, saat ini ada delapan belas kecamatan, dan mereka menampung 287 desa/kelurahan. Mulai tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Kerinci akan dimekarkan menjadi 18 kecamatan. Kecamatan-kecamatan ini (diurutkan berdasarkan wilayah terluas) dan persentase bagiannya dari keseluruhan wilayah kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kerinci

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Batang Merangin	507,65	14,72
2.	Kecamatan Gunung Raya	389,26	11,29
3.	Kecamatan Keliling Danau	303,76	8,81
4.	Kecamatan Gunung Kerinci	344,99	10
5.	Kecamatan Siulak Mukai	275,47	7,99
6.	Kecamatan Danau Kerinci	220,92	6,41
7.	Kecamatan Bukit Kerman	213,69	6,2
8.	Kecamatan Air Hangat	211,35	6,13
9.	Kecamatan Kayu Aro Barat	207,84	6,03
10.	Kecamatan Air Hangat Timur	181,43	5,26
11.	Kecamatan Gunung Tujuh	166,59	4,83
12.	Kecamatan Siulak	142,78	4,14
13.	Kecamatan Kayu Aro	114,66	3,32
14.	Kecamatan Sitinjau Laut	52,23	1,51
15.	Kecamatan Depati VII	27,71	0,8
16.	Kecamatan Danau Kerinci Barat	59,94	1,74
17.	Kecamatan Tanah Cogok	14,46	0,42
18.	Kecamatan Air Hangat Barat	14,13	0,41

Sumber: Kabupaten Kerinci Dalam Angka, 2023

Kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Kerinci adalah Kecamatan Batang Merangin seluas 507,65 Km² atau sekitar 14,72% terhadap luas Kabupaten Kerinci, diikuti oleh Kecamatan Gunung Raya dengan luas 389,26 Km² atau sekitar 11,29% dari total luas Kabupaten Kerinci. Sementara itu, terdapat kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu Kecamatan Air Hangat Barat yang hanya seluas 0,41% dari total luas Kabupaten Kerinci atau sebesar 14.13 Km².

Jumlah desa di Kabupaten Kerinci yang terdapat fasilitas pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2020 adalah sebanyak 221 desa. Sedangkan untuk sekolah menengah, SMP terdapat di 69 desa, SMA terdapat di 25 desa dan SMK terdapat di 8 desa. Perguruan tinggi hanya ada 2 di seluruh Kerinci, yaitu di Kecamatan Depati VII dan Kecamatan Siulak. Tidak ada rumah sakit maupun rumah sakit bersalin di Kabupaten Kerinci. Namun puskesmas tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Air Hangat, hanya ada puskesmas pembantu. Terdapat 16 apotek di seluruh wilayah Kerinci untuk melayani pembelian obat dengan resep dokter.

Kabupaten Kerinci terkenal sebagai Kabupaten dengan pemandangan paling menakjubkan di Provinsi Jambi. Gunung Kerinci puncak tertinggi di pulau Sumatera, Air Terjun Telun Berasap, dan Danau Gunung Tujuh yang semuanya terletak di sekitar Gunung Kerinci merupakan kenampakan alam penting yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan Kabupaten Kerinci. Fakta bahwa Taman Nasional Kerinci Seblat yang dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia juga merupakan rumah bagi berbagai flora dan satwa liar menjadikannya lokasi yang sangat penting untuk studi ilmiah. Selain itu, terdapat Danau Kerinci, Danau Likat serta sejumlah harta karun sejarah yang juga merupakan bagian dari daya tarik alam Kabupaten Kerinci. Kopi merupakan komoditas perkebunan pokok di Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2020, luas panen bertambah menjadi 12.660 hektar. Pada 2020, total produksi kopi mencapai 7.526 ton. Banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang tertarik dengan keindahan alam Kerinci yang sakral. Kawasan yang berjarak 418 kilometer dari Jambi ini dikenal sebagai "sekepal tanah dari surga".

2. Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin terbentuk menyusul pemekaran Kabupaten Sarolangun Bangko yang mengakibatkan pemekaran wilayah sebelumnya menjadi dua wilayah berbeda yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 yang dikeluarkan tanggal 4 Oktober 1999 menjadi pendorong berdirinya Kabupaten Merangin. Undang-undang ini juga bertanggung jawab atas berdirinya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meski telah dimekarkan, Kabupaten Merangin tetap menjadi daerah primer, dan Kota Bangko yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sarolangun Bangko sebelum pemekaran tetap menjadi lokasi pusat pemerintahan. Secara geografis, Kabupaten Merangin terletak di bagian barat pulau. Koordinatnya pada peta adalah sebagai berikut: 101°32'39" - 102°38'35" Bujur Timur dan 1°39'23" - 2°46'9" Lintang Selatan. Kabupaten Merangin di segala sisi dibatasi oleh wilayah lain: di utara berbatasan dengan Kabupaten Bungo, timur berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebong, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci. Dataran tinggi seluas 3.027 kilometer persegi dan dataran seluas 4.607 kilometer persegi membentuk luas daratan Kabupaten Merangin seluas 7.679 kilometer persegi. Ketinggian wilayah ini berkisar dari 46 meter di atas permukaan laut hingga 1.206 meter. Kabupaten Merangin terdiri dari 24 kecamatan, 205 desa, dan 10 kelurahan. Berikut informasi mengenai wilayah Kecamatan di Kabupaten Merangin:

Tabel 4.5. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Merangin

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Jangkat	967,23	12,60
2.	Kecamatan Jangkat Timur	593,46	7,73
3.	Kecamatan Muara Siau	655,06	8,53
4.	Kecamatan Lembah Masurai	688,99	8,97
5.	Kecamatan Tiang Pumpung	274,86	3,58
6.	Kecamatan Pamenang	346,54	4,51
7.	Kecamatan Pamenang Barat	199,55	2,60
8.	Kecamatan Renah Pamenang	107,58	1,40
9.	Kecamatan Pamenang Selatan	167,47	2,18

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
10.	Kecamatan Bangko	168,39	2,19
11.	Kecamatan Bangko Barat	196,47	2,56
12.	Kecamatan Nalo Tantan	111,34	1,45
13.	Kecamatan Batang Masumai	206,58	2,69
14.	Kecamatan Sungai Manau	295,50	3,85
15.	Kecamatan Renah Pembarap	272,86	3,55
16.	Kecamatan Pangkalan Jambu	427,05	5,56
17.	Kecamatan Tabir	333,33	4,34
18.	Kecamatan Tabir Ulu	219,64	2,86
19.	Kecamatan Tabir Selatan	196,25	2,56
20.	Kecamatan Tabir Ilir	158,92	2,07
21.	Kecamatan Tabir Timur	108,75	1,42
22.	Kecamatan Tabir Lintas	115,38	1,50
23.	Kecamatan Margo Tabir	128,30	1,67
24.	Kecamatan Tabir Bara	739,50	9,63

Sumber: Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2023

Kecamatan Jangkat merupakan wilayah terluas di seluruh Kabupaten Merangin, dengan luas 967,23 km² dan mencakup 12,60% dari luas daratan keseluruhan. Sedangkan Kecamatan Renah Pamenang memiliki luas wilayah kecamatan yang paling rendah yaitu hanya seluas 107,58 km² yang merupakan 1,40 persen dari luas wilayah Kabupaten Merangin. Kabupaten Merangin berpenduduk sebanyak 357.577 ribu jiwa pada tahun 2022, dengan rincian 181.850 ribu laki-laki dan 175.727 ribu perempuan. Kabupaten Merangin memiliki kepadatan penduduk rata-rata 47 jiwa per kilometer persegi, menurut data kepadatan penduduk tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 47 jiwa yang mendiami setiap kilometer persegi Kabupaten Merangin.

Menurut karakteristik topografi wilayahnya, wilayah Kabupaten Merangin dapat dibagi menjadi tiga wilayah berbeda: dataran rendah, dataran tengah, dan dataran tinggi. Wilayah ini memiliki lingkungan yang umumnya bergelombang dan memiliki kisaran ketinggian mulai dari 10 meter di atas permukaan laut hingga 1.206 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah Kabupaten Merangin dapat ditemukan pada ketinggian 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut rata-rata dan menempati sekitar 42,77% dari total luas daratan wilayah tersebut.

Dataran tersebut memiliki ketinggian mulai dari 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut dan mencakup sekitar 32,52% dari total luas daratan wilayah tersebut. Kecamatan Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, dan Sungai Manau serta sebagian wilayah Tabir Ulu semuanya termasuk dalam dataran tinggi Kabupaten Merangin yang terletak lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini menempati kurang lebih 14,5% dari luas daratan Kabupaten Merangin. Dataran rendah Kabupaten Merangin terdapat di Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Tabir Selatan, dan ruas Tabir Ulu.

3. Kabupaten Sarolangun

Terbentuknya sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Jambi merupakan hasil dari Surat Keputusan DPRD Propinsi Jambi tanggal 9 Juli 1999 dengan nomor 2/DPRD/99 yang mengatur pemekaran daerah disana. Salah satu hasil pemekaran tersebut adalah Kabupaten Sarolangun, yang menjadi daerah otonom pada tanggal 12 Oktober 1999 sesuai dengan keputusan tersebut. Ketinggian tanah di Kabupaten Sarolangun yang berkisar antara 10 hingga 1000 meter di atas permukaan laut dianggap sebagai bagian dari dataran rendah. Secara geografis Kabupaten Sarolangun terletak di antara koordinat 102°03'39" dan 103°13'17" timur khatulistiwa dan antara koordinat 01°53'39" dan 02°46'24" selatan khatulistiwa. Batas wilayah Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Batanghari di sebelah utara
- Kabupaten Musi Rawas berbatasan dengan sebelah timur
- Kabupaten Rejang Lebong di selatan
- Kabupaten Merangin di sisi barat.

Luas wilayah Kabupaten Sarolangun secara keseluruhan adalah 5.941,13 kilometer persegi, dan terbagi menjadi 11 kecamatan, 149 desa, dan 9 kelurahan. Berikut ini adalah daftar kecamatan yang termasuk dalam Kabupaten Sarolangun, beserta gabungan luas lahan dan persentase luas kabupaten secara keseluruhan:

Tabel 4.6. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sarolangun

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Batang Asai	926,79	15,60
2.	Kecamatan Limun	807,11	13,59
3.	Kecamatan Cermin Nan Gedang	385,46	6,49
4.	Kecamatan Pelawan	347,44	5,85
5.	Kecamatan Singkut	209,78	3,53
6.	Kecamatan Sarolangun	281,07	4,73
7.	Kecamatan Bathin VIII	360,84	6,07
8.	Kecamatan Pauh	759,40	12,78
9.	Kecamatan Air Hitam	634,84	10,69
10.	Kecamatan Mandiangin	748,74	12,60
11.	Kecamatan Mandiangin Timur	479,66	8,07

Sumber: Kabupaten Sarolangun Dalam Angka, 2023

Kecamatan Batang Asai memiliki luas wilayah terluas di Kabupaten Sarolangun, yakni 926,79 Km² atau 15,60 persen dari luas total, diikuti Kecamatan Limun dan Kecamatan Pauh masing-masing memiliki luas sebesar 807,11 Km² dan 759,40 Km². Di sisi lain, Kecamatan Mandiangin Timur memiliki luas wilayah terkecil yaitu 479,66 Km², yang merupakan sekitar 8,07 persen dari total luas Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Sarolangun berpenduduk 298.091 ribu jiwa, menurut hasil proyeksi sementara tahun 2022. Jumlah penduduk Sarolangun meningkat 1,38 persen dibandingkan dengan data sensus penduduk tahun 2020. Pada tahun 2022 kepadatan penduduk di Kabupaten Sarolangun akan melebihi 50.000 jiwa per km² menurut proyeksi. Kepadatan penduduk dari sebelas kecamatan tersebut menunjukkan rentang yang cukup signifikan, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Sarolangun sebesar 210 ribu jiwa per km² dan Kecamatan Batang Asai memiliki kepadatan terendah sebesar 21 ribu jiwa per km².

4. Kabupaten Batang Hari

Melalui Peraturan Komisariat Pemerintah Republik Indonesia di Bukit Tinggi No. 81/Kom/U tanggal 30 November 1948, Kabupaten Batang Hari dan

ibu kotanya Muara Bulian resmi dibentuk pada tanggal 1 Desember 1948. Kabupaten Batang Hari adalah dikenal dengan konsep "Serentak Bak Regam". Muara Bulian berfungsi sebagai pusat administrasi kabupaten. Saat itu jantung administrasi Provinsi terletak di Jambi yang kini dikenal sebagai Kota Jambi. Provinsi Jambi memiliki total 11 kabupaten dan kota yang berbeda. Kabupaten Batang Hari adalah salah satu kota tersebut. Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi meliputi wilayah seluas 5.180,35 kilometer persegi dan terletak di tengah provinsi. Kabupaten Batang Hari terletak antara 1°15' dan 2°2' lintang selatan, serta antara 102°30' dan 104°30' bujur timur. Iklim Kabupaten Batang Hari adalah tropis, dan sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah, dengan ketinggian berkisar antara 11 hingga 100 meter di atas permukaan laut (92,67 persen dari luas wilayah). Sementara itu, 7,33 persen sisanya dapat ditemukan di ketinggian antara 101 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Topografi Kabupaten Batang Hari yang berbukit dapat dikaitkan dengan letaknya yang berada di bagian tengah Provinsi Jambi. Batang Hari dan Tembesi adalah dua sungai terpenting yang mengalir melalui wilayah ini. Pada tahun 2021, Kabupaten Batang Hari akan mencakup total 124 desa atau kelurahan dan delapan kecamatan. Berikut batas-batas Kabupaten Batang Hari: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat; di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi; di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Muaro Jambi; dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo.

Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu kabupaten otonom di Provinsi Jambi. Wilayah ini terbagi menjadi delapan kecamatan, empat belas kelurahan, dan seratus sepuluh desa pemukiman. Berikut adalah kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam Kabupaten Batang Hari beserta luas wilayahnya dan persentase luas Kabupaten Batang Hari yang terdiri dari masing-masing kecamatan:

Tabel 4.7. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Batang Hari

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Mersam	801,90	13,81
2.	Kecamatan Maro Sebo Ulu	906,33	15,61
3.	Kecamatan Batin XXIV	904,14	15,58
4.	Kecamatan Muara Tembesi	419,77	7,23
5.	Kecamatan Muara Bulian	417,97	7,20
6.	Kecamatan Bajubang	1,203,51	20,73
7.	Kecamatan Maro Sebo Ilir	129,06	2,22
8.	Kecamatan Pelayung	1,022,15	17,61

Sumber: Kabupaten Batang Hari Dalam Angka, 2023

Dengan luas wilayah 1.203,51 km² atau 20,73 persen dari luas wilayah kabupaten, Kecamatan Bajubang merupakan kecamatan terpadat dan terluas di Kabupaten Batang Hari. Sementara itu, Kecamatan Maro Sebo Ilir memiliki luas wilayah terkecil dari ketiga kecamatan di Kabupaten Batang Hari, yakni seluas 129,06 km² atau 2,22 persen dari luas keseluruhan. Kabupaten Batang Hari pada awalnya dimekarkan menjadi dua daerah tingkat II yang berbeda. Pada awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965, Kabupaten Batang Hari didirikan dengan Kenali Asam sebagai ibu kotanya, dan Kabupaten Tanjung Jabung didirikan dengan Kuala Tungkal sebagai ibu kotanya. Setelah itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Batang Hari dimekarkan kembali menjadi dua kabupaten yang berbeda. Kabupaten baru ini diberi nama Kabupaten Batang Hari yang beribukota di Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi yang beribukota di Sengeti. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari sebanyak 313.209 ribu jiwa, dengan rincian laki-laki 160.228 ribu jiwa dan perempuan 149.680 ribu jiwa. Kecamatan Muara Bulian paling banyak penduduknya, sedangkan Kecamatan Maro Sebo Ilir paling sedikit.

5. Kabupaten Muaro Jambi

Sesuai Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, Kabupaten Muaro Jambi diakui sebagai pemekaran dari Kabupaten Batang Hari. Kabupaten ini terletak di

dalam Provinsi Jambi. Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 1°15' - 2°20' Lintang Selatan dan di antara 103°10' - 104°20' Bujur Timur. Wilayah yang memiliki lingkungan tropis ini membentang seluas 5.264 km² dan mencakup 10,29% dari seluruh daratan Provinsi Jambi. Berikut adalah daftar batas wilayah Kabupaten Muaro Jambi menurut letak geografisnya:

- Utara: Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Selatan: Provinsi Sumatera Selatan
- Barat: Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Timur: Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam konteks ketiga tingkat pemerintahan—internasional, nasional, dan regional—Kabupaten Muaro Jambi menempati posisi kunci. Kabupaten ini berpotensi untuk terlibat dalam kerjasama kawasan Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT) karena terletak di kawasan segitiga pertumbuhan antara Singapura, Johor, dan Riau (SIJORI). Adanya simpang timur yang menghubungkan kota-kota besar di Sumatera Timur dan Pulau Jawa dengan Kabupaten Muaro Jambi memungkinkan akses yang mudah ke semua lokasi tersebut. Kota Jambi dikelilingi di semua sisi oleh Kabupaten Muaro Jambi, yang tidak hanya menjadikannya pilihan yang layak untuk relokasi tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan operasional, sehingga meningkatkan fungsinya sebagai titik masuk utama provinsi. Selain itu, kedekatannya dengan pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak, yang dihubungkan oleh jembatan Batanghari II, menawarkan peluang untuk memasarkan barang-barang lokal.

Kabupaten Muaro Jambi pada awalnya terdiri dari tujuh kecamatan dan 120 desa. Di sisi lain, pada tahun 2022 kabupaten ini akan berkembang menjadi 11 kecamatan dan 155 desa atau kelurahan, dari semula terdiri dari 150 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan yang membentuk Kabupaten Muaro Jambi dirinci di bawah ini, beserta wilayahnya masing-masing dan proporsi luas kabupaten yang disumbangkan oleh masing-masing kecamatan.

Tabel 4.8. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Mestong	474,70	9,02
2.	Kecamatan Sungai Bahar	160,50	3,05
3.	Kecamatan Bahar Selatan	195,69	3,75
4.	Kecamatan Bahar Utara	167,26	3,18
5.	Kecamatan Kumpeh Ulu	386,65	7,35
6.	Kecamatan Sungai Gelam	654,41	12,43
7.	Kecamatan Kumpeh	1.658,93	31,51
8.	Kecamatan Maro Sebo	261,47	4,97
9.	Kecamatan Taman Rajo	352,67	6,70
10.	Kecamatan Jambi Luar Kota	280,12	5,32
11.	Kecamatan Sekernan	671,60	12,76

Sumber: Kabupaten Muaro Jambi Dalam Angka, 2023

Berdasarkan informasi yang disajikan pada tabel 4.6, Kecamatan Kumpeh merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan luas wilayah 1.658,93 km², kecamatan ini memiliki luas 31,51 persen dari total luas kabupaten. Sedangkan Kecamatan Sungai Bahar memiliki luas wilayah terkecil dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Seluruh daratannya hanya 160,50 km², yaitu hanya 3,05 persen dari total daratan. Menurut perkiraan penduduk sementara, jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2022 sebesar mencapai 412,83 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 212,78 ribu jiwa adalah penduduk laki-laki, sedangkan 200,05 ribu jiwa adalah penduduk perempuan. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Muaro Jambi adalah 78 jiwa per km², dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 256 jiwa per km² berada di Kecamatan Jambi Luar Kota. Kecamatan Kumpeh merupakan yang terendah di Kabupaten Muaro Jambi dengan 15 orang per kilometer persegi, Kecamatan Taman Rajo memiliki kepadatan penduduk tertinggi (38 jiwa/km²) karena mayoritas lahannya adalah perkebunan dan kayu. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sering digunakan untuk membuat perbandingan antara total angkatan kerja (yang bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Di Kabupaten Muaro

Jambi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diproyeksikan mencapai 67,21 persen pada tahun 2022. Sedangkan Tingkat Pengangguran Peserta Total (TPT) di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 5,35 persen pada tahun 2022

6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak secara geografis antara 0°53' – 1°41' Lintang Selatan dan 103°23' – 104°31' Bujur Timur. Ketinggian Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkisar antara 1 sampai 5 meter di atas permukaan laut. Karena wilayah perairan kabupaten ini terletak di antara alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) yang menghubungkan utara dan selatan, maka potensi perluasan geografis sangat besar. Seluruh wilayah yang membentuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini terdiri dari dataran yang memiliki kemiringan 0% sampai 3% (sepenuhnya datar). Karena pengaruh pasang surut, kawasan ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian yang memenuhi persyaratan drainase yang efisien dan juga berfungsi sebagai saluran irigasi. Laut Cina Selatan terdapat di sebelah utara dan timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muaro Jambi terdapat di sebelah selatan, serta Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi terdapat di sebelah barat Kabupaten JabungTanjung Timur. Inilah batas geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Luas daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 5.085,71 km². Daerah ini terbagi menjadi 11 kecamatan, yang kemudian dibagi lagi menjadi 20 kelurahan dan 73 desa. Kecamatan Muara Sabak Timur memiliki desa dan kelurahan terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 12 desa. Diikuti oleh Kecamatan Rantau Rasau yang memiliki 11 desa dan kelurahan. Berikut rincian kecamatan yang membentuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta luas wilayahnya masing-masing dan proporsi luas wilayah yang disumbangkan masing-masing kecamatan terhadap luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan.

Tabel 4.9. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Mendahara	538,58	10,59
2.	Kecamatan Mendahara Ulu	554,23	10,90
3.	Kecamatan Geragai	556,30	10,94
4.	Kecamatan Dendang	381,52	7,50
5.	Kecamatan Muara Sabak Barat	277,47	5,46
6.	Kecamatan Muara Sabak Timur	388,06	7,63
7.	Kecamatan Kuala Jambi	113,95	2,24
8.	Kecamatan Rantau Rasau	177,55	3,49
9.	Kecamatan Berbak	1.169,17	22,99
10.	Kecamatan Nipah Panjang	307,94	6,06
11.	Kecamatan Sadu	620,94	12,21

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2023

Kecamatan Berbak memiliki luas wilayah terluas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu seluas 1.169,17 km² atau 22,99% dari luas wilayah, disusul Kecamatan Sadu seluas 620,94 km². Suhu udara di Tanjung Jabung Timur rata-rata berkisar antara 25,86 derajat Celcius hingga 30,23 derajat Celcius sepanjang tahun 2022. Suhu rata-rata April 2022 adalah yang tertinggi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 234.164 ribu. Antara tahun 2021 dan 2022, ada pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 0,94%. Dengan total populasi 33.036.000 jiwa, Kabupaten Muara Sabak Timur memiliki jumlah penduduk tertinggi. Kecamatan Muara Sabak Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata tahunan terbesar yaitu 1,94%, diikuti oleh Kecamatan Geragai sebesar 1,42%. Kabupaten Kuala Jambi memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah, dengan pertumbuhan 0,57% setiap tahunnya. Pada tahun 2022, kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah 46. Berbak, wilayah terpadat memiliki kepadatan penduduk terendah (9 orang per km²). Kecamatan Rantau Rasau memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 142 jiwa per km² luas wilayah. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, rasio jenis kelamin diperkirakan mencapai 103,98 pada tahun 2022. Menurut statistik ini, ada 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di dunia saat ini.

7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pada tahun 1965 wilayah yang diperintah oleh Kabupaten Batanghari dimekarkan menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Batanghari II yang beribukotakan Kenali Asam dan Kabupaten Tanjung Jabung II yang beribukotakan Kuala Tungkal. Kedua kabupaten baru ini memiliki ibu kota masing-masing di kota Kenali Asam dan Kuala Tungkal. Pada tanggal 10 Agustus 1965, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50), Kabupaten Tanjung Jabung Dati II resmi dibentuk sebagai daerah kabupaten. Kecamatan Tungkal Ulu, Tungkal Ilir, dan Muara Sabak merupakan bagian dari kecamatan ini.

Kabupaten Tanjung Jabung terpecah menjadi dua daerah saat menginjak usia 34 tahun dan saat Era Desentralisasi Daerah dimulai. Selama ini daerah diberi kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, sehingga Kabupaten Tanjung Jabung dimekarkan menjadi dua daerah. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten Induk, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi Kabupaten Sekunder. Kuala Tungkal menjadi ibu kota Kabupaten Utama. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijumpai pada lokasi dengan rentang lintang 0°53' hingga 01°41' selatan dan rentang bujur 103°23' hingga 104°21' timur. Ada 5.009,82 km² tanah di bawah yurisdiksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berikut adalah daftar wilayah yang membentuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

- Di wilayah selatan: Kabupaten Batanghari
- Di wilayah utara: Provinsi Riau
- Di wilayah barat, Kabupaten Batanghari dan Tebo
- Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat di sebelah timur.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki total 114 desa yang tersebar di 13 kecamatan dan 20 kelurahan. Kecamatan Pengabuan memiliki 12 desa dan 1 kelurahan, menjadikannya sebagai kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Berikut adalah daftar kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta luas wilayah dan persentasenya masing-masing terhadap luas wilayah kabupaten tersebut:

Tabel 4.10. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Tungkul Ulu	345,69	9,60
2.	Kecamatan Merlung	311,65	6,22
3.	Kecamatan Batang Asam	1.042,37	20,81
4.	Kecamatan Tebing Tinggi	342,89	6,84
5.	Kecamatan Renah Mendaluh	473,72	9,46
6.	Kecamatan Muara Papalik	336,38	6,71
7.	Kecamatan Pengabuan	440,13	8,79
8.	Kecamatan Senyerang	426,63	8,52
9.	Kecamatan Tungkul Ilir	100,31	2,00
10.	Kecamatan Bram Itam	312,66	6,24
11.	Kecamatan Seberang Kota	121,29	2,42
12.	Kecamatan Betara	570,21	11,38
13.	Kecamatan Kuala Betara	185,89	3,71

Sumber: Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, 2023

Kecamatan Pengabuan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa atau kelurahan terbanyak, dengan total 12 desa dan satu kelurahan di wilayah ini. Berdasarkan tabel 4.8 yang terlampir, Kecamatan Batang Asam merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mencakup 20,81% dari luas total kabupaten atau sekitar 1.042,37 Km². Sebaliknya, Kecamatan Seberang Kota merupakan kecamatan terkecil, hanya memiliki luas 2,42% dari total luas kabupaten, yaitu sekitar 121,29 Km². Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab atas pembuatan data statistik jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022. Pada tahun 2022, populasi kabupaten ini mencapai 326.530 ribu jiwa, mengalami peningkatan dari 317.498 ribu jiwa pada tahun 2020. Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu fokus utama pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ini mencakup baik sistem pendidikan formal, yang dimulai dari tingkat dasar dan berlanjut sampai ke tingkat perguruan tinggi, maupun sistem pendidikan nonformal yang mencakup hal-hal seperti pelatihan dan pembinaan dalam berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan untuk memajukan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani.

8. Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo secara astronomis terletak antara 0°52'32" dan 1°54'50" Lintang Selatan dan 101°48'57" dan 102°49'17" Bujur Timur. Iklim di wilayah ini adalah tropis, dan rata-rata 84,96% daratan terletak pada ketinggian 99 meter di atas permukaan laut. Berikut adalah daftar batas wilayah Kabupaten Tebo yang ditetapkan berdasarkan letak geografisnya:

- Bagian Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
- Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin
- Bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Bungo
- Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kecamatan Tebo terdiri dari total 12 kecamatan dan 112 desa atau kelurahan, yang masing-masing dibagi lagi menjadi 107 desa dan 5 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tebo mencapai 646.100 hektar atau setara dengan sekitar 11,86% dari luas daratan Provinsi Jambi. Kecamatan Sumay memiliki luas paling besar yaitu sekitar 1.268 Km² (19,63%), sedangkan Kecamatan Rimbo Ilir memiliki luas paling kecil yaitu 214,34 Km² (3,32%). Berikut merupakan kecamatan beserta luas wilayah dan persentasenya terhadap total wilayah terdiri dari :

Tabel 4.11. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tebo

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Tebo Ilir	708,7	10,97
2.	Kecamatan Muara Tabir	509,3	7,88
3.	Kecamatan Tebo Tengah	983,56	15,22
4.	Kecamatan Sumay	1.268,00	19,63
5.	Kecamatan Tengah Ilir	221,44	3,53
6.	Kecamatan Rimbo Bujang	406,92	6,3
7.	Kecamatan Rimbo Ulu	295,74	4,58
8.	Kecamatan Rimbo Ilir	214,34	3,32
9.	Kecamatan Tebo Ulu	410,3	6,35
10.	Kecamatan VII Koto	658,79	10,2
11.	Kecamatan Serai Serumpun	315,7	4,89
12.	Kecamatan VII Koto Ilir	468,21	7,25

Sumber: Kabupaten Tebo Dalam Angka, 2023

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Tebo mencapai 340.868 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sex ratio Kabupaten Tebo adalah 105,76, yang berarti terdapat sekitar 175.208 ribu penduduk laki-laki dan 165.660 ribu penduduk perempuan di wilayah tersebut. Rasio beban tanggungan penduduk Kabupaten Tebo diperkirakan mencapai 44,12% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun), akan terdapat kurang lebih 44-45 penduduk yang belum produktif (0- 14 tahun) dan dianggap tidak produktif untuk jangka waktu yang lebih lama (64 tahun ke atas). Indikator ketenagakerjaan yang disebut TPAK sering digunakan untuk membandingkan antara jumlah angkatan kerja (yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan) dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Jumlah penduduk yang aktif berpartisipasi dalam angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Tebo turun dari 71,13 pada tahun 2020 menjadi 70,65 pada tahun 2021. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tebo turun dari 2,95% pada tahun 2020 menjadi 2,83% pada tahun 2021.

Geografi Kabupaten Tebo bercirikan dataran rendah, berbukit ringan, dan berawa dengan kemiringan yang bervariasi. Luas lereng di Kabupaten Tebo yang memiliki kemiringan lereng 0-2 persen atau kurang adalah seluas 66.400 hektar (10,28 persen), sedangkan luas lereng dengan kemiringan 2 -15% atau lebih total 456.800 hektar (70,70%). Lereng yang memiliki kemiringan antara 16 sampai 40 persen mencakup area seluas 80.000 ha (16,38%), dan terdapat pula daerah dengan kemiringan lebih dari 40% yang memiliki luas 42.900 Ha (6,64%).

Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Tebo memiliki karakteristik alam yang sebagian besar datar dengan adanya gundukan-gundukan kecil, beberapa bukit pegunungan, dan lahan basah di beberapa lokasi. Dataran ini terutama terdapat di Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan VII Koto. Ada juga beberapa rawa yang ditemukan di sepanjang sungai seperti Batang Hari, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Langsisip, Batang Jujuhan, dan Batang Sumay. Sungai-sungai tersebut merupakan daerah aliran sungai (DAS) utama di Kabupaten Tebo.

Sungai Batang Hari sepanjang 300 kilometer, Sungai Batang Tebo sepanjang 29 kilometer, Sungai Langsisip sepanjang 23 kilometer, Sungai Jujuhan sepanjang 7 kilometer, Sungai Tabir sepanjang 52 kilometer, dan Sungai Sumay sepanjang 70 kilometer.

9. Kabupaten Bungo

Salah satu daerah yang membentuk Provinsi Jambi disebut Kabupaten Bungo. Menyusul pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada 12 Oktober 1999, terbentuklah kabupaten baru ini. Terdapat 17 kecamatan yang membentuk Kabupaten Bungo, dan luas daratan kabupaten ini seluruhnya 4.659 km², yang setara dengan 9,80% dari luas daratan Provinsi Jambi. Di sebelah utara Provinsi Sumatera Barat terdapat Kabupaten Bungo. Sementara di sebelah selatan, timur, dan barat berbatasan dengan kabupaten lain yang merupakan bagian dari Provinsi Jambi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Kerinci. Pengamatan curah hujan di Kabupaten Bungo menunjukkan 164 hari hujan dengan debit rata-rata 3.190 mm³ per hari selama tahun 2022. Bungo terbagi menjadi 17 kecamatan, terdiri dari 141 desa dan 12 kelurahan. Wilayah tingkat kedua di Kabupaten Bungo terdiri dari dua jenis yaitu desa dan rukun warga (RW). Kedua jenis area ini membentuk area tingkat kedua. Selain itu, rumah tangga (RT) merupakan satuan lingkungan yang memiliki tapak terkecil di wilayah tersebut. Berikut adalah daftar kecamatan yang membentuk Kabupaten Bungo beserta luas wilayah dan persentasenya masing-masing:

Tabel 4.12. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bungo

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Pelepat	1.069,07	22,94
2.	Kecamatan Pelepat Ilir	410,29	8,81
3.	Kecamatan Bathin II Babeko	176,29	3,78
4.	Kecamatan Rimbo Tengah	96,90	2,1
5.	Kecamatan Bungo Dani	35,9	0,7
6.	Kecamatan Pasar Muara Bungo	9,21	0,2
7.	Kecamatan Bathin III	80,46	1,7

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
8.	Kecamatan Rantau Pandan	239,61	5,14
9.	Kecamatan Muko-Muko Bathin VII	186,73	4,01
10.	Kecamatan Bathin III Ulu	373,83	8,01
11.	Kecamatan Tanah Sepenggal	106,92	2,29
12.	Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	77,51	1,66
13.	Kecamatan Tanah Tumbuh	236,55	5,07
14.	Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	932,41	20,01
15.	Kecamatan Bathin II Pelayang	179,84	3,84
16.	Kecamatan Jujuhan	254,12	5,45
17.	Kecamatan Jujuhan Ilir	193,04	4,14

Sumber: Kabupaten Bungo Dalam Angka, 2023

Kecamatan Pelepat memiliki luas wilayah terluas yaitu 1.069,07 Km² dengan luas 22,94% dari luas wilayah Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo berpenduduk sebanyak 373.344 ribu jiwa pada tahun 2022. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bungo per kilometer persegi pada tahun 2022 adalah sekitar 80,13 ribu jiwa, artinya terdapat sekitar 80-81 penduduk dalam setiap kilometer persegi di wilayah Kabupaten Bungo. Wilayah ini dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti sektor perkebunan yang didominasi oleh karet dan kelapa sawit, serta industri pertambangan yang bergantung pada batu bara. Kedua sektor tersebut dapat ditemukan di kabupaten ini. Sebagian besar wilayah yang membentuk Kabupaten Bungo mengandung emas, menjadikannya salah satu sumber daya kabupaten yang paling berharga.

10. Kota Jambi

Kota Jambi, yang merupakan salah satu dari 11 kabupaten atau kota berbeda yang membentuk Provinsi Jambi, berfungsi sebagai ibu kota provinsi. Luas total Kota Jambi adalah 205,38 km² (sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1986). Secara geografis, Kota Jambi terletak di antara lintang selatan 01°30'2,98" - 01°07'1,07" dan bujur timur 103°40'1,67"- 103°40'0,22". Kabupaten Muaro

Jambi mengelilingi Kota Jambi dari segala sisi, meliputi utara, barat, selatan, dan timur. Dengan kata lain, Kota Jambi benar-benar dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi. Menurut catatan sejarah, Pemerintah Kota Jambi secara historis ditetapkan sebagai Daerah Otonom Kota-Kota Besar di Sumatera melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera No. 103 Tahun 1946. Penunjukan ini dapat ditemukan dalam dokumen sejarah. Setelah itu, pada tahun 1956 Kota Jambi diberi status Daerah Otonom Kota Besar melalui UU No. 9 yang disahkan di Provinsi Sumatera Tengah. Padahal Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 16 Tahun 1985 yang dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah menetapkan hari jadi Kota Jambi sebelas tahun sebelumnya, namun dokumen sejarah mengungkapkan bahwa Kota Jambi terbentuk bersamaan dengan berdirinya Provinsi Jambi. Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957. Dengan kata lain, Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 16 Tahun 1985 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Kota Jambi dapat dijumpai di bagian barat Sub Cekungan Jambi yang merupakan daerah dataran rendah di Sumatera Timur dan merupakan komponen cekungan Sumatera bagian selatan. Kota Jambi memiliki ketinggian yang berkisar antara 0 hingga 60 meter di atas permukaan laut, yang berkontribusi pada geomorfologi kota secara umum datar. Ada daerah berawa yang bisa ditemukan di sekitar Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera dengan panjang lebih dari 1.700 kilometer. Wilayah Kota Jambi memiliki bagian yang bergelombang di utara dan selatan kota, sementara dua sisi Kota Jambi terbagi oleh Sungai Batanghari. Kota Jambi terletak di dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang berfungsi sebagai batas administrasi. Jambi adalah kota yang terletak di Indonesia dengan luas total 205,38 km² dan terdiri dari 11 kecamatan dan 62 pemukiman perkotaan. Berikut adalah daftar kecamatan di Kota Jambi beserta wilayahnya masing-masing dan persentase luas kota secara keseluruhan yang terdiri dari wilayah tersebut:

Tabel 4.13. Luas Wilayah Kecamatan di Kota Jambi

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Kota Baru	36,11	17,56
2.	Kecamatan Alam Barajo	41,67	20,27
3.	Kecamatan Jambi Selatan	11,41	5,55
4.	Kecamatan Paal Merah	27,13	13,20
5.	Kecamatan Jelutung	7,92	3,85
6.	Kecamatan Pasar Jambi	4,02	1,96
7.	Kecamatan Telanaipura	22,51	10,95
8.	Kecamatan Danau Sipin	7,88	3,83
9.	Kecamatan Danau Teluk	15,70	7,64
10.	Kecamatan Pelayangan	15,29	7,44
11.	Kecamatan Jambi Timur	15,94	7,75

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka, 2023

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Alam Barajo memiliki wilayah terluas di Kota Jambi berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.11. Kecamatan ini meliputi 41,67 km², yaitu sekitar 20,27 persen dari total luas kota. Di sisi lain, Kecamatan Pasar Jambi memiliki luas wilayah paling kecil, hanya 4,02 Km² atau sekitar 1,96 persen dari keseluruhan luas Kota Jambi. Pada tahun 2022, populasi Kota Jambi mencapai 619.553 ribu jiwa, berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim dari tahun 2020 hingga 2023 (pertengahan tahun/Juni). Dari jumlah tersebut, populasi laki-laki mencapai 311.616 ribu jiwa, sementara populasi perempuan mencapai 307.937 ribu jiwa. Kota Jambi adalah rumah bagi beragam populasi orang dari latar belakang budaya yang berbeda, termasuk Aceh, Banjar, Batak, Bugis, Flores, Habib (peninggalan Arab), India, Jawa, Padang, Palembang, Papua, Sunda, dan Tionghoa (Hokhian, Tetchiu, Khek, dan Hainan). Semua orang rukun satu sama lain dan menghormati satu sama lain. Orang Melayu Jambi merupakan mayoritas penduduk kota. Makna harafiah semboyan “Pilih Tanah Pesako Betuah” tercetak pada pita emas di bawah lambang Kota Jambi. Secara filosofis, Kota Jambi memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan kota, sekaligus pusat kegiatan sosial ekonomi dan budaya. Selain itu, kota merupakan cerminan dari karakter penduduknya dalam menjunjung

tinggi persatuan, baik dalam skala individu maupun keluarga, serta lembaga-lembaga yang lebih besar. Masyarakat Kota Jambi juga patuh an terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, penduduk Kota Jambi juga memegang teguh nilai-nilai adat dan hukum adat nenek moyangnya.

11. Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh dapat ditemukan di provinsi Jambi di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari pemekaran Kabupaten Kerinci, pembentukan kota ini dilakukan sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 8 Oktober 2009. Sungai Penuh terletak antara 10°40' - 20°26' Lintang Selatan dan antara 10°10 08' - 10°10 50' Bujur Timur. Wilayah Kota Sungai Penuh memiliki total luas 39.150 hektar, dimana 59,2% atau 23.177,6 hektar termasuk dalam Taman Nasional Kerinci Seblat. Sisanya 40,8% atau 15.972,4 hektar adalah wilayah perkotaan yang efektif. Berdasarkan pengamatan unsur iklim dari Stasiun Meteorologi Depati Parbo tahun 2022, suhu udara rata-rata Kota Sungai Penuh mencapai 22,9 derajat Celcius. Dimana kondisi dengan suhu rata-rata terendah di bulan Januari, yakni antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan suhu rata-rata terbesar adalah 23,4 derajat Celcius pada bulan Mei. Bulan dengan hujan terbanyak 346,8 mm adalah Maret, dengan 27 hari hujan dilaporkan. Bulan dengan curah hujan paling sedikit adalah November, dengan 58,6 mm dan 14 hari basah. Kota Sungai Penuh memiliki batas-batas berdasarkan letak geografisnya sebagai berikut:

- Utara: Kabupaten Kerinci
- Selatan: Kabupaten Kerinci
- Barat: Kabupaten Bengkulu Utara (Provinsi Bengkulu) dan Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat)
- Timur: Kabupaten Kerinci.

Sejak tahun 2012, Kota Sungai Penuh telah mengalami perkembangan menjadi 8 kecamatan yang meliputi 65 desa dan 4 kelurahan. Kelurahan tersebut

beserta luas dan persentasenya terhadap keseluruhan wilayah Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Luas Wilayah Kecamatan di Kota Sungai Penuh

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)
1.	Kecamatan Tanah Kampung	11,00	2,81
2.	Kecamatan Kumun Debai	142,00	36,27
3.	Kecamatan Sungai Penuh	3,35	0,86
4.	Kecamatan Pondok Tinggi	90,95	23,23
5.	Kecamatan Sungai Bungkal	110,95	28,34
6.	Kecamatan Hamparan Rawang	12,15	3,10
7.	Kecamatan Pesisir Bukit	19,46	4,97
8.	Kecamatan Koto Baru	1,64	0,42

Sumber: Kota Sungai Penuh Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data dalam Tabel 4.12, Kecamatan Kumun Debai merupakan kecamatan terluas di Kota Sungai Penuh, mencakup luas wilayah 142,00 Km² atau sekitar 36,27 persen dari total luas kota. Di sisi lain, Kecamatan Koto Baru memiliki luas lahan paling sedikit, dengan luas hanya 1,64 kilometer persegi atau setara dengan sekitar 0,42 persen dari total luas daratan Kota Sungai Penuh. Lingkungan perkotaan ini terletak di kawasan Bukit Barisan yang diselimuti vegetasi tropis yang lebat dan memiliki topografi pegunungan. Ketinggiannya berkisar antara 650 hingga 1200 mdpl, dengan kemiringan lahan sekitar 0 hingga 20% mencakup area seluas sekitar 6.300 ha. Selain itu, terdapat pula lahan dengan kemiringan bergelombang sebesar 5 hingga 150% seluas sekitar 1.295 ha, kemiringan bergelombang curam sebesar 16 hingga 400% seluas sekitar 4.345 ha, dan lahan dengan kemiringan sangat curam lebih dari 400% seluas sekitar 1.295 ha. Diperkirakan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh akan mencapai 97.770 ribu jiwa pada tahun 2022, dengan populasi laki-laki sekitar 48.947 ribu jiwa, dan populasi perempuan sekitar 48.823 ribu jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata Kota Sungai Penuh pada tahun 2022 adalah 249,73 jiwa/Km², dengan Kecamatan Koto Baru memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu 5.616,46 jiwa/Km². Kecamatan Kumun Debai memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 72,35 jiwa/Km².

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal, Tenaga kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

5.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Pendapatan Domestik Regional Bruto merupakan ukuran yang menggambarkan nilai total dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, umumnya dalam satu tahun. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB ADHB mencerminkan nilai aktual ekonomi dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Pendapatan Regional Bruto atas dasar harga berlaku memberikan gambaran mengenai nilai aktual dari aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Berikut adalah perkembangan Pendapatan Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada periode 2015-2022:

Tabel 5.1. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2022 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata - Rata	Pering- kat
Kerinci	-	13,87	10,22	6,00	5,36	5,59	7,88	8,28	8,17	9
Merangin	-	14,56	11,45	6,91	5,78	2,69	13,94	13,40	9,82	4
Sarolangun	-	9,50	9,91	7,81	4,31	-4,52	15,18	24,86	9,58	6
Batang Hari	-	10,74	10,01	6,59	5,10	-0,38	14,69	29,21	10,85	1
Muaro Jambi	-	12,25	11,48	7,62	5,81	0,51	13,64	18,81	10,02	3
Tanjab Timur	-	5,26	12,46	14,58	2,36	-21,09	12,35	17,02	6,14	11
Tanjab Barat	-	6,70	13,45	16,22	3,59	-13,62	13,32	19,13	8,40	7
Tebo	-	12,78	11,59	6,60	5,45	1,05	15,01	16,17	9,81	5
Bungo	-	10,67	11,49	7,99	3,43	-3,25	16,39	23,68	10,06	2
Kota Jambi	-	14,62	7,74	9,52	6,39	-3,67	8,15	13,23	8,00	10
Sungai Penuh	-	14,98	11,16	9,10	7,60	1,11	5,54	8,76	8,32	8
Provinsi Jambi	-	10,40	10,86	9,53	4,35	-4,93	13,33	17,96	8,79	-

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah), 2023

Dari data yang tercantum dalam Tabel 5.1, dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jambi mengalami peningkatan selama periode 2015-2022, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,79% setiap tahun. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan sebesar 10,4%, dan angka tersebut meningkat menjadi 17,96% pada tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami peningkatan PDRB selama kurun waktu tersebut, hanya Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh yang mengalami penurunan PDRB, meskipun tidak terlalu signifikan. Selama periode penelitian, Kabupaten Batang Hari mencatatkan pertumbuhan rata-rata PDRB ADHB tertinggi sebesar 10,85%, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatatkan pertumbuhan rata-rata terendah sebesar 6,14%.

Selanjutnya, pada tahun 2016, Kota Sungai Penuh mencatatkan pertumbuhan PDRB ADHB tertinggi sebesar 14,98%. Hal ini dikarenakan Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan total produksi diseluruh sektor lapangan usaha dibandingkan pada tahun 2015. Sementara Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatatkan pertumbuhan terendah sebesar 5,26%. Dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat memiliki peningkatan nilai total produksi paling rendah. Meskipun demikian, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada sektor pertanian, pertambangan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2022, Kabupaten Batang Hari menjadi Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan PDRB ADHB tertinggi sebesar 29,21%. Dibandingkan tahun 2016, Kabupaten Batang Hari mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 18,47% pada tahun 2022. Peningkatan ini didukung dengan peningkatan total produksi di hampir seluruh sektor lapangan usaha, khususnya sektor pertambangan dan penggalan. Sedangkan Kabupaten Kerinci mencatatkan pertumbuhan terendah sebesar 8,28%. Apabila dibandingkan tahun 2016, Kabupaten Kerinci menunjukkan terjadinya penurunan PDRB sebesar 5,59%. Kabupaten Kerinci

sendiri mengalami tren penurunan PDRB selama tahun penelitian, hal ini disebabkan oleh terjadinya stagnasi produksi pada sektor pertanian yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Kerinci yang sedikit demi sedikit mulai digantikan sektor jasa dan perdagangan.

5.1.2. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Belanja modal, juga dikenal sebagai investasi modal atau pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membeli atau meningkatkan aset modal jangka panjang. Aset modal ini mencakup hal-hal seperti alat, perlengkapan, real estate, infrastruktur, dan hal-hal lain yang digunakan dalam proses produksi atau dalam menjalankan bisnis. Belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, atau kualitas produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membeli mesin baru untuk meningkatkan produktivitas atau membangun fasilitas baru untuk memperluas operasinya. Berikut adalah data mengenai perkembangan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2015-2022:

Tabel 5.2. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2022 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata - Rata	Pering- kat
Kerinci	-	12,20	10,13	-12,35	53,13	-26,22	-23,87	-25,32	-1,76	8
Merangin	-	16,97	-11,44	-31,32	9,40	21,15	24,83	-78,50	-6,99	11
Sarolangun	-	-17,74	5,71	-13,01	92,86	-40,30	-35,94	16,38	1,14	5
Batang Hari	-	9,94	19,98	-28,26	69,44	-40,08	17,84	55,90	14,96	1
Muaro Jambi	-	-11,24	37,13	-20,51	10,06	-18,44	2,08	-12,40	-1,90	9
Tanjab Timur	-	31,05	-24,79	13,76	5,08	-30,30	0,31	26,36	3,07	4
Tanjab Barat	-	-16,23	85,69	0,39	66,14	-49,23	14,24	-5,67	13,62	2
Tebo	-	-4,79	-0,12	10,83	3,90	-48,02	58,88	68,53	12,74	3
Bungo	-	-35,85	41,10	30,21	15,46	-34,37	-32,92	-7,53	-3,41	10
Kota Jambi	-	10,14	-1,15	6,32	-3,08	2,83	11,58	-23,64	0,43	6
Sungai Penuh	-	19,14	-18,24	12,32	-9,32	-23,73	25,39	-16,99	-1,63	7
Provinsi Jambi	-	19,46	-5,28	-12,38	10,42	21,92	-39,17	41,09	2,77	-

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah), 2023

Tabel di atas menggambarkan variasi perkembangan belanja modal pemerintah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode penelitian. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,77 persen setiap tahun. Pada tahun 2016, terjadi pertumbuhan belanja modal di Provinsi Jambi sebesar 19,46 persen, dan fluktuasi berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 41,09 persen. Meskipun perkembangan belanja modal terkoreksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun belanja modal kembali meningkat seiring penurunan Covid-19 dan perbaikan kondisi ekonomi.

Kabupaten Merangin memiliki rata-rata pertumbuhan belanja modal terendah, yaitu sebesar -6,99 persen setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setiap tahun Kabupaten Merangin tidak mengalami peningkatan dalam belanja modal. Fenomena ini dikarenakan Kabupaten Merangin mengalami penurunan kinerja keuangan, dimana proporsi pendapatan daerah Kabupaten Merangin mengalami penurunan. Sementara itu, Kabupaten Batang Hari memiliki rata-rata pertumbuhan belanja modal terbesar, yaitu sebesar 14,96 persen setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh intensitas Kabupaten Merangin dalam beberapa tahun terakhir dalam hal pengembangan infrastruktur yang khususnya mendukung sektor pertambangan dan penggalian, yang mana turut meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Merangin.

Pada tahun 2016, Kabupaten Bungo mencatat pertumbuhan belanja modal terendah sebesar -35,85 persen, hal ini disebabkan oleh. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan asli daerah, sehingga penyerapan anggaran untuk belanja modal mengalami penurunan. Sementara Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pertumbuhan terbesar sebesar 31,05 persen. Pada tahun 2022, pertumbuhan belanja modal terendah terjadi di Kabupaten Merangin dengan angka sebesar -78,5 persen, hal ini disebabkan oleh anggaran daerah Kabupaten Merangin pada tahun 2022 difokuskan pada pembayaran pokok hutang Kabupaten Merangin. Sementara Kabupaten Tebo mencatat pertumbuhan terbesar sebesar

68,53 persen, hal ini disebabkan karena perbaikan pertumbuhan ekonomi setelah pandemi Covid-19, sehingga mempengaruhi peningkatan penerimaan anggaran daerah serta kemampuan pengalokasian belanja modal.

5.1.3. Perkembangan Tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan terlibat dalam aktivitas pekerjaan, baik yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sedang tidak bekerja sementara, maupun yang menganggur. Angkatan kerja yang bekerja mengacu pada individu yang sedang aktif dalam kegiatan ekonomi dan terlibat dalam pekerjaan. Kategori ini mencakup individu yang memiliki pekerjaan, baik itu dalam bentuk pekerjaan penuh waktu, paruh waktu, atau pekerjaan kontrak.

Tabel 5.3. Perkembangan Tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2022 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata- Rata	Pering- kat
Kerinci	-	-3,41	3,02	5,74	-5,88	6,03	2,97	4,09	1,79	6
Merangin	-	14,52	-0,49	3,25	0,07	2,07	0,74	0,82	3,00	2
Sarolangun	-	4,55	2,52	-2,84	-0,75	5,03	-3,21	4,93	1,46	7
Batang Hari	-	5,65	-1,44	3,03	-6,92	12,13	3,38	-5,90	1,42	9
Muaro Jambi	-	4,59	3,70	7,44	-5,44	6,15	4,20	9,65	4,33	1
Tanjab Timur	-	13,43	-0,31	-4,06	-1,84	6,97	-3,65	3,09	1,95	5
Tanjab Barat	-	16,62	-6,43	11,49	-5,15	8,43	-0,12	-4,18	2,95	4
Tebo	-	3,12	-0,47	2,74	0,26	2,91	0,56	0,90	1,43	9
Bungo	-	6,63	0,09	7,52	-3,77	1,48	-0,10	9,07	2,99	3
Kota Jambi	-	5,70	-0,22	2,88	2,74	-6,48	-0,84	5,09	1,27	10
Sungai Penuh	-	9,27	-2,95	8,52	-9,53	3,40	1,59	-1,92	1,20	11
Provinsi Jambi	-	9,18	-2,06	4,05	-2,40	3,29	0,45	2,92	2,20	-

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah), 2023

Berdasarkan data pada Tabel 5.3, terdapat penurunan dalam tenaga kerja di Provinsi Jambi selama periode 2015-2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,20 persen setiap tahun. Pada tahun 2016, terdapat pertumbuhan sebesar 9,18 persen namun kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 2,92 persen pada tahun 2022. Kabupaten Muaro Jambi mencatat rata-rata pertumbuhan tenaga kerja

tertinggi selama periode penelitian, yaitu sebesar 4,33 persen. Di sisi lain, Kota Sungai Penuh mencatat rata-rata pertumbuhan terkecil selama periode penelitian, yaitu sebesar 1,2 persen.

Kemudian dapat diketahui bahwasannya pada tahun 2016 perkembangan tenaga kerja tertinggi diperoleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan perkembangan sebesar 16,63 persen, hal ini sejalan dengan peningkatan angkatan kerja hampir setiap tahunnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara tahun 2016 perkembangan terkecil diperoleh Kabupaten Kerinci dengan perkembangan sebesar -3,41 persen, ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan tenaga kerja di Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci merupakan wilayah yang didominasi sektor unggulan primer seperti pertanian, sehingga tenaga kerja Kabupaten Kerinci cenderung dominan pada sektor informal seperti pada sektor pertanian yang cenderung swasembada.

Kemudian pada tahun 2022, Kabupaten/Kota yang memperoleh perkembangan tenaga kerja terbesar adalah Kabupaten Muaro Jambi dengan perkembangan sebesar 9,65 persen. Hal ini merupakan salah satu pengaruh dari perbaikan kondisi ekonomi setelah pandemi Covid-19. Kabupaten Merangin merupakan wilayah yang mulai mengalami perubahan sektor unggulan terhadap sektor industri, sehingga perusahaan yang menekan jumlah tenaga kerja pada saat Covid-19 kembali menyerap tenaga kerja seiring perbaikan kondisi ekonomi. Selain itu perkembangan terkecil pada tahun 2022 diperoleh Kabupaten Batang Hari dengan perkembangan sebesar -5,9 persen. Hal ini disebabkan karena menurunnya angka pencari kerja di Kabupaten Merangin, selain itu tidak terjadinya *match* antara kebutuhan perusahaan dengan kualitas tenaga kerja.

5.1.4. Laju Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Tingkat Pengangguran Terbuka menggambarkan persentase individu yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan aktif namun belum

berhasil menemukan pekerjaan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk bekerja, siap untuk bekerja, tetapi saat ini tidak memiliki pekerjaan. Berikut perbedaan pertumbuhan TPT di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2015-2022:

Tabel 5.4. Selisih Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2022 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata - Rata	Pering- kat
Kerinci	-	-0,31	-0,10	-0,52	-0,12	-0,19	-0,11	0,31	-0,15	10
Merangin	-	-0,89	-0,39	-0,63	0,21	1,18	-0,03	-0,14	-0,10	9
Sarolangun	-	-0,06	-2,22	1,81	0,03	1,62	-0,19	-0,30	0,10	3
Batang Hari	-	0,66	-0,47	0,30	0,69	-0,14	-0,16	-0,73	0,02	5
Muaro Jambi	-	-0,12	0,11	-0,87	0,68	0,23	0,16	-0,24	-0,01	6
Tanjab Timur	-	0,23	0,69	-0,56	-0,17	-0,22	0,15	-0,24	-0,02	7
Tanjab Barat	-	-0,12	0,51	-0,69	0,19	-0,41	0,37	0,35	0,03	4
Tebo	-	0,18	-0,14	0,02	0,90	0,05	-0,12	-1,45	-0,08	8
Bungo	-	1,88	0,03	-1,86	0,79	2,12	-0,08	-0,36	0,36	1
Kota Jambi	-	-0,30	-1,47	0,86	0,12	3,96	0,17	-1,71	0,23	2
Sungai Penuh	-	-5,07	1,03	0,99	-1,13	1,56	-2,56	-0,51	-0,81	11
Provinsi Jambi	-	-0,34	-0,13	-0,01	0,33	0,94	-0,04	-0,50	0,10	-

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah), 2023

Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel 5.4, selama periode 2015-2022, terlihat adanya tren penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. Rata-rata selisih TPT di Provinsi Jambi adalah 0,1 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2016, selisih TPT Provinsi Jambi mencapai -0,34 persen dan kemudian menurun menjadi -0,5 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pengangguran terbuka di Provinsi Jambi.

Kabupaten/Kota dengan rata-rata selisih TPT terendah adalah Kota Sungai Penuh, dengan angka -0,81 persen setiap tahunnya. Ini berarti hampir setiap tahun Kota Sungai Penuh mengalami penurunan TPT. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan rata-rata selisih TPT tertinggi adalah Kabupaten Bungo, dengan angka 0,23 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2016, rata-rata selisih TPT terendah terjadi di Kota Sungai Penuh, dengan angka -5,07 persen. Hal ini terjadi seiring

peningkatan sektor perdagangan dan jasa di Kota Sungai Penuh, sehingga menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan pengangguran. Sementara yang tertinggi terjadi di Kabupaten Bungo, dengan angka 1,88 persen. Artinya terjadi peningkatan Pengangguran di Kabupaten Bungo pada tahun tersebut, yang mana seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan dan kompetensi tenaga kerja disbanding permintaan tenaga kerja.

Selanjutnya, pada tahun 2022, rata-rata selisih TPT terendah terdapat di Kota Jambi, dengan angka -1,71 persen. Kota Jambi sendiri dalam beberapa tahun terakhir fokus dalam pengembangan sektor umkm, yang mana menyerap tenaga kerja lebih banyak, sehingga menurunkan pengangguran Kota Jambi. Sedangkan yang tertinggi terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan angka 0,35 persen. Fenomena ini mulai terjadi mulai tahun 2021, dimana TPT Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menunjukkan peningkatan akibat pandemi Covid-19 dan fenomena PHK, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya mengalami perbaikan kondisi ekonomi.

5.2. Pengaruh Belanja Modal, Tenaga kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

5.2.1. Analisis Regresi Data Panel

1. Estimasi Model Regresi Data Panel

Dalam proses analisis regresi data panel, diperlukan beberapa tahap estimasi model. Tahap-tahap tersebut meliputi estimasi model *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Berikut adalah hasil estimasi ketiga model tersebut.

Tabel 5.5. Common Effect Model (CEM)

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-statistik	Probabilita
C	0.237739	0.970350	0.245003	0.8071
Ln (BM)	0.347998	0.097942	3.553101	0.0006
Ln (AK)	0.645385	0.090489	7.132158	0.0000
TPT	-0.024942	0.020012	-1.246383	0.2161
R-Squared			0.550304	
F-Statistik			34.26429	
Prob (F-Statistik)			0.000000	

Sumber: Eviews 12 (Data diolah), 2023

Dari tabel 5.5, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas uji F lebih kecil daripada tingkat signifikansi 95 persen ($\alpha = 5$ persen). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB ADHB. Selanjutnya, berdasarkan probabilitas uji t dengan tingkat signifikansi 95 persen ($\alpha = 5$ persen), variabel Belanja Modal dan variabel Tenaga Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB ADHB. Setelah melakukan estimasi model pertama, tahap selanjutnya adalah melakukan estimasi model *Fixed Effect*. Berikut adalah hasil estimasi model *Fixed Effect*.

Tabel 5.6. Fixed Effect Model (FEM)

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-statistik	Probabilita
C	-19.03028	3.461089	-5.498350	0.0000
Ln (BM)	0.021624	0.058360	0.370520	0.7121
Ln (AK)	2.408597	0.284155	8.476344	0.0000
TPT	-0.007528	0.015515	-0.485211	0.6290
R-Squared			0.935562	
F-Statistik			82.64485	
Prob (F-Statistik)			0.000000	

Sumber: Eviews 12 (Data diolah), 2023

Berdasarkan tabel 5.6 dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas uji F lebih rendah daripada tingkat signifikansi 95 persen ($\alpha = 5$ persen). Oleh karena itu, secara bersama-sama, semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHB. Selanjutnya, berdasarkan probabilitas uji t dengan tingkat signifikansi 95 persen ($\alpha = 5$ persen), variabel Tenaga Kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB ADHB. Selanjutnya, berikut ini adalah hasil estimasi model *Random Effect*.

Tabel 5.7. Random Effect Model (REM)

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-statistik	Probabilita
C	-5.672291	1.995564	-2.842451	0.0056
Ln (BM)	-0.025573	0.055920	-0.457312	0.6486
Ln (AK)	1.308552	0.165184	7.921770	0.0000
TPT	-0.008706	0.015019	-0.579697	0.5637
R-Squared			0.367238	
F-Statistik			16.25048	
Prob (F-Statistik)			0.000000	

Sumber: Eviews 12 (Data diolah), 2023

Dari tabel 5.7 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas uji F < tingkat signifikansi 95 persen (α 5 persen), sehingga secara bersama – sama seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHB. Sementara berdasarkan probabilita uji t variabel dengan tingkat signifikansi 95 persen (α 5 persen) yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHB adalah variabel Tenaga Kerja.

2. Pemilihan Model Terbaik

Setelah melakukan estimasi model regresi data panel menggunakan tiga model estimasi, dilakukan pengujian menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik. Uji pertama yang dilakukan adalah Uji Chow, yang bertujuan untuk menentukan model terbaik antara Model *Common Effect* (CEM) dan Model *Fixed Effect*. Berikut ini adalah hasil dari Uji Chow.

Tabel 5.8. Uji Chow

Uji Efek	Statistik	d.f.	Probabilita
Cross-section F	44.242326	(10,74)	0.0000
Cross-section Chi-square	170.971821	10	0.0000

Sumber: Eviews 12 (Data diolah), 2023

Hasil dari Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 95 persen (α = 5 persen). Oleh karena itu, H_0 ditolak, yang berarti model yang terpilih dari

Uji Chow adalah Model *Fixed Effect*. Setelah melakukan Uji Chow, dilanjutkan dengan Uji Hausman yang bertujuan untuk menentukan model terbaik antara Model *Fixed Effect* (FEM) dan Model *Random Effect* (REM). Berikut ini adalah hasil dari Uji Hausman.

Tabel 5.9. Uji Hausman

Uji	Statistik	d.f.	Probabilita
<i>Cross-section random</i>	28.433271	3	0.0000

Sumber: *Eviews 12 (Data diolah)*, 2023

Dari hasil Uji Hausman, ditemukan bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* adalah 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 95 persen ($\alpha = 5$ persen). Oleh karena itu, H_0 ditolak, yang berarti model yang terpilih adalah model *Fixed Effect*.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memverifikasi kecocokan model regresi yang digunakan dalam penelitian sebagai alat analisis. Pada regresi data panel, uji asumsi klasik meliputi uji linieritas, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Namun, menurut Basuki dan Prawoto (2015), tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan secara wajib untuk setiap regresi linear yang menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS). Pada model terpilih, yaitu *Fixed Effect Model*, dilakukan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas dilakukan ketika terdapat beberapa variabel independen yang digunakan dalam regresi linier, karena multikolinearitas tidak dapat terjadi jika hanya ada satu variabel bebas. Sedangkan, masalah heteroskedastisitas umumnya terjadi pada data cross-sectional, dan data panel memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan data cross-sectional daripada data time series, sehingga pengujian heteroskedastisitas perlu dilakukan. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini.

Tabel 5.10. Uji Multikolinearitas

<i>Correlation</i>			
	Ln (BM)	Ln(AK)	TPT
Ln (BM)	1.00000	0.413667	0.103424
Ln(AK)	0.413667	1.00000	0.305310
TPT	0.103424	0.305310	1.00000

Sumber: Eviews 12 (Data diolah), 2023

Dari tabel 5.10, dapat dilihat bahwa koefisien antar variabel memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Hal ini sesuai dengan kriteria uji multikolinearitas, yang menyatakan bahwa tidak ada koefisien korelasi antar variabel yang melebihi 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas. Selanjutnya, dilakukan pengujian heteroskedastisitas.

Tabel 5.11. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-statistik	Probabilita
C	-1.932517	1.857168	-1.040572	0.3015
Ln (BM)	0.003344	0.031315	0.106774	0.9153
Ln (AK)	0.168200	0.152473	1.103142	0.2735
TPT	0.002512	0.008325	0.301765	0.7637

Sumber: Eviews 12 (Data diolah), 2023

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diamati bahwa nilai probabilitas untuk setiap variabel independen memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Sesuai dengan kriteria pengujian, ini menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas yang signifikan antara variabel-variabel tersebut.

4. Uji Hipotesis

Keberartian atau signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen dapat ditentukan melalui pengujian hipotesis. Dalam konteks ini, karena model yang digunakan adalah model Fixed Effect (FEM), pengujian hipotesis didasarkan pada hasil estimasi yang diperoleh dari model FEM.

a. Interpretasi Model Persamaan

Berdasarkan hasil estimasi model Fixed Effect (FEM), berikut model persamaannya:

$$\text{Ln (PDRB)} = -19.03028 + 0.021624 \text{ Ln (BM)} + 2.408597 \text{ Ln (AK)} - 0.007528 \text{ TPT} + e_{it}$$

- 1) Konstanta memiliki nilai -19.03028, yang menunjukkan bahwa jika semua variabel independen, yaitu belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka, tetap konstan, maka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku akan mengalami penurunan sebesar 19.03028 persen.
- 2) Koefisien regresi untuk variabel belanja modal adalah 0.021624, yang berarti jika belanja modal meningkat sebesar 1 rupiah, nilai PDRB ADHB akan meningkat sebesar 0.021624 persen.
- 3) Koefisien regresi untuk variabel tenaga kerja adalah 2.408597, yang berarti jika tenaga kerja meningkat sebesar 1 orang, nilai PDRB ADHB akan meningkat sebesar 2.408597 persen.
- 4) Koefisien regresi untuk variabel tingkat pengangguran terbuka adalah - 0.007528, yang berarti jika tingkat pengangguran terbuka meningkat 1 persen, nilai PDRB ADHB akan menurun sebesar 0.007528 persen.

b. Uji F

Uji simultan, yang juga dikenal sebagai uji bersama-sama (*simultaneous test*), digunakan untuk menguji apakah setidaknya satu dari variabel independen dalam model regresi memiliki dampak yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah ada setidaknya satu variabel independen yang secara keseluruhan memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model* (FEM), probabilitas uji F (F-Statistik) memiliki nilai 0,000000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 95

persen ($\alpha = 5$ persen). Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa secara bersama-sama, seluruh variabel independen, yaitu variabel belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka, berpengaruh secara signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku.

c. Uji t

Uji parsial, juga dikenal sebagai uji individual (*individual test*), dilakukan untuk menguji dampak masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen dalam model regresi. Uji parsial digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel independen memberikan kontribusi yang signifikan secara individual terhadap variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model*, diperoleh hasil uji parsial sebagai berikut:

- 1) Variabel Belanja Modal. Nilai probabilitas t hitung variabel belanja modal sebesar 0,7327, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 95 persen ($\alpha = 5$ persen). Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai PDRB ADHB.
- 2) Variabel Tenaga Kerja. Nilai probabilitas t hitung variabel tenaga kerja adalah 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 95 persen ($\alpha = 5$ persen). Oleh karena itu, variabel Tenaga Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai PDRB ADHB.
- 3) Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka, Nilai probabilitas t hitung adalah 0,171, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 95 persen ($\alpha = 5$ persen). Ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai PDRB ADHB.

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi, juga dikenal sebagai *R-squared* (R^2), adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi cocok dengan data observasi yang ada. *R-squared* memberikan informasi tentang

proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi.

Berdasarkan hasil estimasi *Fixed Effect Model* diperoleh nilai *R-Squared* (R^2) sebesar 0,935562. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat Pengangguran terbuka dapat menjelaskan sebanyak 93,56 persen dari variasi yang terjadi pada variabel PDRB ADHB. Sisanya, sebesar 6,44 persen, dapat diatribusikan kepada faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2.2. Pembahasan

1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Belanja modal, juga dikenal sebagai investasi modal, merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, atau individu untuk mendapatkan aset fisik yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Di tingkat pemerintah daerah, belanja modal merupakan bentuk investasi yang penting untuk mendorong pertumbuhan PDRB. Peningkatan belanja modal memungkinkan perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi, dan menerapkan teknologi baru. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya akan meningkatkan PDRB regional (Ramadhani, 2018).

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tidak signifikan, dengan probabilitas sebesar 0,7121 yang lebih besar dari tingkat signifikansi. Hal ini berarti bahwa belanja modal tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap PDRB seperti yang dihipotesiskan dalam penelitian. Penemuan ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sering mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang terus meningkat. Terlebih lagi, pada tahun 2020 dan 2021, dampak

pandemi Covid-19 secara global menyebabkan realokasi anggaran pemerintah daerah. Pada tahun-tahun tersebut, banyak pengeluaran pemerintah daerah yang seharusnya digunakan untuk penambahan aset dan modal dialihkan ke upaya penanganan Covid-19.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengeluaran untuk belanja modal tidak selalu berdampak positif pada pelayanan publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak memberikan dampak yang signifikan pada PDRB. Hal ini disebabkan oleh alokasi belanja yang tidak seimbang antara belanja langsung yang bersifat konsumtif dengan belanja tidak langsung untuk kepentingan publik. Sehingga, meskipun ada pengeluaran untuk belanja modal, tetapi belum mampu meningkatkan PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyadi & Yasa (2014) yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Menurut peneliti, idealnya alokasi belanja modal harus dilakukan agar pemerintah daerah memiliki aset tetap yang dapat meningkatkan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya, realisasi belanja modal cenderung hanya menguntungkan pegawai pemerintah daripada masyarakat umum. Dalam penelitian lain oleh Novianti et al. (2022), ditemukan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, yang disebabkan oleh fluktuasi belanja modal yang tidak menentu.

2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Anggota tenaga kerja, yang aktif terlibat atau berusaha terlibat dalam produksi barang dan jasa, dikenal sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas (usia produktif) dan terbagi menjadi kelompok yang bekerja dan kelompok pengangguran. Tenaga kerja memiliki hubungan langsung dengan produksi. Produksi dalam ekonomi sangat tergantung pada tenaga kerja. Kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang tersedia

mempengaruhi output. Potensi pertumbuhan PDRB akan lebih besar jika lebih banyak orang terlibat dalam kegiatan produksi (Prasetio, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan model regresi FEM, pengaruhnya sebesar 2.408597, yang berarti jika terjadi peningkatan satu orang tenaga kerja, maka PDRB akan meningkat sebesar 2.408597. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tenaga kerja dapat meningkatkan nilai PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang bekerja akan meningkatkan produksi di suatu daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan PDRB.

Studi yang dilakukan oleh Umayanti dan Utama (2019) juga menunjukkan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. PDRB merupakan indikator kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Karena peningkatan produksi akan menghasilkan permintaan input tenaga kerja yang lebih besar, peningkatan jumlah tenaga kerja akan diserap oleh pasar, yang akan memberikan dampak positif pada PDRB. Penelitian lain oleh Daniar (2016) juga menyimpulkan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB suatu daerah.

3. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Pengangguran memiliki hubungan yang kompleks dengan Produk Domestik Regional Bruto. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan PDRB karena ketika sebagian besar tenaga kerja tidak bekerja, produksi barang dan jasa akan mengalami penurunan. Keadaan pengangguran

mengindikasikan bahwa potensi produktif masyarakat tidak dimanfaatkan secara efektif, yang berdampak negatif pada kontribusi ekonomi dan pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Probabilitas TPT sebesar 0.6290 lebih besar daripada tingkat signifikansi 0.05. Temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang mengasumsikan bahwa TPT berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Meskipun TPT di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan, menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, hal ini juga mengindikasikan bahwa penurunan pengangguran tanpa disertai peningkatan struktur dan kualitas tenaga kerja dapat menyebabkan ketidakproduktifan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriani (2022) dan Prasetya & Sumanto (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dan permintaan pasar kerja. Meskipun tingkat pengangguran menurun, jika tenaga kerja tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi yang sesuai dengan permintaan pasar, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang produktif. Ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar dapat menghambat peningkatan PDRB karena berdampak pada produktivitas dan efisiensi.

5.2.3. Implikasi Penelitian

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah sebuah ukuran penting dalam mengevaluasi keadaan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Pengukuran PDRB mencerminkan total nilai dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah atau negara tersebut selama periode tertentu. Ini memberikan gambaran tentang kontribusi ekonomi terhadap produksi dan pertumbuhan

ekonomi secara keseluruhan. PDRB membantu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang penting dan berpotensi untuk pengembangan lebih lanjut. Walaupun PDRB tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang kesejahteraan masyarakat, peningkatan PDRB biasanya dianggap sebagai indikasi peningkatan kemakmuran ekonomi dalam wilayah atau negara tersebut. PDRB juga memberikan petunjuk tentang potensi pendapatan, lapangan kerja, dan akses terhadap barang dan jasa bagi penduduk.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Sementara itu, variabel belanja modal dan tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Implikasi dari temuan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kebijakan terkait ketenagakerjaan, yang merupakan isu makro dalam suatu daerah. Optimalisasi kebijakan ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui program-program penurunan tingkat pengangguran, peningkatan penyerapan tenaga kerja terampil, dan program-program lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah harus didukung dengan alokasi belanja modal yang sehat. Untuk memperbaiki belanja modal, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang mendorong investasi dalam infrastruktur dan sektor-sektor strategis. Ini bisa dilakukan melalui insentif pajak, pengurangan tarif bea masuk, atau subsidi bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan modal fisik. Kebijakan ini akan mendorong peningkatan belanja modal yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian.

Pemerintah juga dapat melakukan reformasi kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Langkah-langkah tersebut termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan perlindungan hukum, pengurangan birokrasi, dan penghapusan hambatan-hambatan investasi. Dengan menciptakan iklim investasi yang baik, perusahaan akan merasa lebih percaya diri untuk

berinvestasi dalam pengembangan modal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Investasi dalam pengembangan kualitas tenaga kerja juga tak kalah penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas belanja modal dan perekonomian. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Hal ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi baru dan proses produksi yang efisien.

BAB VI

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi berdasarkan Harga Berlaku selama periode 2015-2022, terjadi peningkatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 8,79% setiap tahun. Pada tahun 2016, pertumbuhannya mencapai 10,4% dan meningkat menjadi 17,96% pada tahun 2022. Data belanja modal Provinsi Jambi menunjukkan pertumbuhan rata-rata 2,77% setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pertumbuhan belanja modal di Provinsi Jambi mencapai 19,46% dan mengalami fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, dengan peningkatan menjadi 41,09% pada tahun 2022. Sementara itu, data tenaga kerja Provinsi Jambi menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan rata-rata -2,2% setiap tahun. Pada tahun 2016, terdapat pertumbuhan sebesar 9,18 persen namun kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 2,92 persen pada tahun 2022. Data selisih tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi juga menunjukkan tren penurunan, dengan rata-rata selisih TPT sebesar 0,1% setiap tahun. Pada tahun 2016, selisih TPT Provinsi Jambi sebesar -0,34% dan menurun menjadi -0,5% pada tahun 2022.
2. Hasil regresi data panel menggunakan model Fixed Effect menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Namun, secara parsial, hanya variabel tenaga kerja yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sementara itu, variabel belanja modal dan tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan di atas antara lain:

1. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap ketenagakerjaan dan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Diharapkan belanja modal yang cenderung mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak stabil menjadi lebih stabil dengan menyesuaikan pada kebutuhan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi, sehingga peningkatan tenaga kerja dan penurunan pengangguran tidak hanya sebatas kuantitas saja, namun juga kualitas tenaga kerja tersebut.
2. Untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan di Provinsi Jambi, maka perlu ditingkatkan upaya – upaya melalui berbagai program kebijakan pemerintah, serta melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas ketenagakerjaan di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasmen. (2009). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat: 2000-2006.
- Amanda, Y., Zamzami, Z., & Rahmadi, S. (2021). Analisis dampak belanja modal dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tebo. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(1), 11–18. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i1.12495>
- Aryanto, W., & Handaka, R. D. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 2(2), 52–63.
- Azwardi. (2013.) Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia 2009-2012. Palembang. *Journal of Economics and Development*: 67-77.
- BAPPENAS. (2007). *Tinjauan Umum APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- BPS. (2008). *Statistik Indonesia 2008*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- BPS. (2017). *Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 2017-2018*. Badan Pusat Statistik: Provinsi Jambi.
- BPS. (2018). *Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 2017-2018*. Badan Pusat Statistik: Provinsi Jambi.
- BPS. (2019). *Statistik Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 2018-2019*. Badan Pusat Statistik: Provinsi Jambi.
- BPS. (2020). *Statistik Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 2019-2020*. Badan Pusat Statistik: Provinsi Jambi.
- BPS. (2021). *Statistik Tenaga Kerja Kabupaten/Kota 2020-2021*. Badan Pusat Statistik: Provinsi Jambi.
- Daniar, E. (2016). *Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Dhyatmika, K. W., & Atmanti, H. D. (2013). Analisis Ketimpangan

- Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. *Diponegoro Journal Of Ecomonics*, 2, 2.
- Dornbusch, R. dan Stanley F. (2004). Makroekonomi. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Fitri, N. Z. (2020). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kampar*.
- Fitriani, O. (2022). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Riil di Provinsi Indonesia Tahun 2010-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Halim, Abdul. (2001). Manajemen keuangan Daerah: Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hamzah, A., & Setiyawati, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.
- Hariyadi, E., & Yasa, I. M. (2014). Pengaruh PAD Terhadap PDRB dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(12), 549-623.
- Ifani, R. F. (2021). *Analisis Pengaruh Belanja Modal, Investasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019*.
- Kolawole, B. O., & Odubunmi, S. A. (2015). Government Capital Expenditure, Foreign Direct Investment, and Economic Growth Relationship in Nigeria. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(4), 444–453. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n4s3p444>
- Kurniawati, & Muzdalifah. (2022). Pengaruh PAD dan DAU Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 16–28.
- Lubis, C. A. B. E. (2014). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Jurnal Economica, 10(2), 187–193.

- Naza, D. A. A., Rahmadi, S., & Rosmeli, R. (2020). Analisis belanja daerah menurut urusan dan hubungannya terhadap jumlah pengangguran di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 101–108. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v9i2.12483>
- Novianti, F., Riani, W., & Mafruhah, A. Y. (2022, July). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Jawa Barat Tahun 2011-2020. In *Bandung Conference Series: Economics Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 273-281).
- Oluwatobi, S., & Olurinola, I. O. (2011). Government Expenditure on Human Capital Development: Implications for Economic Growth in Nigeria. *Journal of Sustainable Development*, 4(3). <https://doi.org/10.5539/jsd.v4n3p72>.
- Parmawati, Eka. (2010). *Kausalitas Penerimaan, Belanja Dan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pramawati, Eka. (2010). Kausalitas penerimaan belanja dan PDRB kabupaten/kota di Indonesia: Studi kasus Priode 2001-2008.
- Prasetyo, H. (2017). Analisis Pengaruh Investasi, Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Prasetya, G. M., & Sumanto, A. (2022). Pengaruh tingkat pengangguran dan tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. *KINERJA*, 19(2), 467-477.
- Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regresi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Karya Abadi*, 5(2), 5–24.
- Putri, R. A., Zamzami, & Rahmadi, S. (2021). Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 120.

- Rahmadi, S., Hastuti, D., & Parmadi, P. (2022). Pengaruh belanja modal urusan wajib dan urusan pilihan terhadap jumlah penduduk miskin dengan jumlah pengangguran sebagai variabel intervening di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 213–234. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.15726>
- Rahmatullah, M., Amang, B., & Zakaria, J. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Global*, 2(2).
- Ramadhani, F. F. (2018). Analisis Pengaruh Investasi, Belanja Modal, Angkatan Kerja dan PAD Sektor Pariwisata Terhadap PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2016.
- Simanjuntak, P. J. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suandi, I. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Syarifah, L. N. (2020). *Determinan Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Pada Provinsi-Provinsi di Indonesia*.
- Todaro, Michael P. (2000). *Economic Development : Seventh Edition*. New York Univercity : Addison Mesley
- Umayanti, N. L. M. S. A., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah Dan Penanaman Modal Terhadap PDRB Di Provinsi Bali. *E-Journal EP Unud*, 8(7), 1608-1636.
- Wahyudi, I. P. A. R., & Yuliarmi, N. N. (2021). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan. *E-Jurnal EP Unud*, 10(3), 1187–1218.
- Yanti, N., Nurtati, & Misharni. (2020). Investasi Modal Manusia Bidang Pendidikan: Dampak Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 21–37.
- Yunus, S., & Amirullah. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh). *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	ADHB	Ln(ADHB)	BM	LN(BM)	AKB	LN(AKB)	TPT
Kerinci	2015	7.072,07	8.86	177,17	5.18	121.140	11.70	3,67
Kerinci	2016	8.052,84	8.99	198,78	5.29	117.004	11.67	3,36
Kerinci	2017	8.875,71	9.09	218,91	5.39	120.538	11.70	3,26
Kerinci	2018	9.408,04	9.15	191,87	5.26	127.453	11.76	2,74
Kerinci	2019	9.912,47	9.20	293,81	5.68	119.958	11.69	2,62
Kerinci	2020	10.466,73	9.26	216,76	5.38	127.187	11.75	2,43
Kerinci	2021	11.291,29	9.33	165,03	5.11	130.965	11.78	2,32
Kerinci	2022	12.225,70	9.41	123,24	4.81	136.320	11.82	2,63
Merangin	2015	10.588,27	9.27	291,30	5.67	158.682	11.97	5,38
Merangin	2016	12.129,53	9.40	340,73	5.83	181.730	12.11	4,49
Merangin	2017	13.518,64	9.51	301,76	5.71	180.842	12.11	4,10
Merangin	2018	14.452,75	9.58	207,24	5.33	186.724	12.14	3,47
Merangin	2019	15.288,07	9.63	226,73	5.42	186.863	12.14	3,68
Merangin	2020	15.698,89	9.66	274,68	5.62	190.731	12.16	4,86
Merangin	2021	17.886,76	9.79	342,89	5.84	192.138	12.17	4,83
Merangin	2022	20.284,06	9.92	73,72	4.30	193.723	12.17	4,69
Sarolangun	2015	11.176,44	9.32	284,43	5.65	130.586	11.78	4,53
Sarolangun	2016	12.238,48	9.41	233,98	5.46	136.533	11.82	4,47
Sarolangun	2017	13.451,75	9.51	247,35	5.51	139.970	11.85	2,25
Sarolangun	2018	14.502,49	9.58	215,17	5.37	135.993	11.82	4,06
Sarolangun	2019	15.126,92	9.62	414,97	6.03	134.967	11.81	4,09
Sarolangun	2020	14.443,78	9.58	247,73	5.51	141.752	11.86	5,71

Kabupaten/Kota	Tahun	ADHB	Ln(ADHB)	BM	LN(BM)	AKB	LN(AKB)	TPT
Sarolangun	2021	16.635,76	9.72	158,70	5.07	137.204	11.83	5,52
Sarolangun	2022	20.772,10	9.94	184,69	5.22	143.965	11.88	5,22
Batanghari	2015	12.062,83	9.40	156,61	5.05	114.560	11.65	3,38
Batanghari	2016	13.358,22	9.50	172,18	5.15	121.036	11.70	4,04
Batanghari	2017	14.695,34	9.60	206,58	5.33	119.290	11.69	3,57
Batanghari	2018	15.663,92	9.66	148,21	5.00	122.902	11.72	3,87
Batanghari	2019	16.463,29	9.71	251,12	5.53	114.399	11.65	4,56
Batanghari	2020	16.401,51	9.71	150,46	5.01	128.274	11.76	4,42
Batanghari	2021	18.810,82	9.84	177,30	5.18	132.611	11.80	4,26
Batanghari	2022	24.304,97	10.10	276,41	5.62	124.787	11.73	3,53
Muaro Jambi	2015	17.048,62	9.74	302,53	5.71	166.449	12.02	5,40
Muaro Jambi	2016	19.137,82	9.86	268,53	5.59	174.091	12.07	5,28
Muaro Jambi	2017	21.334,80	9.97	368,24	5.91	180.532	12.10	5,39
Muaro Jambi	2018	22.960,99	10.04	292,73	5.68	193.969	12.18	4,52
Muaro Jambi	2019	24.294,99	10.10	322,19	5.78	183.418	12.12	5,20
Muaro Jambi	2020	24.419,84	10.10	262,78	5.57	194.705	12.18	5,43
Muaro Jambi	2021	27.749,95	10.23	268,24	5.59	202.878	12.22	5,59
Muaro Jambi	2022	32.968,48	10.40	234,98	5.46	222.447	12.31	5,35
Tanjung Jabung Timur	2015	17.776,85	9.79	279,11	5.63	105.246	11.56	1,44
Tanjung Jabung Timur	2016	18.712,18	9.84	365,78	5.90	119.375	11.69	1,67
Tanjung Jabung Timur	2017	21.044,14	9.95	275,10	5.62	119.009	11.69	2,36
Tanjung Jabung Timur	2018	24.111,74	10.09	312,96	5.75	114.178	11.65	1,80
Tanjung Jabung Timur	2019	24.680,30	10.11	328,87	5.80	112.079	11.63	1,63
Tanjung Jabung Timur	2020	19.475,30	9.88	229,23	5.43	119.896	11.69	1,41
Tanjung Jabung Timur	2021	21.881,30	9.99	229,95	5.44	115.517	11.66	1,56
Tanjung Jabung Timur	2022	25.606,19	10.15	290,56	5.67	119.088	11.69	1,32

Kabupaten/Kota	Tahun	ADHB	Ln(ADHB)	BM	LN(BM)	AKB	LN(AKB)	TPT
Tanjung Jabung Barat	2015	29.468,51	10.29	268,73	5.59	143.738	11.88	2,68
Tanjung Jabung Barat	2016	31.443,37	10.36	225,11	5.42	167.622	12.03	2,56
Tanjung Jabung Barat	2017	35.670,94	10.48	418,01	6.04	156.851	11.96	3,07
Tanjung Jabung Barat	2018	41.458,28	10.63	419,66	6.04	174.870	12.07	2,38
Tanjung Jabung Barat	2019	42.945,45	10.67	697,23	6.55	165.862	12.02	2,57
Tanjung Jabung Barat	2020	37.097,80	10.52	353,97	5.87	179.842	12.10	2,16
Tanjung Jabung Barat	2021	42.039,50	10.65	404,37	6.00	179.622	12.10	2,53
Tanjung Jabung Barat	2022	50.081,47	10.82	381,43	5.94	172.109	12.06	2,88
Tebo	2015	10.315,53	9.24	245,75	5.50	165.912	12.02	1,94
Tebo	2016	11.633,88	9.36	233,97	5.46	171.095	12.05	2,12
Tebo	2017	12.981,95	9.47	233,69	5.45	170.293	12.05	1,98
Tebo	2018	13.839,07	9.54	258,99	5.56	174.959	12.07	2,00
Tebo	2019	14.593,44	9.59	269,09	5.60	175.417	12.07	2,90
Tebo	2020	14.746,66	9.60	139,86	4.94	180.517	12.10	2,95
Tebo	2021	16.960,38	9.74	222,21	5.40	181.524	12.11	2,83
Tebo	2022	19.702,19	9.89	374,49	5.93	183.165	12.12	1,38
Bungo	2015	12.985,94	9.47	172,42	5.15	150.375	11.92	2,98
Bungo	2016	14.371,14	9.57	110,60	4.71	160.343	11.99	4,86
Bungo	2017	16.022,89	9.68	156,06	5.05	160.485	11.99	4,89
Bungo	2018	17.303,26	9.76	203,21	5.31	172.553	12.06	3,03
Bungo	2019	17.895,94	9.79	234,63	5.46	166.055	12.02	3,82
Bungo	2020	17.315,17	9.76	153,99	5.04	168.517	12.03	5,94
Bungo	2021	20.153,11	9.91	103,30	4.64	168.355	12.03	5,86
Bungo	2022	24.926,31	10.12	95,52	4.56	183.631	12.12	5,50
Kota Jambi	2015	21.293,45	9.97	385,13	5.95	254.351	12.45	7,32
Kota Jambi	2016	24.405,53	10.10	424,20	6.05	268.849	12.50	7,02

Kabupaten/Kota	Tahun	ADHB	Ln(ADHB)	BM	LN(BM)	AKB	LN(AKB)	TPT
Kota Jambi	2017	26.293,31	10.18	419,32	6.04	268.264	12.50	5,55
Kota Jambi	2018	28.797,41	10.27	445,81	6.10	276.000	12.53	6,41
Kota Jambi	2019	30.636,93	10.33	432,10	6.07	283.575	12.56	6,53
Kota Jambi	2020	29.511,69	10.29	444,35	6.10	265.205	12.49	10,49
Kota Jambi	2021	31.918,13	10.37	495,81	6.21	262.974	12.48	10,66
Kota Jambi	2022	36.141,96	10.50	378,62	5.94	276.359	12.53	8,95
Kota Sungai Penuh	2015	4.984,68	8.51	177,94	5.18	39.364	10.58	8,18
Kota Sungai Penuh	2016	5.731,48	8.65	212,00	5.36	43.011	10.67	3,11
Kota Sungai Penuh	2017	6.371,29	8.76	173,33	5.16	41.743	10.64	4,14
Kota Sungai Penuh	2018	6.951,10	8.85	194,68	5.27	45.298	10.72	5,13
Kota Sungai Penuh	2019	7.479,42	8.92	176,54	5.17	40.982	10.62	4,00
Kota Sungai Penuh	2020	7.562,25	8.93	134,64	4.90	42.377	10.65	5,56
Kota Sungai Penuh	2021	7.980,86	8.98	168,82	5.13	43.052	10.67	3,00
Kota Sungai Penuh	2022	8.680,23	9.07	140,13	4.94	42.225	10.65	2,49

Lampiran 2. Hasil Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: ADHB
Method: Panel Least Squares
Date: 05/21/23 Time: 20:24
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 88

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.237739	0.970350	0.245003	0.8071
BM	0.347998	0.097942	3.553101	0.0006
AK	0.645385	0.090489	7.132158	0.0000
TPT	-0.024942	0.020012	-1.246383	0.2161
Root MSE	0.329203	R-squared		0.550304
Mean dependent var	9.728443	Adjusted R-squared		0.534243
S.D. dependent var	0.493727	S.E. of regression		0.336950
Akaike info criterion	0.706627	Sum squared resid		9.536990
Schwarz criterion	0.819233	Log likelihood		-27.09160
Hannan-Quinn criter.	0.751993	F-statistic		34.26429
Durbin-Watson stat	0.186686	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 3. Hasil *Fixed Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: ADHB
Method: Panel Least Squares
Date: 05/21/23 Time: 20:28
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 88

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-19.03028	3.461089	-5.498350	0.0000
BM	0.021624	0.058360	0.370520	0.7121
AK	2.408597	0.284155	8.476344	0.0000
TPT	-0.007528	0.015515	-0.485211	0.6290

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.124617	R-squared	0.935562
Mean dependent var	9.728443	Adjusted R-squared	0.924241
S.D. dependent var	0.493727	S.E. of regression	0.135895
Akaike info criterion	-1.008962	Sum squared resid	1.366587
Schwarz criterion	-0.614840	Log likelihood	58.39431
Hannan-Quinn criter.	-0.850180	F-statistic	82.64485
Durbin-Watson stat	1.433597	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 4. Hasil *Random Effect Model* (REM)

Dependent Variable: ADHB
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/21/23 Time: 20:37
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 88
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.672291	1.995564	-2.842451	0.0056
BM	-0.025573	0.055920	-0.457312	0.6486
AK	1.308552	0.165184	7.921770	0.0000
TPT	-0.008706	0.015019	-0.579697	0.5637
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.301099	0.8308
Idiosyncratic random			0.135895	0.1692
Weighted Statistics				
Root MSE	0.151543	R-squared		0.367238
Mean dependent var	1.532964	Adjusted R-squared		0.344640
S.D. dependent var	0.191601	S.E. of regression		0.155109
Sum squared resid	2.020947	F-statistic		16.25048
Durbin-Watson stat	0.624213	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.210307	Mean dependent var		9.728443
Sum squared resid	16.74752	Durbin-Watson stat		0.075325

Lampiran 5. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	44.242326	(10,74)	0.0000
Cross-section Chi-square	170.971821	10	0.0000

Lampiran 6. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.433271	3	0.0000

Lampiran 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation					
	BM	AK	TPT		
BM	1.000000	0.413667	0.103424		
AK	0.413667	1.000000	0.305310		
TPT	0.103424	0.305310	1.000000		

Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 05/21/23 Time: 21:13
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 11
Total panel (balanced) observations: 88

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.932517	1.857168	-1.040572	0.3015
BM	0.003344	0.031315	0.106774	0.9153
AK	0.168200	0.152473	1.103142	0.2735
TPT	0.002512	0.008325	0.301765	0.7637

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.066868	R-squared	0.242077
Mean dependent var	0.098133	Adjusted R-squared	0.108929
S.D. dependent var	0.077248	S.E. of regression	0.072919
Akaike info criterion	-2.254023	Sum squared resid	0.393472
Schwarz criterion	-1.859901	Log likelihood	113.1770
Hannan-Quinn criter.	-2.095241	F-statistic	1.818098
Durbin-Watson stat	1.800011	Prob(F-statistic)	0.055733